



**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2018-2019 DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Pada Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

Doni Rahmanto

NIM. 3312416086

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

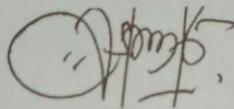
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd., M.Si.  
NIP.197707152 001122008

Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si  
NIP. 196211201987021001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Penguji I

Moh. Aris Munandar S.Sos., M.M  
NIP. 197207242000031001

Penguji II

Eta Yuni Lestari S.Pd., M.H  
NIP. 198706152015042001

Penguji III

Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd., M.Si.  
NIP.197707152 001122008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

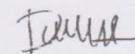


Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A  
NIP. 196308021988031001

**PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini ditulis atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 14 Juli 2020



Doni Rahmanto  
NIM. 3312416086

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Lakukanlah semuanya karena Allah SWT, lakukanlah semuanya karena niat untuk Allah SWT, bismillah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maksimalkan potensi terbaik untuk kebermanfaatan umat, kembangkan karakter maju dan sukses.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dan mengucapkan Bismillah, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan inayah-Nya kepada penulis
2. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Kholifah dan Bapak Supriyono yang senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis
3. Sodikin sebagai kakak kandung penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan sumbangan material
4. Nurlaeli Safitri sebagai adik kandung penulis sekaligus penyemangat luar biasa dalam setiap langkah perjalanan hidupku
5. Keluarga besar almarhum Mbah Sastro Rejo dan Mbah Kasnari yang senantiasa memberikan do'anya

6. Keluarga besar Paman Joyo dan Bibi Tukinem di Maron, Garung yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta nasihat-nasihat untuk penulis
7. Keluarga besar penulis di Menjer, Garung, Wonosobo
8. Arifin, Ririn, Kodri sebagai teman kecil dan seperjuangan penulis yang senantiasa memberikan semangat dan arahan-arrahannya.
9. Ibu Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd M.Si selaku dosen pembimbing penulis
10. Bapak/ibu dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang
11. Keluarga besar Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2016
12. Almamater tercinta penulis, Universitas Negeri Semarang
13. Desa Kalidadap yang selalu penulis banggakan, cintai, serta sayangi

## SARI

Rahmanto, Doni. 2020, *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang*. Skripsi; Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr.Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. 149 halaman.

### **Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Kota Semarang**

Tahun 2018-2019 sampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui Silampah. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif dilaksanakan dengan fokus Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meliputi Kepala Dinas, Pengelola Silampah, Petugas Wilayah Kebersihan I, II, III, dan IV. Metode pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data spiral yang dikembangkan oleh Creswell.

Hasil penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, pelaksanaan *online* meliputi cara penggunaan, keunggulan, jumlah pelapor, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, serta sumber dana Silampah sudah dilakukan secara sistematis. Kedua, pelaksanaan *offline* dengan tahapan peluncuran, pengorganisasian, persiapan, serta evaluasi dilakukan kurang maksimal. Selain itu, peneliti juga menemukan faktor penghambat internal berupa penggunaan nomor palsu, wilayah pembuangan yang tidak dapat dijangkau armada pengangkutan, dan pembuangan di luar wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Faktor penghambat eksternal yaitu bertumpu pada kesadaran dan mental masyarakat itu sendiri.

Simpulan dari penelitian yaitu kurangnya sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah mengakibatkan kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Saran dalam penelitian yaitu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh misalnya kegiatan diskusi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di lingkungan Kota Semarang.

## ABSTRACT

Rahmanto, Doni. 2020. Waste Management by The Environment Office In 2018-2019 in Semarang. Essay; Political Science Study Program, Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor Dr.Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. 149 pages.

### **Keywords: Management, Waste, Semarang City**

In 2018-2019 garbage is managed by the Environment Agency through Silampah. The purpose of research is to know and explain the implementation of Silampah program of Semarang Environment Office.

Research carried out by qualitative method carried out with the focus of the environment Department of the city of Semarang includes the head of Dinas, the management of Silampah, the officers of hygiene areas I, II, III, and IV. Data collection methods are: observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using spiral data analysis developed by Creswell.

The results of this study include two things. First, online implementation includes how to use, excellence, number of whistleblowers, facilities and infrastructure, Human Resources, as well as Silampah funding sources have been systematically carried out. Second, offline implementation with launch stage, organizing, preparation, and evaluation is done less than the maximum. In addition, researchers also found internal obstruction factors such as the use of fake numbers, disposal areas that the transport fleet could not reach, and disposals outside the authority of the Semarang City Environment Office. The external inhibition factor rests on the awareness and mentality of the community itself.

The conclusion of the study of the lack of socialization of the Semarang environmental office in the implementation of the Silampah program resulted in the lack of public awareness in obtaining public information. The advice in the study is the activity of Community empowerment as a whole for example public discussion activities between the local government and the community in the environment of Semarang.

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa banyak memberikan karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang “ dengan baik, sukses, dan lancar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si selaku Ketua Jurusan Pkn Universitas Negeri Semarang yang banyak sekali memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan yang luar biasa, petunjuk, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Natal Kristiono S.Pd, M.H sebagai dosen wali penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan selama perkuliahan di Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak dan ibu dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan ini.
7. Bapak Muthohar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi dalam penelitian penulis.
8. Segenap keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang selalu membantu penulis dengan memberikan informasi yang bermanfaat dalam penelitian ini.
9. Bapak Supriyono dan Ibu Kholifah sebagai orang tua kandung yang telah banyak memberikan segalanya baik do'a, motivasi, saran-saran, dan sumbangan baik material dan non material.
10. Sodikin sebagai kakak kandung penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan sumbangan material.
11. Nurlaeli Safitri sebagai adik kandung penulis sekaligus penyemangat luar biasa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
12. Keluarga besar almarhum Mbah Sastro Rejo dan Mbah Kasnari yang senantiasa memberikan do'anya.
13. Keluarga besar Paman Joyo dan Bibi Tukinem di Maron, Garung yang senantiasa memberikan dukungan melalui do'a dan nasihat positifnya.

14. Keluarga besar penulis di Menjer, Garung, Wonosobo.
14. Arifin, Ririn, Kodri sebagai teman kecil dan seperjuangan penulis yang senantiasa memberikan semangat dan arahan-arrahannya.
15. Keluarga besar Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2016.
16. Almamater tercinta penulis, Universitas Negeri Semarang.
17. Desa Kalidadap yang menginspirasi semua orang.
18. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Harapan besar penulis semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua generasi emas Indonesia mendatang.

Semarang, 14 Juli 2020



Doni Rahmanto  
NIM. 3312416086

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI .....	vii
PRAKATA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Batasan Istilah .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR .....	14
A. Deskripsi Teoritis .....	14
1. Teori Kebijakan Publik .....	14
2. Teori Pelayanan Publik .....	33
3. Teori Pengelolaan Sampah .....	38
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan .....	46
C. Kerangka Berpikir .....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Latar Penelitian .....	50

1. Jenis Penelitian .....	50
2. Lokasi Penelitian.....	51
3. Waktu Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian .....	52
C. Sumber Data .....	53
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Uji Validitas Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
A. Hasil Penelitian .....	68
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
a. Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang .....	68
b. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan TPS.....	69
2. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang.....	72
a. Pelaksanaan <i>Online</i> Silampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang .....	72
b. Pelaksanaan <i>Offline</i> Silampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang .....	75
1) Peluncuran atau <i>Launching</i> Pelaksanaan Program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ..	76
2) Pengorganisasian Tim Pelaksana Pelaksanaan Program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang .....	80
3) Persiapan dan Pelaksanaan Program Silampah .....	86
4) Evaluasi Program Silampah .....	122
3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Silampah ...	125
a. Faktor Internal .....	125
b. Faktor Eksternal .....	127
B. Pembahasan.....	129

BAB V PENUTUP .....	143
A. Simpulan .....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN .....	149

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Semarang .....	69
Gambar 4.2 Program Silampah Dinas Lingkungan Hidup .....	73
Gambar 4.3 Cara Pengaduan Dengan Silampah .....	75
Gambar 4.4 Kegiatan Peluncuran Program Silampah.....	79
Gambar 4.5 Peluncuran Program Silampah di Kantor DLH .....	80
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	83
Gambar 4.7 Pasukan Merah Sebagai Tim Pelaksana Program Silampah.....	86
Gambar 4.8 Sosialisasi Program Silampah Melalui Media Sosial.....	93
Gambar 4.9 Permasalahan Sampah di Kota Semarang.....	96
Gambar 4.10 Petugas di <i>Commad Center</i> Sedang Melakukan Pengecekan ....	98
Gambar 4.11 Pelaksanaan Koordinasi UPT .....	100
Gambar 4.12 Pelaksanaan Program Silampah di Jalan Noroyono.....	103
Gambar 4.13 Pelaksanaan Program Silampah di Jalan Satria Wibowo 03.....	105
Gambar 4.14 Pembersihan dan Pengangkutan Pada Tahun Baru 2020 .....	107
Gambar 4.15 Laporan Masyarakat Yang Tidak Tertangani Silampah .....	120
Gambar 4.16 Laporan Masyarakat Yang Tidak Tertangani Silampah .....	121
Gambar 4.17 Evaluasi Program Silampah Bersama Bapak Kepala Dinas .....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan .....	56
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan .....	59
Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Semarang .....	70
Tabel 4.2 Kecamatan di Kota Semarang dan Luasnya .....	70
Tabel 4.3 Jumlah Kelurahan di Kota Semarang.....	71
Tabel 4.4 Jumlah TPS di Kota Semarang .....	72
Tabel 4.5 Jumlah Laporan Masuk Tahun 2018.....	75
Tabel 4.6 Jumlah Laporan Masuk Tahun 2019.....	76
Tabel 4.7 Jumlah Armada Per UPT Wilayah Kebersihan.....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	150
Lampiran 2 Pedoman Observasi .....	208
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	227
Lampiran 4 Transkrip Wawancara .....	246
Lampiran 5 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	247
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian .....	248
Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Penelitian .....	249
Lampiran 8 Dokumentasi Pelaksanaan Silampah di Lapangan .....	251

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Manajemen dapat diartikan sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Luther M Gulick dalam (Sri Suwitri, 2017) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu (*science*) pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mampu bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Pengelolaan dalam pemaknaan politik berarti suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan (Universitas Medan Area, 2017).

Jones dalam (Arif Rohman, 2009:101) menjelaskan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan dan dikelola oleh lembaga. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Pemaknaan program dalam politik berarti rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut *World Health Organization* dalam (Fadhilah Arief, 2011) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi,

atau Sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menurut Undang-undang ini dapat dibagi atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah adalah produk samping dari aktivitas manusia. Secara fisik sampah mengandung material atau bahan-bahan yang sama dengan produk yang digunakan sebelumnya, yang membedakan adalah kegunaan dan nilainya (Mc. Douglas, Forbes, et al, 2001).

Sampah Kota (*Municipal solid waste*) adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan heterogenitas sampah yang dihasilkan oleh kawasan perkotaan, yang secara ilmiah akan berbeda dari suatu daerah ke daerah lainnya. Karakteristik dan timbunan sampah yang dihasilkan suatu daerah tidak hanya mencerminkan standar kehidupan dan gaya hidup, melainkan mencerminkan potensi keberlimpahan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Sampah perkotaan dapat dibagi menjadi organik dan anorganik. Sampah berkategori organik dapat dibagi lagi menjadi tiga jenis: sampah yang mudah membusuk (*putrescibles*), sampah yang mudah terfermentasi (*fermentable*), dan sampah yang tidak mudah terfermentasi (*non fermentable*).

Sumber utama dari sampah membusuk adalah sisa-sisa makanan, baik sisa dari pengolahan makanan maupun sisa konsumsi (UNEP, 2005)

Sampah menurut Hadiwiyoto dalam (Lesmana Deni, 2013) sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengolahannya, atau tidak ada manfaatnya ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan, mengkaji mengenai pengelolaan sampah khususnya di Kota Semarang yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.

*Pertama*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Kustyardi, Sri Suwitri, Titik Djumiari pada tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Semarang” menyimpulkan bahwa aktivitas pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang tidak harus membutuhkan TPST, tempat khusus untuk mengelola sampah dan peralatan atau teknologi yang canggih. Pengelolaan sampah terpadu bisa dilaksanakan dari masing-masing rumah tangga. Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk melibatkan pemerintah kecamatan maupun kelurahan bersama masyarakat telah didukung oleh sarana yang memadai. Namun, pihak Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sarana tersebut tidak disertai kemampuan masyarakat, dan tidak semua Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) mendapatkan penyuluhan dan pelatihan yang baik dan benar ( Suwitri Sri et al, 2017)

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kismartini, dkk pada tahun 2015 dengan judul “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah” menyimpulkan bahwa pengelolaan bank sampah kelompok peduli lingkungan serasi Kelurahan Sidomulyo dalam aspek teknis operasional telah menunjukkan dampak positif meskipun persentase pengurangan sampah organik masih hanya 0,43%, penyerahan sampah ke bank sampah belum bisa dilakukan secara rutin, penimbangan dan pencatatan sudah dilakukan rapi. Semua transaksi tercatat di buku kas dan buku tabungan. Presentase bagi hasil yang digunakan oleh Bank Sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo bervariasi mulai dari 5:95 (5% untuk bank sampah, 95% untuk nasabah) sampai dengan 10:90 (10% untuk bank sampah, 90% untuk nasabah) tergantung dari harga jual sampah. Dalam aspek kelembagaan, kelembagaan bank sampah masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Ditinjau dari segi hukum, Bank Sampah masih menggunakan SK Lurah Sidomulyo Nomor: 411.2/50/2012 dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 (Saputro Yuso Eko et, 2015)

*Ketiga*, penelitian mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh John L Tampubolon tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah di Kota Semarang” menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang belum semua proses pengelolaannya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Misalnya timbunan sampah masih mengalami kendala, belum maksimalnya tahapan pemanfaatan sampah, sarana prasarana truk yang belum memadai baik dari segi jumlah maupun segi kualitas (Tampubolon John L, 2018).

*Kempat*, penelitian mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Tri Yuniningsih, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di kecamatan Pedurungan kota Semarang terdapat berbagai permasalahan seperti sarana dan prasarana masih belum baik, kurangnya kepedulian masyarakat mengenai sampah, serta masyarakat masih ber *mind-set* sampah yang dipilah di rumah tangga terkumpul kembali saat diangkut petugas sampah, dan masih menggunakan cara pengumpulan pengangkutan hingga pembuangan. Sebagian besar warga belum memilah sampah organik dan anorganik, sehingga belum memanfaatkan limbah sampah menjadi limbah yang bernilai ekonomis (Bahara Agra, 2017)

Dari keempat hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah baik yang dikelola melalui pengelolaan terpadu, bank sampah, melalui Peraturan Daerah belum dapat menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang yang dapat disebabkan oleh beberapa

faktor diantaranya kesadaran masyarakat rendah, petugas pengangkutan yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah.

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai penduduk yang hampir berjumlah 2 juta orang. Dari jumlah penduduk yang besar itu setiap harinya banyak memproduksi berbagai macam sampah, baik yang bersumber dari rumah tangga dan aktivitas industri lainnya. Produksi sampah di Kota Semarang pada Bulan Agustus 2019 mencapai 1,2 ton setiap hari (Tribun Jateng.com, 2017).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil membaca oleh peneliti menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang terbatas pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rekayasa sosial melalui Bank Sampah, pengelolaan sampah dengan model 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*), program

pembagian tugas yang jelas melalui KSM (Kelompok, Swadaya Masyarakat), pembuatan jalur khusus bagi truk sampah, penerapan sistem *landfilled*, kerjasama dengan perusahaan di Kota Semarang, program kantong plastik prabayar, dan Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan tersebut, ternyata belum mampu mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari sampah. Kebijakan tersebut belum optimal sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat. Hasilnya, sebagian besar masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama dalam hal membentuk kesadaran masyarakat pentingnya akan pengelolaan sampah. Sehingga dari kebijakan tersebut, belum dijalankan secara berkelanjutan.

Maka berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya mencari inovasi baru untuk menanggulangi masalah sampah di Kota Semarang yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Semarang pada umumnya. Tahun 2018-2019 Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah dilakukan melalui Silampah yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian sehingga besar peluang peneliti untuk menelitinya.

Arti pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu *pertama*, karena penelitian mengenai pelaksanaan program “Silampah” belum pernah dilakukan sebelumnya. *Kedua*, masyarakat khususnya Kota Semarang dapat mengetahui, memahami, serta dapat mengimplementasikan program

“Silampah” tersebut dengan baik, bijak, dan optimal sehingga permasalahan sampah di Kota Semarang dapat diatasi dengan baik. *Ketiga*, Selain itu masyarakat juga menyadari bahwa persoalan sampah yang tidak kunjung selesai secepatnya dapat diatasi bersama-sama melalui program “Silampah” Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Perlunya dilakukan penelitian ini agar program “Silampah” Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat dimanfaatkan secara optimal, dikembangkan secara menyeluruh dengan harapan besar masalah sampah di Kota Semarang dapat secepatnya diatasi. Target akhirnya dapat menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia dalam penanggulangan masalah sampah dengan berbasiskan teknologi.

Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berinisiatif tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2019 di Kota Semarang?
2. Faktor-faktor penghambat apa saja dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2019 di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2019 di Kota Semarang.
2. Memahami dan mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2019 di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang karena merupakan bagian dari program atau kebijakan yang dikeluarkan tahun 2018-2019, dapat memperkaya kajian ilmu sosial politik khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah).

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ide, gagasan, dan pikiran sebagai tujuan menambah wawasan tentang suatu program politik serta pengetahuan mengenai

pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang.

- b.** Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar lebih maksimal dalam mengelola dan melaksanakan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) tersebut.
- c.** Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai rujukan referensi mengenai program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang.

## **E. Batasan Istilah**

Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah dalam judul penelitian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan batasan-batasan istilah agar peneliti tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dan tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berbeda dari pembaca. Adapun batasan-batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002: 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Penulis membatasi kata pengelolaan dalam penulisan ini bermakna pelaksanaan suatu program, yaitu pelaksanaan program “Silampah” oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **2. Program**

Penulis membatasi bahwa pengertian program di sini dapat dipahami program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Dikatakan oleh Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Program dalam penulisan ini yaitu “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **3. Silampah (Sistem Lapor Sampah)**

Silampah merupakan aplikasi pelaporan masalah sampah berbasis digital yang dihadirkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dengan kemudahan fitur pelaporan masalah sampah dan pencemaran lingkungan secara online, Silampah dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Semarang di manapun dan kapanpun tanpa dipungut biaya. Laporan yang berhasil masuk ke sistem akan segera.

Dengan kemudahan fitur pelaporan masalah sampah dan pencemaran lingkungan secara online, Silampah dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Semarang di manapun dan kapanpun tanpa

dipungut biaya. Laporan yang berhasil masuk ke sistem akan segera diproses oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

#### **4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **5. Sampah**

Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. Menurut UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ proses alam yang berbentuk padat.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah umumnya dalam bentuk sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting pohon, kertas atau karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, debu sisa penyapuan dan lain sebagainya (SNI 19-2454-1991).

Jenis sampah yang terdapat dalam penelitian ini adalah semua sampah dari hasil produksi masyarakat Kota Semarang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Deskripsi Teoritis

##### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Manshur merupakan “*whatever government choose to do or not to do*”. Kegiatan pemerintah baik yang implisit maupun eksplisit dikategorikan dalam kebijakan publik. Interpretasi dari kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. (Indiahono Dwiyanto, 2009:17).

Hogwood dan Gunn menjelaskan bahwa terdapat sepuluh istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu: sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, ekspresi tujuan umum dan aktivitas negara yang diharapkan, proposal spesifik, keputusan pemerintah, otorisasi formal, sebuah program, sebagai *output*, sebagai hasil atau *outcome*, sebagai teori dan model, dan sebagai sebuah proses. Kebijakan menjadi ranah yang sangat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak (Indiahono Dwiyanto, 2009).

Menurut James E. Anderson (1979:3) dalam (Subarsono, 2005:2) kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan

aparapemerintahan. Disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya.

Ealau dan Kenneth mendefinisikan kebijakan publik sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*) (Susilo Teguh Dwi, 2018).

Richard Rose mengatakan bahwa sebuah kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Menurutnya, kebijakan dipahami sebagai pola atau arah kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan, *standard*, proposal, dan *grand design*. (Susilo Teguh Dwi, 2018)

Budi Winarno (2002:17) menjelaskan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lainnya misalnya kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan pemerintah. Leo Agustino (2008:6) menjelaskan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas untuk dipahami, karena kebijakan publik menyangkut banyak hal.

Dijelaskan oleh Nugroho, terdapat beberapa karakteristik dari suatu kebijakan publik yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintahan untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Chandler dan Plano menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah politik atau pemerintah. Kebijakan publik

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. (Tangkilisan, 2003:1).

Dijelaskan oleh Winarno (2011) kebijakan publik dimaknai sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam mencapai tujuan atau merealisasikan suatu program tertentu. (Susilo Teguh Dwi, 2018, 15)

Ahli lain Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Istilah kebijaksanaan mempunyai makna yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan tersebut (Kurniawan Alqaf Riza, 2018).

Carl Friedrich juga menjelaskan mengenai kebijakan publik. Menurutnya kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencari sebuah peluang guna mencapai tujuan yang telah dirancang. (Kurniawan Alqaf Riza, 2018)

Kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor yang dapat kita pahami misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah. Kebijakan merupakan sesuatu yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu terdapat aktor atau yang bisa kita pahami bersama dengan pejabat. Kebijakan merupakan suatu hasil keputusan yang sudah ditetapkan, dari suatu keputusan yang sangat berbeda (Maulidina Ilham Said, 2017).

Suatu kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan ada suatu tahapan yang penting agar dapat diketahui secara bersama penyelenggaraan kebijakan itu seperti apa. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan pemerintah saja, jika kebijakan pemerintah tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diambil sebagai pemecah masalah harus

dilaksanakan bersama oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintahan di tingkat bawahnya. Kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya manusia dan financial. Kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan (Maulidina Ilham Said, 2017:20).

Suatu kebijakan publik di daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat di daerahnya. Penyusunan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada. Sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif, dan berhasil guna. Kebijakan ini disusun dan dirancang dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan publik diharapkan mampu memelihara integrasi nasional dan keutuhan bangsa (Maulidina Ilham Said, 2017:14).

Kepentingan rakyat merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Kebijakan dapat dimaknai berdasarkan elemen-elemennya yang terdiri atas kebijakan sebenarnya mencakup perilaku dan

harapan-harapan, kebijakan mencakup adanya tindakan atau ketiadaan tindakan, memiliki hasil akhir yang hendak dicapai, muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, kebijakan menyangkut peran dan fungsi lembaga yang ada (Susilo Teguh Dwi, 2018:17).

Menurut Wahab dalam ( Susilo Teguh Dwi, 2018:18) kebijakan adalah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan, menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan atau rekomendasi kebijakan untuk membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan.

Michael Howlett dan M Ramesh (1995) menjelaskan kebijakan publik sebagai fenomena kompleks yang terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh individu atau organisasi. Kebijakan publik sering dibentuk oleh kebijakan-kebijakan awal dan sering terkait dengan keputusan lain yang terlihat tidak terkait. Misalnya saja, memahami kebijakan publik selalu seperti lima orang buta yang menyebutnya gajah. Orang yang menyentuh kepalanya mengatakan kepada yang lain bahwa gajah seperti ular. Orang yang menyentuh kakinya mengatakannya seperti pilar (Nugroho Rian, 2014).

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (2005) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa

perbedaan yang dibuatnya. Perbedaan tersebut bahwa kebijakan publik harus berorientasi untuk hasil.

Dari beberapa definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

James E Anderson dalam (Taufiqurakhman, 2014) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

**a. Kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural**

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan dengan baik.

**b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif**

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan para masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak diantara kelompok masyarakat.

**c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik**

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

**d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public good*) dan barang privat (*privat goods*)**

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab dalam (Taufiqurokman, 2014) juga menjelaskan mengenai hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

**a. Tuntutan kebijakan (*policy demand*)**

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu.

**b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)**

Yaitu keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan *statute*, ketetapan-ketetapan, atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

**c. Pernyataan kebijakan (*policy statement*)**

Yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan atau pun pidato pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan.

**d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)**

Yaitu wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkur hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah dirumuskan.

**b. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)**

Yaitu akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang yang ada di masyarakat.

Arti pentingnya studi kebijakan publik menurut Dye (1991), Anderson (1979) adalah pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Dalam konteks meningkatkan profesionalisme praktisi, dapat membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sedangkan dalam konteks berguna untuk tujuan politik, kebijakan publik dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik (Taufiqurakhman, 2014).

Dalam kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yaitu *policy analysis* dan *political public policy*. Pada pendekatan pertama, kebijakan publik lebih terfokus pada pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu (Taufiqurakhman, 2014:15).

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Dalam masyarakat demokratis, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Isi dari kebijakan publik yang dibuat. Dalam masyarakat demokratis, kebijakan publik harus dibuat dengan berpijak pada penelitian-penelitian bermutu yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Proses-proses dari pembuatan kebijakan publik. Proses tersebut harus terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar yang terdiri atas orang-orang otonom. Konsep demokrasi radikal yaitu setiap orang diajak ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik. Berdiri di atas kebijakan dasar bahwa setiap orang adalah manusia otonom yang mampu membuat keputusan dan mengontrol dirinya lalu bekerja sama untuk

membuat kebijakan publik untuk kepentingan bersama (Sahya Anggara, 2018:18).

William Dunn (1999) dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik* mengemukakan empat ciri pokok masalah kebijakan yaitu sebagai berikut.

- a. Saling kebergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
- b. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
- c. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut (Sahya Anggara, 2018:26).

Selanjutnya Charles O. Jones (1963) membuat dua tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.

- b. Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang berdaulat atasnya (Sahya Anggara, 2018:38).

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan opini publik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan efektif diperlukan sejumlah hal. *Pertama*, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang undangan sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yang telah diputuskan. *Kedua*, kebijakan ini juga harus jelas struktur kontrol dan pembiayannya. *Ketiga*, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak (Sahya Anggara, 2018:38)

Menurut said zainal Abiding (2004), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan

oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Kriteria tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil.
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah dalam masyarakat.

Secara umum, menurut Said Zainal Abidin (2004: 31-33), kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebijakan umum, adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

- c. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Variabel-variabel dalam menyusun kebijakan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai elemen-elemen dasar kebijakan yang menyangkut hal-hal yang mencerminkan keperluan terhadap adanya pemahaman yang logis, keterlibatan institusional, dan formalisasi dari suatu proses yang ditempuh. Dijelaskan oleh Jones (1976) bahwa dalam perspektif konseptual, variabel-variabel yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu kebijakan publik yaitu:

- a. **Persepsi/definisi**

Subtansi atau materi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, di dalamnya termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perkunnya mengangkat gagasan kebijakan tersebut.

- b. **Agregasi**

Identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagi pihak yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Materi kebijakan harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan secara proporsional dan berkeadilan serta prioritas.

- c. **Organisasi/lembaga**

Dalam hal ini perlu dicermati tentang *record* para pelaku yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan (Sahya Anggara, 2018:49).

Proses formulasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (2002) dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian persoalan. Tujuannya untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskan dalam hubungan sebab akibat.
- b. Penentuan tujuan. Tujuannya untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang akan diformulasikan.
- c. Perumusan alternatif, sejumlah solusi pemecahan masalah yang akan diplikasikan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
- d. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Dapat berupa kriteria ekonomi politik teknis administrasi peran masyarakat.
- f. Penilaian alternatif. Dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

- g. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan dapat mencapai tujuan secara optimal.

Menurut Hairia (2004:17) dalam (Anggraini Frintin, 2010) terdapat karakteristik dari kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat diikuti oleh petunjuk pelaksanaan yang juga merupakan kebijakan publik dan dapat terkait antara yang satu dengan yang lain.
- b. Kebijakan publik merupakan konsep asas dan pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu.
- c. Kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dinamis, selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
- d. Kebijakan publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pada hakikatnya tugas utama pemerintah adalah mengurus mengeloa melayani masyarakatnya. Dalam konteks ini yang dilakukan oleh pemerintah pertama adalah memutuskan untuk melakukan tindakan yaitu membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik seringkali hanya mneguntungkan sekelompok orang saja yakni

pemerintah. Sebaliknya, kebijakan publik justru merugikan beberapa segmen masyarakat meskipun juga menguntungkan masyarakat yang lain.

Dalam proses perumusan kebijakan, harus dibuat dengan seadil-adilnya. Caranya adalah bersama-sama merumuskannya dengan masyarakat. Semua masyarakat diundang untuk mendiskusikan apa yang perlu dan harus dikerjakan oleh sistem di masa mendatang. Perumusan kebijakan harus terbuka partisipatif tidak boleh ada tekanan ancaman dari siapapun.

Dalam proses pelaksanaan, kebijakan publik dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Pemerintah harus memilih pelaksana yang ahli, kompeten, jujur, dan professional sehingga tujuannya dapat dicapai dengan optimal.

Dalam proses pengawasan dan pengendalian, pemerintah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, karena harus melaporkan pelaksanaan itu secara periodik kepada masyarakat. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengawasi pula. Hasil pengawasannya harus direspon secara memadai oleh pemerintah ditindaklanjuti dalam waktu yang tepat.

Sedangkan dalam proses terakhir evaluasi kebijakan, bersama-sama mengetahui apakah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan telah menghasilkan tujuan yang hendak dicapai atau belum, kemudian apa saja dampak yang telah dirasakan dari adanya kebijakan tersebut, apakah

dilaksanakan dengan baik atau belum, terjadi penyimpangan atau tidak, dan sebagainya (Samodra Wibowo, 2015).

## **2. Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menurut (Agung Kurniawan, 2005) adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Didefinisikan oleh (Ratminto, 2005) bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pengguna jasa dalam pelayanan publik adalah masyarakat, orang, instansi pemerintah, dan badan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dijelaskan oleh (Widodo, 2011), bahwa pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan dalam pemberian pelayanan publik yang baik, maka dalam memberikan layanan seharusnya:

- a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.
- b. Mendapat pelayanan yang wajar.
- c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.
- d. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.

Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan

yang menguntungkan dalam setiap kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan walaupun hasilnya tidak terikat pada suatu produk atau fisik (Harbani Pasolong, 2013).

Menurut (Panji Santosa, 2009), pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau masyarakat.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
- c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana yang memadai.

- f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, sikap, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan (Jurnal Unud).

Terdapat tiga unsur-unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi pemberi pelayanan yaitu Pemerintah Daerah.
- b. Penerima layanan (masyarakat) yaitu orang atau organisasi yang berkepentingan.
- c. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (masyarakat).

Pemerintah Daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai regulator atau pembuat peraturan harus dapat mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat untuk terwujudnya *good governance*. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Dijelaskan (Sinambela, 2010), bahwa pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan pelayanan publik, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Transparan

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan.

e. Kesamaan Hak

Tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan sebagainya.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik

Terdapat lima determinan kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut (Sinambela, 2011) yaitu:

- a. Keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya.
- b. Ketanggapan, kemampuan untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat.
- c. Keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau *assurance*.
- d. Empati, yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi masyarakat.
- e. Berwujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan media komunikasi.

### 3. Teori Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan hidup, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan

masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Fungsinya adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari solusi terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Namun, jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga tersebut tugasnya adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya saja dapat dilakukan dengan penelitian, *study banding*, dan memperhatikan program yang sukses (Sri Subekti, 2010).

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan pengolahan dan pembuangan sampah dengan suatu cara atau metode sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan. Cara pengelolaan sampah yang terkumpul tersedia tiga cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menimbun di suatu tempat, dengan mengabukan, dan dengan daur ulang atau *recycling* ke proses proses yang lain.

a. **Penimbunan**

Cara penimbunan sampah yang paling sederhana adalah penimbunan terbuka, yaitu sampah dikumpulkan secara terbuka di suatu tempat yang dipilih jauh dari tempat aktivitas masyarakat

sehingga tidak banyak menimbulkan banyak gangguan. Dapat dilakukan dengan menimbun sampah di bawah tanah. Pengelolaan sampah dengan penimbunan dapat melibatkan beberapa pihak dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat membuang sampah ke tempat pembuangan sementara.
- 2) Petugas Dinas Kebersihan mengangkut sampah dari tempat timbunan sementara dengan memadatkan sampah terlebih dahulu kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- 3) Pemungut sampah memungut sampah-sampah seperti botol, bahan plastik rongsokan besi.
- 4) Sampah yang ditimbun di tempat penimbunan akhir sebaiknya ditimbun di dalam tanah agar dapat hancur.

#### **b. Mengabukan**

Mengabukan atau insinerasi sering dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Prosesnya tidak sama dengan membakar sampah di tempat yang terbuka. Sampah di bakar di dalam dapur khusus pencemaran yang keluar dari hasil pembakaran yang berupa abu dan bahan-bahan lain yang volumenya tinggal sedikit, ditimbun atau dipendam di tempat yang disediakan. Pada proses pengabuan ini timbul panas sehingga merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Keuntungannya adalah mengurangi masalah kesehatan, mengurangi volume sampah

hingga 80%, kotoran dan sampah dapat dikerjakan bercampur, alat yang digunakan dapat dibuat dengan berbagai ukuran serta sisa pembakarannya kecil dan mudah ditangani (Hadi Kuncoro dkk, 2011).

### **c. Daur Ulang**

Daur ulang merupakan suatu proses yang memungkinkan bahan-bahan yang terbuang dapat dimanfaatkan lagi sehingga seolah-olah tidak ada buangan. Terdapat berbagai bentuk pemanfaatan buangan yang dapat mengatasi masalah sampah yaitu daun, kayu, kertas, dan sisa makanan dapat dijadikan kompos dengan pertolongan mikro-organisme. Daur ulang lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses destilasi kering. Sampah dimasukkan ke dalam ruang tertutup dipanaskan tanpa diberi udara dan dapat mengeluarkan berbagai macam gas yang dapat dimanfaatkan.

Pengelolaan sampah yang lain juga dapat dilakukan dengan metode 3P. Dalam (Kuncoro Hadi, 2011) pengelolaan sampah dengan metode 3P dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Pengurangan**

Pengurangan sampah dapat dicapai dengan tiga cara dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengurangi jumlah bahan yang digunakan per produk tanpa mengorbankan fungsi produk.
- 2) Meningkatkan masa hidup produk.

3) Menghilangkan kebutuhan untuk produk.

**b. Penggunaan Kembali**

Penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan sebagaimana mestinya

**c. Pendaaurulangan**

Menurut Morgan (2009) daur ulang adalah pengelolaan benda-benda yang sudah tidak diinginkan dan tidak terpakai untuk dijadikan bahan baku pembuatan produk baru (Kuncoro Hadi dkk, 2011).

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan paradigma lama kumpul-angkut-buang atau dikenal dengan pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, bahkan masih disebut sebagai tempat pembuangan akhir. Data menyatakan bahwa 90% TPA dioperasikan dengan open dumping dan hanya 10% yang dioperasikan dengan *controlled landill* dan *sanitary landill*. Perbaikan kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah pada skala kota. (Dyah Ernawati dkk, 2012).

Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara tersusun dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi

masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah kita ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab minimal mengurus sampahnya sendiri.

Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan, adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga) seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan menerapkan prinsip 4R yakni, *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (daur ulang) dan *replace* (mengganti) serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Modul Pelatihan Tepat Guna Kesehatan Masyarakat)

Pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan atau pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan atau pengolahan yang dapat penulis jelaskan di bawah ini:

**a. Penampungan Sampah**

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

**b. Pengumpulan Sampah**

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal.

**c. Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem

pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan *truck container* tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat

#### **d. Pembuangan Akhir Sampah**

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Dapat dibagi menjadi tiga metode yaitu sebagai berikut:

##### **1) Metode *Open Dumping***

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

##### **2) Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan terkendali)**

*Controlled Landfill* adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

### 3) Metode *Sanitary landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi (Modul Tepat Guna Kesehatan Lingkungan).

## B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan (Farizqi Pramadianto, Nina Widowati, 2015) dengan judul “Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang” menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan sampah rumah tangga Kota Semarang belum optimal. *Input* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang belum terpenuhi, hal ini dikarenakan kedisiplinan pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang masih perlu diperbaiki, masih perlunya perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan rendahnya anggaran yang diberikan. *Output* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang belum terpenuhi, dikarenakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terkendala akan anggaran yang rendah.

Penelitian yang dilakukan (Rizky Kustyardhi, Sri Suwitri, Titik Djumiarti, 2013), dengan judul “Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Semarang” menyimpulkan bahwa Masih banyaknya Kelompok Swadaya Masyarakat” yang tidak mendapatkan pelatihan dan penyuluhan dalam

mengelola sampah berpengaruh terhadap kemampuan produksi masyarakat dalam mendaur ulang sampah.

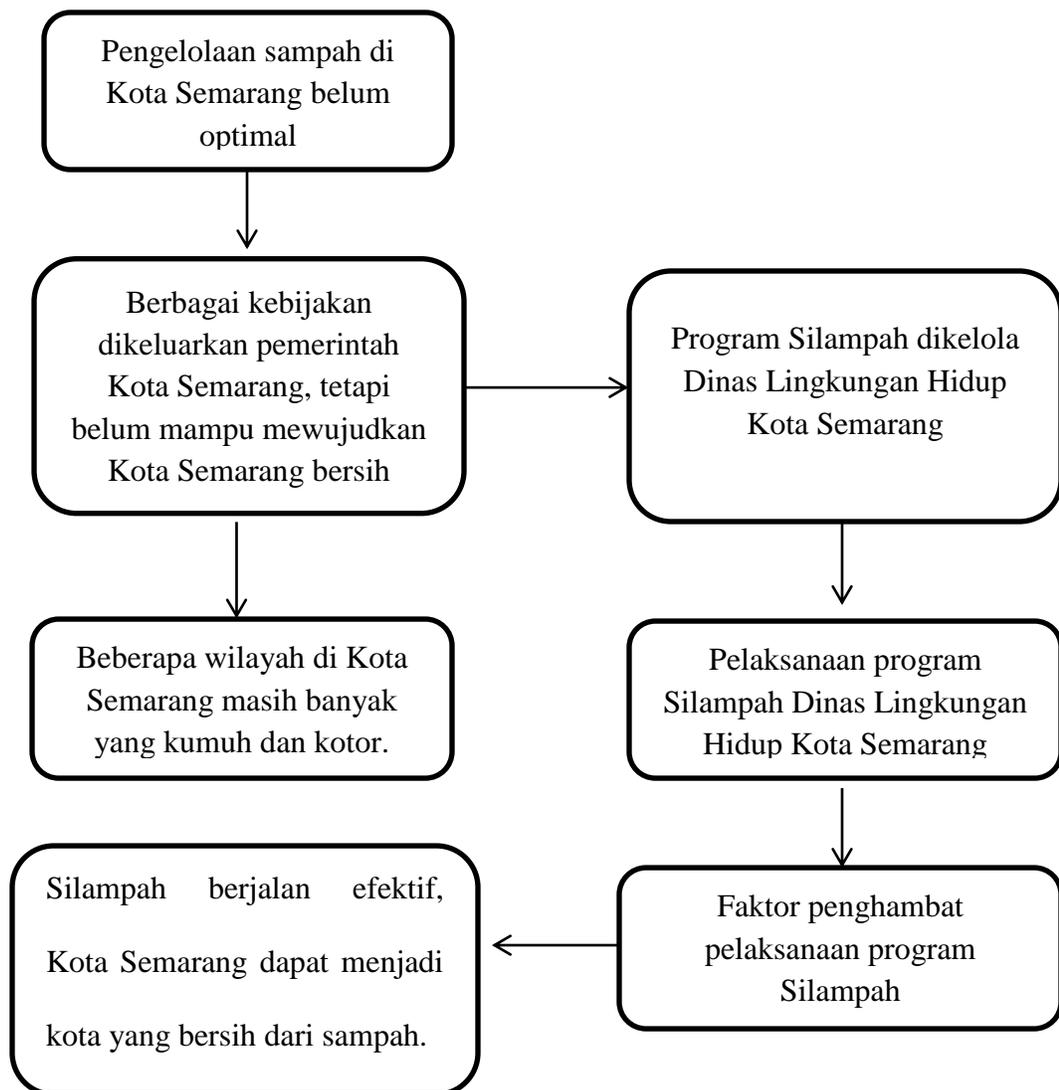
Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu Astuti, Erma Handarsari, Ana Hidayati, Purnomo, Fatmasari Sukesti, 2014) dengan judul “Pengelolaan Sampah Organik Pada Pasar Pedurungan Kota Semarang” menyimpulkan bahwa terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pengepul sampah untuk memilah sampah organik dan non organik, juga tentang cara membuat kompos, serta manajemen usaha.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada aspek kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Penelitian terdahulu terbatas lebih terfokus pada kinerja Dinas Pertamanan Kota Semarang, penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah yang belum maksimal, model Bank Sampah, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah, serta pembentukan kelompok peduli sampah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menfokuskan pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi yaitu program Silampah belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya serta dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Kota Semarang.

Penelitian tentang pelaksanaan program “Silampah” Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2018-2019 belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga besar peluang penulis untuk menelitinya.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada di atas, maka kerangka berfikir yang terdapat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Keterangan Gambar :**

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2018-2019. Dalam penelitian ini, dapat dikaji langsung mengenai pelaksanaan program Silampah dan faktor peenghambat dalam pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Latar Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata atau teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008:46).

Penelitian kualitatif berusaha mengembangkan pengertian tentang individu, kelompok, dan kejadian-kejadian dengan konteks tertentu melalui gambaran fenomena sosial yang holistik dan mendalam yang berorientasi pada proses, dengan asumsi bahwa perilaku itu selalu terikat dengan konteks dan kenyataan sosial yang terjadi (Usman, 2017) dalam (Aniq, 2015).

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk di dalamnya tentang hubungan-hubungan, pandangan-

pandangan, sikap-sikap, dan proses-proses yang sedang berlangsung, serta pengaruh-pengaruh fenomena yang ada di masyarakat (Eva Nur Hidayah, 2020).

Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang dengan fokus pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) yang peneliti kaji melalui tahap peluncuran atau *launching* program, persiapan dan pelaksanaan program, serta evaluasi program Silampah. Selain itu, juga dijelaskan tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan program Silampah.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang sebagai kota yang melaksanakan program Silampah (Sistem Lapor Sampah). Terdapat 16 Kecamatan, 177 Kelurahan, dan kurang lebih 200 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, memilih 3 Tempat pembuangan Sampah (TPS) yaitu TPS di Jalan Satrio Wibowo 3 Tlogosari, TPS di Jalan Noroyono Kecamatan Semarang Utara, dan TPS Bekas Pasar Mpu Tantular Berok. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ketiga Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sudah melaksanakan program Silampah yang dapat dijangkau Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Situs penelitian berada di *Commad Center* Silampah Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang terletak di jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50151, lingkungan perumahan UNDIP di Jalan Dewi Sartika VII No 9, Sukoredjo, Kota Semarang 50221, serta lingkungan di Kota Semarang.

Penelitian di Kota Semarang yang sudah melaksanakan Silampah diantaranya TPS di Jalan Satrio Wibowo 3 Tlogosari, TPS di Jalan Noroyono Kecamatan Semarang Utara, dan TPS Bekas Pasar Mpu Tantular Berok dari total 200 TPS di Kota Semarang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di tempat tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran jelas, terinci, dan ilmiah tentang pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Semarang.

### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan kurun waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan. Penelitian awal dilakukan mulai dari bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Penelitian lanjutan dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2020.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang. Peneliti lebih menfokuskan pada beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Silampah (Sistem Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang.
  - a. Peluncuran atau *launching* program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
  - b. Pengorganisasian Tim Pelaksana program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
  - c. Persiapan dan pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
  - d. Evaluasi program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Silampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Informan yang ditunjuk sebagai sumber data adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya. Adapun yang dimaksud sumber data primer adalah segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan objek material. Jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden dan dokumentasi (Andre, 2019).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan kurang lebih 19 informan

terdiri atas informan utama dan informan pendukung yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Daftar Nama Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama/Usia</b>	<b>Jabatan/Pekerjaan</b>
1.	Drs. Sapto Adi Sugihartono,MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2.	Al-Ghozali (33)	UPT Laboratorium Pengelola Silampah I
3.	Kiki Rahma Kusuma (26)	UPT Laboratorium Pengelola Silampah II
4.	Rifky Asna (23)	UPT Kebersihan Wilayah I
5.	Atikah (31)	UPT Kebersihan Wilayah II
6.	Nur Aziz (33)	UPT Kebersihan Wilayah III
7.	Reza Bahrudin Arrasyid (28)	UPT Kebersihan Wilayah IV
8.	Abdul Haris Nur Hidayat,S.Sos	Camat Kecamatan Semarang Tengah
9.	Aniceto Magno Da Silva, Ap,S.Sos,SH.MH	Camat Kecamatan Semarang Utara
10.	Kusrin,SE	Camat Kecamatan Tembalang
11.	Maryono,SH	Camat Kecamatan Banyumanik
12.	Moeljanto,SE,MM	Camat Kecamatan Candisari
13.	Ronnytjahjo Nugroho,S.Sos,MM	Camat Kecamatan Gunungpati
14.	Apik Nurbaiti	Pengguna Silampah 1/Dosen FMIPA UNNES
15.	Emi	Pengguna Silampah 2/Ibu Rumah Tangga
16.	Ahmad Zaky Fajarian (22)	Masyarakat Umum 1
17.	Adhi Pranoto (22)	Masyarakat Umum 2
18.	Bambang	Lurah Kelurahan Kramas
19.	Agus	Lurah Kelurahan Sendangguwo

Maksud dalam pemilihan informan tersebut untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang Pelaksanaan program Silampah dan

faktor penghambat dalam pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, arsip dan dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tentang program Silampah, foto kegiatan pelaksanaan program Silampah yang penulis peroleh dari media sosial seperti akun resmi *instagram* Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berita atau publikasi pelaksanaan Silampah di web *Jateng Today* dan *Kompas.com*. Sumber pustaka tertulis berupa jurnal, makalah, dan artikel digunakan untuk melengkapi data informasi meliputi kajian-kajian tentang pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Foto digunakan untuk memotret peristiwa yang terjadi di lapangan terkait dengan objek penulisan. Dalam penelitian ini, menggunakan foto yang dihasilkan sendiri pada saat proses observasi awal dan lanjutan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengamatan (Metode Observasi)**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Perbedaannya, wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi

dengan orang sedangkan observasi tidak terbatas pada orang melainkan juga objek-objek alam yang lain (Aniq, 2015)

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti (Usman dan Akbar, 2004) dalam (Aniq, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi pasif. Sugiyono (2015) dalam (Eva Nur Hidayah, 2020), dijelaskan bahwa observasi pasif adalah peneliti datang di tempat orang yang diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan itu. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan program Silampah di *Commad Center* Silampah Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang (Sebelum adanya Pandemi Covid-19) dan pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan program Silampah di beberapa Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Semarang yaitu di Jalan Satrio Wibowo 3 Tlogosari, TPS di Jalan Noroyono, Kecamatan Semarang Utara, dan TPS Bekas Pasar Mpu Tantular Berok. Aspek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah ketika UPT Laboratorium Pengelola Silampah di *Commad Center* Silampah melakukan pengecekan laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Silampah tersebut.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Biasanya, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban. Tujuan wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan untuk mendapatkan hasil jawaban (Aniq, 2015).

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan informan (Idrus, 2009) dalam (Wenny Dwika Paradhita, 2019).

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I dan II, Camat di Kecamatan Kota Semarang, Pengguna Silampah, UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, IV Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat Umum Kota Semarang, dan perwakilan dari Kepala Desa. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan untuk kegiatan wawancara terdiri atas 19 informan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Daftar Nama Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama/Usia</b>	<b>Jabatan/Pekerjaan</b>
1.	Drs. Sapto Adi Sugihartono,MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2.	Al-Ghozali (33)	UPT Laboratorium Pengelola Silampah I
3.	Kiki Rahma Kusuma (26)	UPT Laboratorium Pengelola Silampah II
4.	Rifky Asna (23)	UPT Kebersihan Wilayah I
5.	Atikah (31)	UPT Kebersihan Wilayah II
6.	Nur Aziz (33)	UPT Kebersihan Wilayah III
7.	Reza Bahrudin Arrasyid (28)	UPT Kebersihan Wilayah IV
8.	Abdul Haris Nur Hidayat,S.Sos	Camat Kecamatan Semarang Tengah
9.	Aniceto Magno Da Silva, Ap,S.Sos,SH.MH	Camat Kecamatan Semarang Utara
10.	<sup>D</sup> Kusrin,SE	Camat Kecamatan Tembalang
11.	Maryono,SH	Camat Kecamatan Banyumanik
12.	<sup>D</sup> Moeljanto,SE,MM	Camat Kecamatan Candisari
13.	Ronnytjahjo Nugroho,S.Sos,MM	Camat Kecamatan Gunungpati
14.	<sup>P</sup> Apik Nurbaiti	Pengguna Silampah 1/Dosen FMIPA UNNES
15.	Emi	Pengguna Silampah 2/Ibu Rumah Tangga
16.	Ahmad Zaky Fajarian (22)	Masyarakat Umum 1
17.	Adhi Pranoto (22)	Masyarakat Umum 2
18.	Bambang	Lurah Kelurahan Kramas
19.	Agus	Lurah Kelurahan Sendangguwo

Selain itu, peneliti dalam melakukan wawancara juga menggunakan buku catatan dan bolpoin untuk membantu peneliti dalam mencatat informasi-informasi penting dari narasumber. Wawancara

dilakukan dengan informan yang berjumlah 19 orang. Wawancara dilakukan dari bulan Februari hingga Mei 2020.

Peneliti juga menggunakan alat perekam suara sebagai bukti penelitian dan suara informan dapat disimpan serta dipahami dengan baik. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan program Silampah secara mendalam.

### **3. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2004). Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau mengalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang tentang subjek (Sugiyono, 2009) dalam (Wenny Dwika Paradhita, 2019).

Data dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Arsip jumlah pelapor masuk yang melakukan pengaduan di Silampah.
- b. Data tabel laporan pelaksanaan Silampah.
- c. Buku Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- d. Data dari internet berupa *launching* program Silampah.
- e. Data berita program Silampah di media sosial.
- f. Data foto kegiatan petugas di *Commad Center* dalam pelaksanaan Silampah.

- g. Data publikasi pelaksanaan Silampah di akun resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- h. Data foto kegiatan penelitian tentang pelaksanaan program Silampah.

#### **E. Uji Validitas Data**

Creswell (2015) dalam (Wenny Dwika Paradhita, 2019) mendefinisikan validitas dalam penelitian kualitatif sebagai usaha untuk menilai akurasi dari berbagai temuan. Uji validitas data kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercayai kebenarannya.

Selain itu, untuk mengetahui apakah data tersebut benar atau tidak maka dilakukan pemeriksaan data. Teknik yang dipilih peneliti dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh melalui penelitian. Pengujian keabsahan dilakukan pada hasil penelitian yang belum memiliki kecenderungan sama dan membingungkan dalam penulisan hasil, sehingga perlu dibandingkan dan dicari jawaban yang tepat untuk memperoleh hasil yang sah dan valid.

Penulis melakukan triangulasi dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dilakukan untuk

mencegah kesalahan dalam analisis data mengenai pelaksanaan program Silampah (Aplikasi Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adapun validitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

**1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara**

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan di *Commad Center* Silampah, pengamatan di 3 TPS yaitu di Jalan Satrio Wibowo 3 Tlogosari, TPS di Jalan Noroyono, Kecamatan Semarang Utara, dan TPS Bekas Pasar Mpu Tantular Berok, yang didapat mengenai pelaksanaan program Silampah yang dilakukan dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, Rifky Asna selaku UPT Kebersihan Wilayah I, Atikah selaku UPT Kebersihan Wilayah II, Nur Aziz selaku UPT Kebersihan Wilayah III, serta Reza Bahrudin Arrasyid selaku UPT Kebersihan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Abdul Haris Nur Hidayat, S.Sos selaku Camat Kecamatan Semarang Tengah, Aniceto Magno Da Silva, Ap, S.Sos, SH.MH selaku Camat Kecamatan Semarang Utara, Kusrin, SE selaku Camat Kecamatan Tembalang, Maryono, SH selaku Camat

Kecamatan Banyumanik, Moeljanto, SE, MM selaku Camat Kecamatan Candisari, Ronnyjtjahjo Nugroho, S.Sos, MM selaku Camat Kecamatan Gunungpati, Ibu Apik Nurbaiti selaku pengguna Silampah 1, Ibu Emi selaku pengguna Silampah 2, Adhi Prantono dan Ahmad Zaky Fajariyan selaku masyarakat umum Kota Semarang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Desa Kramas, Agus selaku Kepala Desa Senggdangguwo.

**2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang mengenai pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.**

Membandingkan keadaan dan perspektif dari Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan berbagai pandangan atau pendapat dari Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, Rifky Asna selaku UPT Kebersihan Wilayah I, Atikah selaku UPT Kebersihan Wilayah II, Nur Aziz selaku UPT Kebersihan Wilayah III, serta Reza Bahrudin Arrasyid selaku UPT Kebersihan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Abdul Haris Nur Hidayat, S.Sos selaku Camat Kecamatan Semarang Tengah, Aniceto Magno Da Silva, Ap, S.Sos, SH.MH selaku Camat Kecamatan Semarang Utara, Kusrin, SE selaku Camat Kecamatan Tembalang, Maryono, SH selaku Camat Kecamatan Banyumanik, Moeljanto, SE, MM selaku Camat Kecamatan Candisari, Ronnyjtjahjo

Nugroho,S.Sos,MM selaku Camat Kecamatan Gunungpati, Ibu Apik Nurbaiti selaku pengguna Silampah 1, Ibu Emi selaku pengguna Silampah 2, Adhi Prantono dan Ahmad Zaky Fajariyan selaku masyarakat umum Kota Semarang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Desa Kramas, Agus selaku Kepala Desa Sendangguwo, terkait dengan pelaksanaan program Silampah di Kota Semarang.

**3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan**

Tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan membandingkan hasil wawancara dari Bapak Drs. Sapto Adi Nugroho, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Al-Ghazali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, Rifky Asna selaku UPT Kebersihan Wilayah I, Atikah selaku UPT Kebersihan Wilayah II, Nur Aziz selaku UPT Kebersihan Wilayah III, serta Reza Bahrudin Arrasyid selaku UPT Kebersihan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Abdul Haris Nur Hidayat,S.Sos selaku Camat Kecamatan Semarang Tengah, Aniceto Magno Da Silva, Ap,S.Sos,SH.MH selaku Camat Kecamatan Semarang Utara, Kusrin, SE selaku Camat Kecamatan Tembalang, Maryono,SH selaku Camat Kecamatan Banyumanik, Moeljanto,SE,MM selaku Camat Kecamatan Candisari, Ronnyjtjahjo Nugroho,S.Sos,MM selaku Camat Kecamatan Gunungpati, Ibu Apik

Nurbaiti selaku pengguna Silampah 1, Ibu Emi selaku pengguna Silampah 2, Adhi Prantono dan Ahmad Zaky Fajariyan selaku masyarakat umum Kota Semarang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Desa Kramas, Agus selaku Kepala Desa Sendangguwo, dengan isi dari dokumen-dokumen terkait berupa arsip laporan masuk dalam *Commad Center* Silampah, dokumen tabel jumlah laporan pengaduan dalam *Commad Center* Silampah, foto kegiatan pelaksanaan program Silampah di lapangan melalui akun resmi instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana penulis menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh dan kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data spiral yang dikembangkan oleh Creswell. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

### **1. Mengorganisasikan data.**

Tahap awal ini, peneliti mengorganisir data yang telah diperoleh dalam file-file komputer. Selain itu, peneliti mengkonversi file-file mereka menjadi satuan-satuan teks yang dapat dianalisis dengan tangan maupun komputer (Creswell, 2015) dalam (Wenny Dwika Paradhita, 2019). Data yang diorganisir oleh peneliti berupa file tabel jumlah laporan pengaduan

yang masuk dalam *Commad Center* Silampah, arsip buku Silampah yang peneliti analisis secara mendalam tentang pelaksanaan Silampah.

## 2. Membaca dan membuat memo.

Dilanjutkan dengan proses analisis dengan memaknai *database* tersebut secara keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data dengan memberikan catatan-catatan kecil atau memo di bagian tepi catatan lapangan atau di bawah foto dengan tujuan mempermudah eksplorasi *database* (Creswell, 2015).

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, peneliti membuat memo sebagai catatan di lapangan dan mempermudah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:



### **3. Mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema.**

Pada tahap ini, terdapat penyaringan data bahwa tidak semua informasi digunakan dalam studi kualitatif ini dan terdapat sebagian yang tidak disertakan. Proses ini juga dapat disebut sebagai reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan (Wenny Dwika Paradhita, 2019)

Tahap reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi. Kemudian adalah tahap klasifikasi yaitu memilah-milah teks atau informasi kualitatif dan mencari kategori, tema, atau dimensi informasi (Paradhita Wenny Dwika, 2019).

### **4. Penafsiran Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menafsirkan data ketika melaksanakan penelitian kualitatif. Tahapan penafsiran tersebut dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan dilanjutkan dengan mengorganisasikan tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas yang bertujuan untuk memaknai data (Creswell, 2015) dalam (Paradhita Wenny Dwika, 2019)

## 5. Penyajian data dan memvisualisasikan data

Tahapan akhir analisis data, peneliti menyajikan data dengan mengemas apa yang diperoleh dalam bentuk tabel, teks, gambar, atau bagan (Creswell, 2015) dalam (Paradhita Wenny Dwika, 2019). Contoh penyajian data dalam bentuk tabel, teks, gambar, atau bagan yaitu tabel letak geografis Kota Semarang, tabel jumlah Kecamatan di Kota Semarang, tabel jumlah Kelurahan di Kota Semarang, gambar program Silampah, gambar Peta Kota Semarang dan lain-sebagainya yang dapat dianalisis lebih mendalam.

## BAB IV

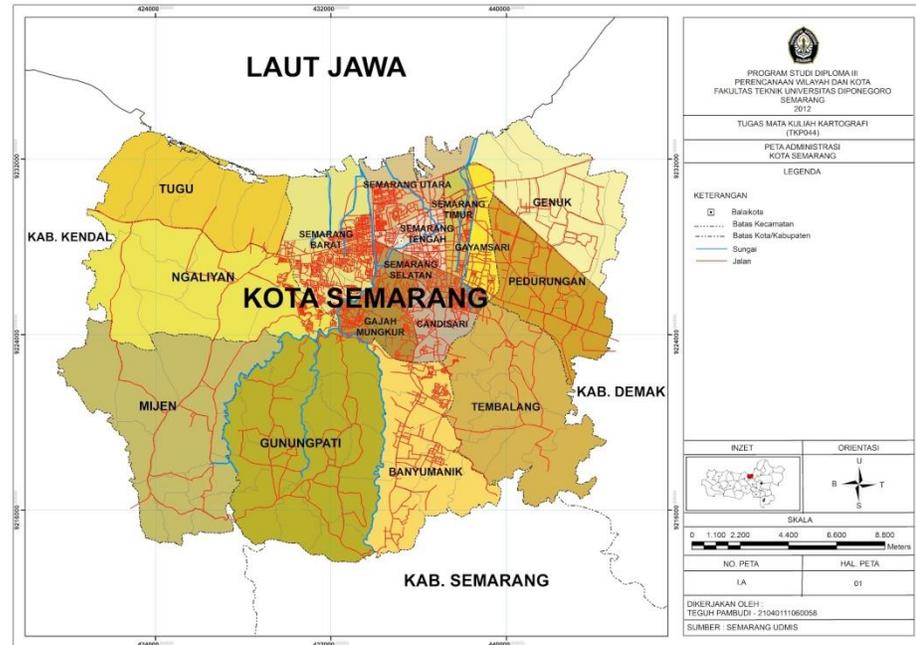
### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### a. Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 4.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Google

Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Dibatasi dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan dibatasi Laut Jawa di

sebelah Utara. Letak geografis Kota Semarang dapat dilihat pada tabel

4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Semarang**

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Sebelah Utara	6 <sup>0</sup> 50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7 <sup>0</sup> 10' LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109 <sup>0</sup> 35' BT	Kab. Kendal
Sebelah Timur	110 <sup>0</sup> 50' BT	Kab. Demak

**Sumber: Kota Semarang dalam angka 2019**

**b. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan TPS di Kota Semarang**

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km<sup>2</sup> terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang, dan Tugu. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Kecamatan di Kota Semarang dan Luasnya**

Kecamatan/ <i>District</i>	Luas Wilayah/ Area ( Km <sup>2</sup> ) <i>Width of Area</i>
010. Mijen	57.55
020. Gunungpati	54.11
030. Banyumanik	25.69
040. Gajah Mungkur	9.07

050. Smg. Selatan	5.928
060. Candisari	6.54
070. Tembalang	44.2
080. Pedurungan	20.72
090. Genuk	27.39
100. Gayamsari	6.177
110. Smg. Timur	7.7
120. Smg. Utara	10.97
130. Smg. Tengah	6.14
140. Smg. Barat	21.74
150. Tugu	31.78
160. Ngaliyan	37.99
Kota Semarang <i>Semarang City</i>	373.7

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019**

Selain itu, Kota Semarang juga terdiri atas 177 Kelurahan yang tersebar pada 16 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3 Jumlah Kelurahan di Kota Semarang**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>
1.	Banyumanik	11
2.	Candisari	7
3.	Gajahmungkur	8
4.	Gayamsari	7
5.	Genuk	13
6.	Gunungpati	16
7.	Mijen	14
8.	Ngaliyan	10
9.	Pedurungan	12
10.	Semarang Barat	16

11.	Semarang Selatan	10
12.	Semarang Tengah	15
13.	Semarang Timur	10
14.	Semarang Utara	9
15.	Tembalang	12
16.	Tugu	7
<b>Total</b>		<b>177</b>

S  
**Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019**

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Semarang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Silampah. Kota Semarang kurang lebih memiliki 200 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dapat dibuktikan pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4 Jumlah TPS di Kota Semarang**

No.	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	UPT Kebersihan Wilayah I (Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Gjahmungkur)	64
2.	UPT Kebersihan Wilayah II (Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur)	29
3.	UPT Kebersihan Wilayah III (Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang)	67
4.	UPT Kebersihan Wilayah IV (Semarang Barat, Mijen, Tugu, Ngaliyan)	40
<b>Total</b>		<b>200</b>

## 2. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang

Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2018-2019 dikelola melalui Silampah (Sistem Lapor Sampah). Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan tentang pelaksanaan Silampah yang dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan *online* dan pelaksanaan di lapangan (*offline*).

### a. Pelaksanaan *Online* Silampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang



**Gambar 4.2 Sistem Silampah**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan sistem pengaduan atau pelaporan masalah sampah berbasis pada teknologi digital atau *android*. Sistem ini salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Semarang khususnya dalam permasalahan sampah.

Dalam praktiknya, Silampah difasilitasi kurang lebih 3 (tiga) buah komputer dengan kecepatan Random Acces Memory (RAM) sebesar 2 GB.

Silampah ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Semarang dimanapun dan kapanpun tanpa dipungut biaya. Laporan yang masuk dalam *Commad Center* segera diproses oleh petugas pengelola Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan kemudian langsung ditindaklanjuti oleh petugas UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait.

#### **1) Cara Penggunaan Sistem Silampah**

Cara penggunaan program aplikasi Silampah sangat mudah dilakukan yaitu ketik nama anda, masukkan nomor telepon, sesuaikan lokasi, isi keterangan, upload foto, kirim. Jika laporan sudah selesai ditangani, maka petugas kebersihan akan segera melaporkan hasilnya.

## 2) Keunggulan Sistem Silampah

Silampah sangat efektif digunakan oleh semua kalangan masyarakat Kota Semarang karena mempunyai beberapa kelebihan diantaranya respon yang cepat, prosesnya yang mudah, tidak dipungut biaya apapun, serta terpantau dan terkontrol.

## 3) Jumlah Pelapor Masuk Silampah

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, jumlah pelapor yang telah melakukan pengaduan pada tahun 2018-2019 tercatat sebanyak 111 laporan. Peneliti merinci laporan tersebut yaitu tahun 2018 sebanyak 76 laporan sedangkan pada tahun 2019 total laporan masuk berjumlah 35 laporan.

## 4) Sarana dan Prasarana Silampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mengelola sampah melalui sampah memfasilitasi beberapa sarana dan prasarana pokok guna melayani masyarakat. Sarana pada Silampah diantaranya 3 (tiga) buah komputer untuk menginput dan melakukan pengecekan data masuk dari masyarakat, 5 (lima) buah meja kerja untuk pegawai di *Commad Center*, 7 (tujuh) buah kursi untuk melayani masyarakat yang datang langsung di *Commad Center*, dokumen atau arsip Silampah, rak khusus Silampah, papan informasi, dan 1 (satu) buah proyektor. Sedangkan prasarana yang

tersedia yaitu 1 (satu) ruang khusus pengaduan yang dinamakan *Commad Center* Silampah, ruang rapat, serta ruang tunggu.

#### **5) Sumber Daya Manusia pada Silampah**

Sumber Daya Manusia secara pokok sebanyak 3 (orang) orang yang bertugas melakukan pengecekan dan koordinasi dengan UPT Kebersihan Wilayah. Total Sumber Daya Manusia yang disediakan oleh dinas terkait baik di UPT Laboratorium dengan UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 250 orang.

#### **6) Sumber Dana Silampah**

Jumlah anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah melalui Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dianggarkan mencapai 10 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengelolaan di *Commad Center*, proses pengangkutan sampah, pemeliharaan BBM, dan kendaraan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### **b. Pelaksanaan *Offline* Silampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang**

Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di lapangan dimulai pada bulan Oktober 2018 hingga berjalan sampai saat ini. Program Silampah merupakan produk inovasi pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang beserta UPT Kebersihan Wilayah di bawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam pelaksanaan program Silampah secara *offline*, terdapat alur mulai dari peluncuran atau *launching* program, persiapan dan pelaksanaan program, serta evaluasi program. Berikut ini merupakan alur pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Peluncuran atau *Launching* Pelaksanaan Program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Peluncuran atau *launching* program Silampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang terletak di Jalan Tapak Raya, Kecamatan Tugu, Kota Semarang 50151 Jawa Tengah. Kegiatan peluncuran Silampah itu diadakan pada Rabu, 17 Oktober 2018 yang dihadiri langsung oleh Pemerintah Kota Semarang yang pada saat itu diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Agus Riyanto, Bapak Muthohar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan jajarannya, perwakilan dari tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Camat di Kota Semarang yang berjumlah kurang lebih 35 orang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang optimis bahwa program Silampah akan membawa pada perubahan perilaku masyarakat dengan mudah melaporkan permasalahan sampah di lingkungan masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini yang semakin pintar dan kebanyakan sudah memiliki ponsel. Pada peluncuran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dalam hal ini Bapak Muthohar disampaikan bahwa program unggulan Silampah ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Semarang yang memiliki ponsel melalui *play store* atau *semarangkota.go.id*. Cara penggunaannya juga mudah dan praktis hanya tinggal klik akan muncul halaman depan Silampah, muncul halaman nomor telepon, alamat, dan foto. Hal ini dilansir dari wawancara dengan Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berikut ini:

“Iya mas, jadi pada tanggal 17 oktober 2018 kami dari DLH ya melakukan peluncuran *launching* program baru kami yaitu Silampah ya atau Sistem Lapor Sampah. Jadi itu yang paling penting dari Silampah ini adalah memudahkan masyarakat dalam melapor masalah sampah. *Kalo punya* ponsel tinggal klik nanti akan muncul aplikasinya dan bisa langsung digunakan tanpa dipungut biaya jadi ya gratis. Dalam peluncuran program itu juga kami undang beberapa perwakilan dari camat, tokoh masyarakat dan lain-lain itu ada sekitar 35 orang mas. (Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 18 Mei 2020).



**Gambar 4.4 Kegiatan peluncuran Program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**  
**Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Berdasarkan gambar di atas, bahwa dapat diketahui dalam peluncuran program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengundang perwakilan dari beberapa tokoh yaitu dari unsur tokoh kepolisian, tokoh masyarakat, dan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Acara peluncuran tersebut berlangsung sangat khidmad, menarik, dan antusias.

Hal yang sama juga disampaikan oleh AL Ghozali (33 Tahun) selaku UPT Pengelola Laboratorium Silampah I yang menegaskan:

“...Silampah ini kami luncurkan pada 17 oktober 2018 mas di sana banyak hadir perwakilan dari tokoh publik kurang lebih 35 orang...”(Wawancara Al-Ghozali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 18 Mei 2020).



**Gambar 4.5 Peluncuran Program Silampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Sumber: Akun Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Lebih lanjut dalam peluncuran Silampah tersebut dijelaskan bahwa melalui program Silampah, laporan atau pengaduan dari masyarakat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di *Commad Center* Silampah yang kemudian ditangani oleh petugas di lapangan. Harapan dari adanya peluncuran program Silampah ini targetnya adalah Kota Semarang menjadi bersih dan mewujudkan masyarakat yang nyaman dengan pengaduan yang berkurang. Selain itu juga menjadi indikator intensitas kebersihan di Kota Semarang.

Apabila terdapat laporan masuk lebih dari tiga kali maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang langsung menegur petugas yang bertanggungjawab di wilayah tersebut. Karena program

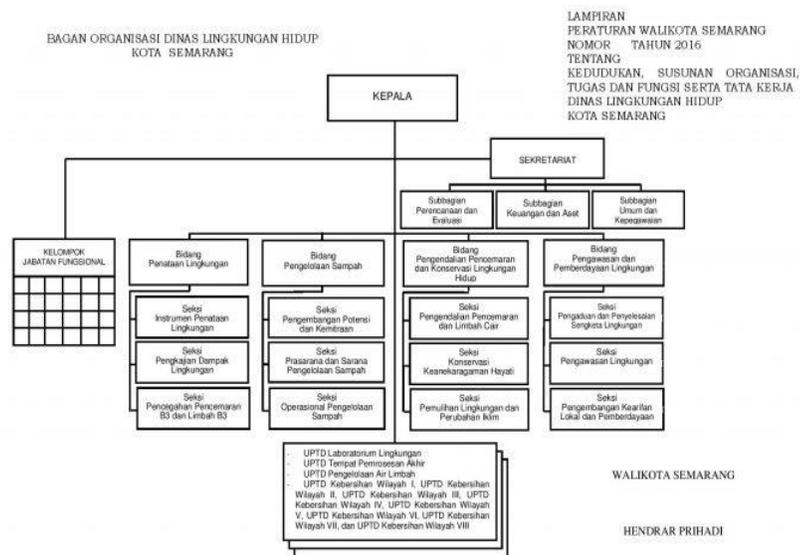
Silampah tersebut juga dirancang untuk merekap waktu laporan yang masuk. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan alat atau sistem pelacakan yang terpasang di armada truk pengangkut sampah dengan tujuan memantau pergerakan armada sehingga tidak ada armada yang keluar di wilayah Kota Semarang. Dalam kegiatan *launching* tersebut juga disampaikan bahwa program ini baru dapat menjangkau di wilayah protokol kota saja belum dapat menjangkau ke daerah terpencil, gang kecil, serta kampung-kampung. Saat peluncuran, armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebanyak 30 armada angkut.

## **2) Pengorganisasian Tim Pelaksana Pelaksanaan Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Dalam pelaksanaan suatu program apapun itu, pasti terdapat tim pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan atau program dilakukan oleh lembaga atau instansi berwenang. Sama halnya dengan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini terdapat pengorganisasian tim pelaksana yaitu secara langsung dipegang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Di bawah wewenang Bidang Pengelolaan

Sampah di bawahnya, terdapat bagian-bagian khusus untuk menangani dan bertanggungjawab melaksanakan program Silampah yang terdiri atas UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, II, dan III, UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV. Adapun UPT Laboratorium Pengelola Silampah di *Commad Center* pada saat ini diduduki oleh Bapak Al-Ghazali, Ibu Kiki Rahma Kusuma, dan Rizki Nugroho. Selanjutnya pada pengorganisasian UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV total berjumlah 250 orang yang antara UPT Kebersihan Wilayah satu dengan yang lain memiliki komposisi jumlah anggota berbeda-beda. Hal ini disampaikan ketika wawancara dengan Al-Ghazali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I yaitu:

“...Untuk tim pelaksana dari Silampah ini itu ada beberapa bagian atau bidang mas yang saling berkaitan. Jadi kami itu kerjasama dari bagian saya di admin *Commad Center* ini, di sini itu kami bertanggungjawab di bawah naungan Bidang Pengelolaan Sampah mas yang terdiri dari tiga orang itu ada UPT Laboratorium I, II, III, dan IV, ke bawah lagi ada UPT Kebersihan I sampai IV itu yang jumlahnya juga banyak. Tapi, masing-masing UPT itu jumlah anggotanya masing-masing beda...”(Wawancara, Al-Ghozali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 18 Mei 2020).



**Gambar 4.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Jumlah tim pelaksana pada masing-masing UPT Kebersihan Wilayah itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Pada UPT Kebersihan Wilayah I jumlah anggota tim pelaksananya kurang lebih ada 68 orang dikoordinir oleh Bapak Rifky Asna. Di dalam UPT Kebersihan Wilayah I terdiri atas admin atau petugas di Kantor, *driver* atau sopir angkut, dan petugas di lapangan. Anggota tim pelaksana yang menempati wilayah UPT Kebersihan Wilayah II berjumlah sebanyak 44 anggota. Dalam hal ini, Ibu Atikah bertugas sebagai Ketua Koordinator Lapangan UPT II. Sama halnya dengan UPT Kebersihan Wilayah I, di UPT Kebersihan Wilayah II juga terdiri atas

sopir, petugas di lapangan yang sering disebut “Pasukan Merah”, dan petugas di kantor. Selanjutnya, untuk UPT Kebersihan Wilayah III dan IV masing-masing jumlah tim pelaksana program Silampah berjumlah 66 dan 72 orang yang dikoordinir langsung oleh Bapak Nur Aziz dan Bapak Reza Bahrudin Arrasyid.

Hal tersebut, diutarakan oleh Rifky Asna selaku Koordinator Lapangan UPT Kebersihan Wilayah I yang menyebutkan:

“...Jumlah SDM di UPT 1 itu ada 68 orang mas, dari *situ* masing-masing anggota menempati bagian yang berbeda-beda. Ada yang di bagian lapangan, kemudian di kantornya sebagai *admin* yang mengkontrol aduan dari masyarakat, ada juga sebagai *driver*...” (Wawancara, Rifky Asna, UPT Kebersihan Wilayah I, 18 Mei 2020).

Pendapat informan di atas, juga dipertegas kembali oleh informan 5 yaitu Atikah selaku Koordinator Lapangan UPT Kebersihan Wilayah II, dijelaskan sebagai berikut:

“...Di UPT 2 sendiri jumlah tim pelaksananya ada 44 orang mas, ya sama seperti UPT-UPT yang lain ada petugas di lapangannya, adminnya, dan sopir buat angkutnya...” (Wawancara, Atikah, UPT Kebersihan Wilayah II, 18 Mei 2020).

Pendapat informan 5 di atas juga dipertegas kembali oleh Bapak Nur Aziz selaku Koordinator Lapangan UPT III sebagai berikut:

“Ya mas, untuk timnya kami di lapangan itu lumayan banyak. Kami itu ada 4 UPT ya yang melayani TPS-TPS di Kota Semarang, karena keterbatasan SDM juga saat ini di UPT I yang ada mas Rifky itu di sana ada 60-an orang petugas, kemudian di UPT 2 ada 40-an juga *kalo gak* salah, *kalo* di UPT kami UPT 3 itu SDM nya ada 66 orang. Sama dengan UPT lain *gak* ada yang beda ada yang di admin, ada yang di lapangan buat mengecek, terus drivernya juga ada. Terus *kalo* di UPT IV kira-kira *setau* saya saat ini ada 72-an anggota *lah* bisa dibilang *gitu* mas” (Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 18 Mei 2020).

Pada dasarnya, tugas dari UPT Laboratorium Pengelola di *Commad Center* Silampah adalah sebagai *admin* pokok untuk melakukan tugas pengecekan laporan pengaduan dari masyarakat. Setiap harinya, petugas *admin* di *Commad Center* Silampah melakukan pengecekan setiap pengaduan atau laporan dari masyarakat. Jumlah laporan yang masuk Silampah setiap harinya tergolong masih rendah berkisar 2 hingga 3 laporan saja. Sedangkan tugas pokok UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV adalah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah. Apabila dari pihak *admin* atau UPT di Laboratorium mengirimkan instruksi adanya aduan permasalahan sampah, maka pihak UPT Kebersihan Wilayah terkait langsung menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan koordinasi yang matang, dan selanjutnya merespon laporan tersebut untuk segera ditangani oleh pihak UPT.



**Gambar 4.7 Pasukan Merah Merupakan Salah Satu Tim Pelaksana Program Silampah**

Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Hal di atas, diakui oleh Bapak Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi Silampah itu *kan* singkatan dari Sistem Lapor Sampah yaitu diharapkan dari sistem itu *e* berharap peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika *e* buangan sampah pertama sampah liar maupun sampah di TPS yang semuanya melebihi kapasitas. Itu *kan* aplikasi terbuka aplikasi yang disebar ke masyarakat umum yang satu untuk kita untuk *admin* Silampah itu sendiri. Ada laporan masuk di Silampah itu nanti kita ada notifikasi di aplikasi kita *nah* itu masing-masing kita cek yang dilaporkan itu wilayah mana kalo missal di wilayah kita kita tindaklanjuti *tapi kalo* bukan di wilayah kita cukup tahu. *Kalo* itu di wilayah kita, segera kita terjunkan tim atau orang untuk penanganan harus di lokasi karena ada foto dan lokasi yang foto tidak boleh ambil dari memori jadi foto langsung, setelah pengerjaan kita foto lokasinya terus yang kemudian di pelapor nanti ada notifikasi kalo sudah dikerjakan”(Wawancara, Nur aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 18 Mei 2020).

### 3) **Persiapan dan Pelaksanaan Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Sebelum pelaksanaan program Silampah, pasti dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan. Alur persiapan program Silampah itu dimulai dari diadakannya kegiatan sosialisasi sebelum peluncuran program Silampah dan persiapan armada pengangkutan guna melayani Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kota Semarang. *Pertama*, dari persiapan jumlah armada yang disediakan, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyediakan armada pengangkutan kurang lebih 101 armada yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Jumlah Armada Per UPT Wilayah Kebersihan**

No.	UPT Wilayah Kebersihan	Jumlah Armada
1.	UPT Kebersihan Wilayah I	36
2.	UPT Kebersihan Wilayah II	25
3.	UPT Kebersihan Wilayah III	22
4.	UPT Kebersihan Wilayah IV	18
	<b>Total</b>	<b>101</b>

**UPT Kebersihan wilayah Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa antara UPT Kebersihan Wilayah yang satu dengan lainnya memiliki jumlah armada berbeda-beda. UPT Kebersihan Wilayah I merupakan wilayah yang memiliki armada pengangkutan terbanyak yaitu sebanyak 36 armada yang dapat dirinci 32 *amroll* dan 4 *dump*, sedangkan UPT Wilayah yang memiliki jumlah armada paling sedikit adalah UPT Wilayah Kebersihan IV sebanyak 18 armada terbagi atas 14 *amrol* dan 4 *dump*. Selanjutnya UPT Kebersihan Wilayah II dan III masing-masing menyediakan armada sebanyak 25 armada terbagi atas 21 *amroll* dan 4 *dump* serta 22 armada terbagi menjadi 17 *amrol* dan 5 *dump*. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara dengan Rifky Asna selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah I sebagai berikut:

“...Ya untuk jumlah armada di wilayah UPT I itu ada 36 buah mas terbagi menjadi 32 *amrol* dan 4 nya itu ke *dump*...” (Wawancara, Rifky Asna, UPT Kebersihan Wilayah I, 18 Mei 2020).

Pendapat informan 4 di atas, dipertegas kembali oleh Atikah selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah II yang menyebutkan:

“...Untuk jumlah armada kami di UPT II ada 25 mas totalnya, 21 buah ke *amroll*, kemudian 4 ke *dump*...” (Wawancara, Atikah, UPT Kebersihan Wilayah II, 18 Mei 2020).

Pendapat informan 4 dan 5 di atas, kemudian dipertegas kembali oleh Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III yang menjelaskan sebagai berikut:

“...Di UPT III sendiri untuk jumlah total armada ada 22 mas. Nah 22 itu dibagi dalam 17 *amroll* dan 5 nya itu *dump* mas...” (Wawancara Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 18 Mei 2020).

Selanjutnya, Reza Bahrudin Arrasyid selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah IV juga mempertegas sebagai berikut:

“...Ada kurang lebih 18 armada mas itu juga terbagi menjadi 14 *amroll* dan 4 nya di *dump*...” (Wawancara, Reza Bahrudin Arrasyid, UPT Kebersihan Wilayah IV, 18 Mei 2020).

Dari jumlah total armada yang dimiliki setiap UPT Kebersihan Wilayah baik I, II, III, dan IV itu ternyata memiliki wilayah pelayanan masing-masing yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Semarang. Setiap satu UPT Kebersihan Wilayah melayani masing-masing 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Semarang. UPT Kebersihan Wilayah I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT Kebersihan Wilayah II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, untuk UPT Kebersihan Wilayah III itu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT Kebersihan Wilayah IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen. Total sebenarnya pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT-UPT tersebut sudah menyeluruh di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Hal ini diutarakan oleh informan Atikah selaku Koordinator UPT

Kebersihan Wilayah II. Dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut:

“ Baik mas, jadi sebelumnya itu kami terdiri atas 4 UPT. *Nah* dari UPT yang ada tersebut, masing-masing UPT sudah melayani 4 Kecamatan. Misalnya saja ya mas di UPT saya UPT II itu mencakup Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur mas” (Wawancara, Atikah, UPT Kebersihan Wilayah II, 18 Mei 2020).

Selain itu, persiapan lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program Silampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Semarang. Pada lingkup kota, kegiatan sosialisasi diatur dan *dihandle* langsung oleh petugas pengelola di *Commad Center*. Sosialisasi pertama dilakukan pada bulan Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam kegiatan itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup mengundang banyak perwakilan-perwakilan dari masyarakat umum, perwakilan dari Kepala Desa, serta perwakilan dari Bapak Camat di Kota Semarang. Jumlah yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak 60 orang. Inti materi yang disampaikan adalah masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara intensif, berpartisipasi secara efektif untuk turut menyebarluaskan program Silampah ini ke masyarakat yang lain. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berikut ini:

“...Jadi sebelum acara peluncuran Silampah ini mas, kami sebelumnya melaksanakan kegiatan sosialisasi di DLH kami mengundang ya sekitar 60 orang untuk turut hadir, ya tujuannya itu tidak lain agar masyarakat tahu tentang Silampah ini dan langsung bisa digunakan apabila mereka terkendala dalam masalah pelaporan sampah...” (Wawancara, Bapak Drs. Spto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 18 Mei 2020).

Tidak hanya sosialisasi dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang saja melainkan melalui media sosial. Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi peneliti, didapatkan informasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup secara dari masa peluncuran program sampai dengan saat ini, secara terus-menerus menginformasikan dan memberitahukan tentang program Silampah di media sosial. Melalui akun resmi *instagram*, *twitter* dan *facebooknya*, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan gencar terus berupaya mensosialisasikan Silampah kepada semua masyarakat. Dalam hal ini lebih tepatnya adalah promosi program unggulan melalui media sosial. Promosi juga dilakukan melalui Koran, acara pameran di Hotel, serta dari mulut ke mulut sehingga diharapkan dengan strategi tersebut masyarakat Kota Semarang banyak yang mengetahui program Silampah. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. Spto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Kota Semarang berikut:

“...Kami terus lakukan sosialisasi dan promosi baik di *instagram* dan *twitter* mas karena kita tahu ya jaman sekarang semua serba *online* dan *online*. Jadi kami sangat berharap dari media sosial itu masyarakat banyak yang tahu...” (Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 18 Mei 2020).

Pendapat informan satu di atas, dijelaskan kembali oleh Al-Ghazali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I di bawah ini:

“...“Strategi DLH pertama kita melakukan sosialisasi melalui media sosial terus *e* biasanya juga ada sosialisasi di Balai Kota Semarang, terus misalkan ada tamu juga kita sosialisasikan *e* tentang *e* inovasi yang dipunyai DLH itu apa strateginya ya itu”(Wawancara, Al-Ghazali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 18 Mei 2020).

Pendapat informan kedua, juga ditegaskan kembali oleh Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II yang mnejelaskan bahwa:

“...*gimana sih* caranya mengenalkan dan mensosialisasikan program Silampah ini ke banyak orang mas, ya paling sering kami gunakan ya melalui sosialisasi lewat akun-akun resmi media kami seperti *ig* dan *twitter* karena itu lebih berhasil ya dan mengena di hati orang banyak, namanya media sosial sekarang *kan* ya dampaknya luar dan *gede banget*, terus kita juga ada *nih* biasanya sosialisasi di Balai Kota yang tadi mas Al sebutkan, dan terakhir misal ada orang atau masyarakat datang ke kami, kami juga siap perkenalkan mas”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 18 Mei 2020).



**Gambar 4.8 Sosialisasi Program Silampah Melalui Media Sosial**

Sumber: *Instagram* Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang seringkali dilakukan melalui media sosial yang dimiliki mereka. Pemilihan menggunakan media tersebut karena dinilai sangat efektif untuk mengenalkan program Silampah kepada semua masyarakat. Kelebihannya adalah bersifat praktis, cepat, dan dapat menjangkau banyak masyarakat. Selain sosialisasi pada lingkup kota yang dalam hal ini dipegang langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup, ternyata UPT Kebersihan Wilayah juga turut serta melaksanakan sosialisasi guna membantu kesuksesan pelaksanaan program Silampah. Salah satunya yang dilakukan oleh UPT Kebersihan Wilayah III yang dikoordinir oleh Bapak Nur Aziz. Kegiatan sosialisasi tersebut mencakup Kecamatan Tembalang, Gunungpati,

Banyumanik, dan Candisari. Sosialisasi dilakukan di Kantor UPT III yang beralamatkan di Jalan Telomoyo Nomor 03. Prosedur atau mekanisme sosialisasi yang dilakukan UPT Kebersihan Wilayah III yaitu dengan melalui pemberian surat kepada perwakilan Kepala Desa dan Camat di UPT Kebersihan Wilayah III. Susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan informasi-informasi dari Koordinator UPT di wilayah III tentang program Silampah dan acara terakhir adalah penutup. Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk berperan aktif melaporkan permasalahan sampah melalui Silampah. Hal. tersebut diakui oleh Bapak Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III sebagai berikut:

“...*Kalo* di UPT kami UPT III itu pernah mengadakan sosialisasi mas, dulu sosialisasi kami adakan di Kantor UPT III di Telomoyo...” (Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 19 Mei 2020).

Lebih lanjut Bapak Nur Aziz dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa UPT Kebersihan Wilayah yang lain pada saat itu belum melakukan sosialisasi pada lingkungan kelurahan sehingga sosialisasi pada tahap menginformasikan kepada masyarakat dinilai kurang maksimal. Selain sosialisasi belum dapat dilakukan secara langsung dan maksimal juga terkait dengan kendala jumlah Sumber

Daya Manusia yang terbatas. Sosialisasi yang terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan UPT Kebersihan Wilayah menghasilkan suatu hasil. Penekanan hasil yang menjadi prioritas diantaranya adalah perwakilan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan dapat meneruskan dan menyebarluaskan program Silampah ini kepada masyarakat di lingkungan masing-masing sehingga masyarakat diharapkan banyak yang mengetahui program Silampah.

Persiapan-persiapan yang sudah direncanakan dan disahkan dalam peluncuran program Silampah tersebut, maka selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan baik pelaksanaan di *Commad Center* Silampah, maupun pelaksanaan di lapangan oleh UPT Wilayah Kebersihan I, II, III, dan IV. Sasaran pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) utamanya adalah masyarakat Kota Semarang dari berbagai kalangan yang difokuskan pada pelaporan permasalahan sampah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Isi dari Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang diketahui membuang sampah sembarangan akan dikenai denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan tiga bulan penjara. Hal tersebut dijelaskan oleh informan pertama yaitu Bapak

Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berikut:

“...*Betul* sekali mas, sebenarnya pelaksanaan program ini kami seimbangkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 6 Tahun 2012...” (Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020).



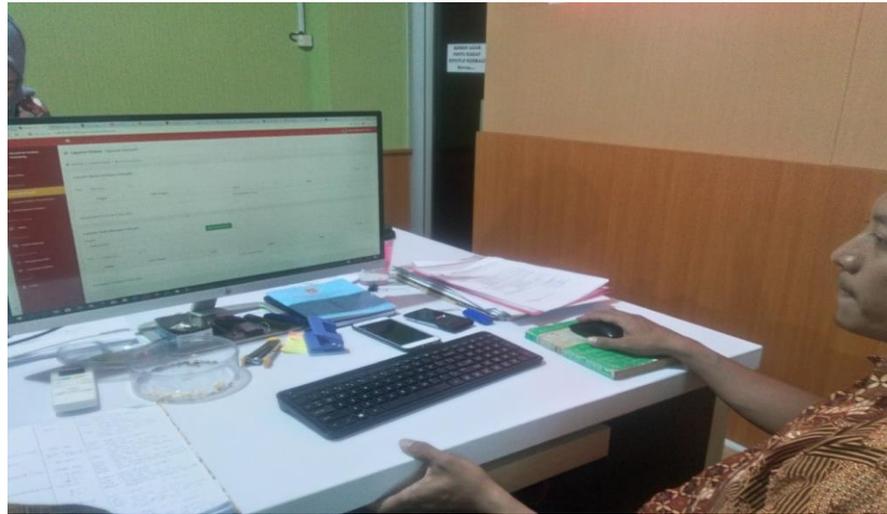
**Gambar 4.9 Permasalahan Sampah di Kota Semarang**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Pelaksanaan program Silampah ini merupakan solusi efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Semarang. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan sampah di Kota Semarang menjadi masalah yang kompleks untuk segera ditangani secara bersama-sama. Produksi sampah setiap harinya di Kota Semarang yang semakin

meningkat menjadikan perlu dilakukan sebuah inovasi solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan Siampah, masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengaduan pada sistem tersebut jika terdapat buangan sampah liar atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Semarang yang sudah melebihi kapasitas. Program Silampah ini bersifat terbuka artinya masyarakat Kota Semarang bebas mengakses dimana dan kapan saja. Dalam Silampah ini, terdapat dua macam pelayanan yaitu pertama, untuk petugas atau UPT di lapangan dan kedua, untuk petugas di *Command Center* Silampah. Hal ini ditegaskan oleh informan keenam yaitu Bapak Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III di bawah ini:

“...Iya mas, dari Silampah ini kami sangat berharap peran aktif masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap masalah sampah...” (Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 19 Mei 2020).



**Gambar 4.10** Petugas di *Commad Center* sedang melakukan pengecekan laporan dari masyarakat

Sumber: Dokumentasi penelitian 2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program Silampah dimulai ketika terdapat pengaduan atau pelapor dari masyarakat Kota Semarang yang masuk dalam sistem Silampah. Selanjutnya, terdapat notifikasi atau instruksi dari *admin* pusat yang akan ditindaklanjuti dan diperiksa lebih lanjut oleh petugas di lapangan (UPT Kebersihan wilayah I, II, III, dan IV) terhadap wilayah yang dituju. Jika laporan masyarakat tersebut merupakan wilayah wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka selanjutnya petugas *Commad Center* langsung menerjunkan tim untuk penanganan lebih lanjut di lokasi terkait. Masyarakat dalam melaporkan pengaduan sampah itu, sebelumnya mengirimkan foto langsung di lokasi. Apabila pengaduan sampah

tersebut sudah ditangani dengan baik, maka petugas lapangan dalam hal ini UPT I,II,III, dan IV merespon bahwa pengaduan masyarakat yang dilaporkan sudah dikerjakan atau ditangani. Hal tersebut disampaikan oleh informan pertama yaitu Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Kota Semarang berikut:

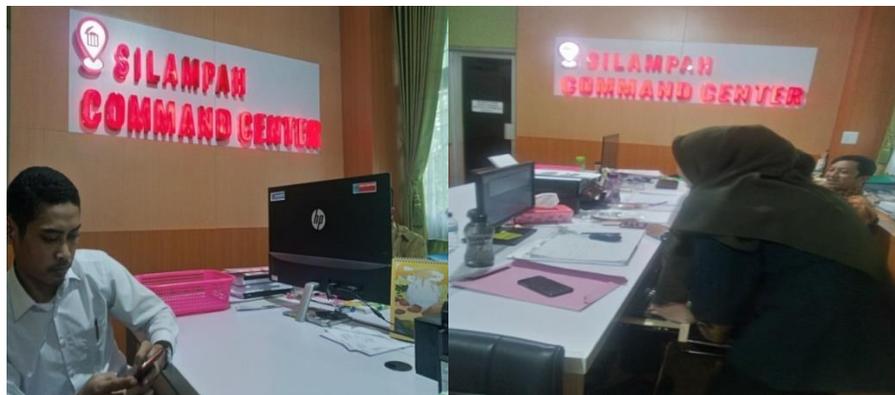
“...Alur sederhananya jadi *kan gini* mas, dimulai dari aduan atau laporan masyarakat yang masuk ke Silampah ini, setelah laporan masuk itu petugas kami mengecek, dari laporan yang masuk itu *kan* ada kriteria-kriteria apakah ini masuk wilayah kita atau *gak, missal oh* masuk langsung dari petugas UPT di Lab. Meneruskan ke UPT Kebersihan Wilayah, dari UPT Wilayah itu siapkan tim untuk langsung terjun ke lapangan cek ke lokasi...” (Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 19 Mei 2020).

Pendapat informan pertama, juga diulas kembali oleh informan kedua yaitu Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I yaitu:

“Akan saya jawab bismillahirrohmannirrohim, ya pelaksanaan kebijakan Silampah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang itu berdasarkan *e* kita tetap *admin* menerima laporan dan dilanjutkan ke Kepala Dinas. Misalkan nanti *e* membutuhkan suatu kebijakan yang kita harus *admin* bukan ranahnya, *admin* tetap naik ke atasan dulu. *Tapi* andaikan ada laporan yang kita bisa tangani kita langsung korelasikan ke UPT terkait di wilayahnya sesuai laporan itu” (Wawancara, Al-Ghazali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 19 Mei 2020).

Dari pendapat informan satu dan dua dia atas, diperkuat oleh informan tiga yaitu Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II berikut ini:

“*Kalo pelaksanaan kebijakan Silampah ini kan emang kita buat untuk mengatasi masalah sampah di Semarang mas, ya kalo sisi pelaksanaannya dari admin kita dulu terus naik ke atas laporan sama Kepala Dinas, setelah itu langsung kita komunikasikan ke UPT-UPT terkait mas, iya selain kami bertiga di sini yang ibaratnya handle ya juga pelaksanaannya yang UPT-UPT itu di lapangannya gitu*”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 19 Februari 2020).



**Gambar 4.11 Pelaksanan Koordinasi dari UPT Laboratorium kepada UPT Kebersihan Wilayah**

**Sumber: Dokumentasi Pribadi**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas, sebenarnya alur pelaksanaan program Silampah dimulai di *Command Center* Silampah. Dari gambar tersebut diketahui jumlah petugas UPT Laboratorium sebagai tim pelaksana sebanyak 3 orang dengan fasilitas pendukung seperti komputer yang tersedia sebanyak 3 buah. Terlihat pada gambar bahwa Bapak Al-Ghazali dan Ibu Kiki Rahma Kusuma

(sebelah kanan peneliti) melakukan pengecekan laporan yang masuk dalam Silampah. Pengecekan dilakukan secara detail dan menyeluruh agar masyarakat dilayani dengan puas dan maksimal. Hasil dari pengecekan selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas di UPT Kebersihan baik I, II, III, dan , IV untuk dikaji dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Setiap harinya, jumlah laporan yang masuk ke dalam Silampah tergolong masih rendah hanya sekitar 2 hingga 3 orang. Jumlah ini lebih sedikit daripada hari-hari sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengetahui keberadaan Silampah. Selanjutnya terlihat pada gambar bahwa salah satu petugas *Commad Center* (sebelah kiri peneliti) melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak UPT Kebersihan Wilayah. Koordinasi dilakukan dengan cepat. Koordinasi yang baik antara petugas di *Laboratorium Commad Center* dengan UPT I, II, III, dan IV melalui grup *WhatsApp*, baik pada *grup* satu UPT maupun grup *admin* Silampah dengan petugas UPT I, II, III, dan IV. Hubungan koordinasi dilakukan dengan semangat *time work* yang kuat.

Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III sebagai berikut:

“...Iya mas, kami ada dua *grup* yang setiap harinya melayani aduan dari masyarakat. Bukan hanya *grup WA* aja ya, tapi juga semua lini mas ada yang dari Silampah, *Facebook*, dan media

sosial...” (Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 19 Mei 2020).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup melayani kurang lebih 200 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan berbagai aduan yang tersebar di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Mekanisme akhir dari pengangkutan sampah tersebut berakhir di TPA Jatibarang. Peran dan partisipasi dari masyarakat Kota Semarang masih tergolong rendah dalam pengaduan di Silampah. Dinas Lingkungan Hidup membuka pelayanan di berbagai akses seperti telepon, WhatApps, Twitter, serta *instgaram*, akan tetapi kebanyakan aduan masyarakat di *instgaram*. Hal tersebut diakui oleh Bapak Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III dalam wawancaranya di bawah ini:

“...Sosialisasi kami lakukan disemua layanan mas ada yang melalui Telepon, WA, *Twitter* dan *Ig*. Tapi, Kebanyakan itu di *Ig*...(Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 19 Mei 2020).

Pelaksanaan Silampah tidak hanya dilakukan di *Commad Center* Silampah saja, melainkan juga dilaksanakan di lapangan. Dalam hal ini adalah lokasi atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebagai tindak lanjut masyarakat yang melapor. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim lapangan (UPT Wilayah Kebersihan I,II,III, dan IV) yang dinamakan “Pasukan Merah”.

Pasukan Merah adalah petugas lapangan yang bertugas melakukan pengecekan dan pengangkutan terhadap Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang sudah melebihi kapasitas dan segera diangkut. Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dalam pelaksanaan Silampah dilakukan oleh pasukan merah di berbagai lokasi atau tempat seperti Kelurahan-Kelurahan, Kecamatan-Kecamatan, Jalan Protokol Kota di Kota Semarang yang memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara). Praktik dari pelaksanaan di lapangan dijelaskan sebagai berikut:

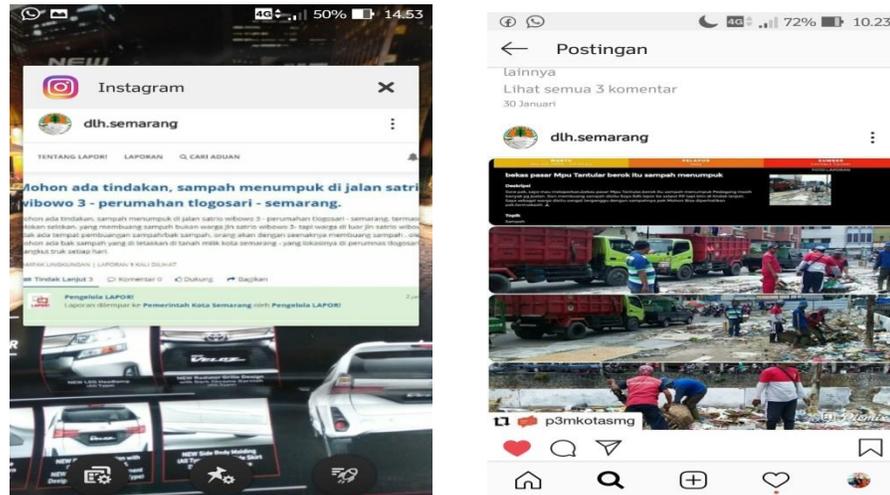


**Gambar 4.12 Pelaksanaan Program Silampah di Jalan Noroyono, Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2020

Berdasarkan gambar di atas, contoh pelaksanaan Silampah di lapangan dilakukan oleh pasukan merah di TPS Jalan Noroyono, Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Masyarakat yang melakukan pelaporan atas nama Budi Wicahyo yang tidak lain merupakan masyarakat di lingkungan tersebut. Pengangkutan sampah di lokasi tersebut dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020 oleh pasukan merah yang sebelumnya pada 25 Januari 2020 telah dilakukan pembersihan lokasi. Jumlah pasukan merah yang terjun ke lokasi sebanyak kurang dari 20 orang. Dengan dibantu warga sekitar, pembersihan dan pengangkutan sampah dilakukan secara bersama-sama. Sampah yang telah diangkut tersebut untuk selanjutnya dibawa ke TPA Jatibarang. Pendapar tersebut diperkuat dengan Reza Bahrudin Arrasyid selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah IV. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“...*Betul* sekali mas, mekanisme akhir setelah kita lakukan pembersihan dan pengangkutan sampah itu ya muaranya di TPA Jatibarang...(Wawancara, Reza Bahrudin Arrasyid, UPT Kebersihan Wilayah IV, 19 Mei 2020).



**Gambar 4.13 Pelaksanaan Silampah di Jalan Satria Wibowo 3, Perumahan Tlogosari, Semarang, dan Bekas Pasar Mpu Tantular Berok**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2020

Pembersihan dan pengangkutan sampah juga dilakukan di Jalan Satria Wibowo 3, Perumahan Tlogosari, Semarang dan di Bekas Pasar Mpu Tantular Berok. Dari gambar tersebut, pengaduan dilakukan oleh Supuro pada 23 Januari 2020 pukul 09.39 WIB. Dalam laporannya pelapor mengatakan *“Sore pak, saya mau melaporkan bekas Pasar Mpu Tantular Berok itu, sampah menumpuk, pedagang masih banyak yang jualan. Dan yang membuang sampah di situ saya sudah melapor ke Satpol PP tapi belum ditindaklanjuti. Saya sebagai warga di situ sangat terganggu dengan sampahnya pak, mohon untuk bisa diperhatikan pak terimakasih”*. Pengangkutan juga dilakukan oleh Pasukan Merah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di

Bekas Pasar Mpu Tantular Berok. Lebih lanjut, dalam pengangkutan tersebut, petugas UPT Kebersihan Wilayah mengajak kepada masyarakat khususnya pemangku wilayah sekitar untuk memantau dan menjaga wilayahnya untuk ikut peduli terhadap kebersihan, terutama perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada malam hari. Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi peneliti, ternyata petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini adalah UPT Kebersihan Wilayah, melakukan pembersihan sampah sebelum dan sesudah acara Tahun Baru 2020 di beberapa lokasi yang berbeda yaitu di Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Jalan Tri Lomba Juang Mugassari, Jalan Menteri Supeno, serta Simpang Lima. Kegiatan pengangkutan tersebut dilakukan pada 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020. Tim pelaksana terdiri atas petugas laki-laki dan perempuan yang kurang lebih 40 orang dengan jumlah amroll dan dump yang dikerahkan sebanyak 6 amroll dan 3 dump. Kegiatan pembersihan dan pengangkutan sebelum dan sesudah Tahun Baru 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



### Gambar 4.14 Pembersihan dan Pengangkutan oleh Pasukan Merah pada Acara Tahun Baru 2020

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pemerintah Kota Semarang memberikan apresiasi dan dukungan agar lebih luas lagi mensosialisasikan program Silampah di berbagai kalangan masyarakat di Kota Semarang. Dukungan yang

diberikan berupa forum kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk bersama mensosialisasikan Silampah dengan prioritas melalui media sosial. Pendapat tersebut disampaikan oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berikut:

“...kami memiliki sinergitas dengan Pemkot mas untuk bekerjasama mensosialisasikan dan menyiarkan program ini kepada semua orang...(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 20 Mei 2020).

Pendapat informan pertama, dijelaskan kembali oleh Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II berikut:

“...Kami sangat senang karena Pemerintah Kota pun sangat mengapresiasi daripada apa yang kami rancang dan kami lakukan ini. Ini adalah salah satu jalan ya bisa membuat kota ini jauh lebih bebas dari sampah. Kemudian pihak mereka juga sangat antusias melakukan kerjasama dengan kami. Ya jelas kami sangat terbuka sekali mas ya iya begitu. *Seneng pokoknya...*”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 20 Mei 2020).

Selanjutnya informan kedua yaitu Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I mempertegas dengan mengatakan:

“Jujur kami sangat bangga, senang, dan bersyukur bisa meluncurkan aplikasi ini mas. Pemerintah Kota Semarang betul-betul sangat terbuka dengan kami sangat mengapresiasi aplikasi Silampah ini. Ya pihak mereka sepertinya sangat senang ibaratnya ada solusi untuk sampah dengan basisnya

teknologi Silampah ini. Pokoknya kami senang dan semoga ke depan bisa bermanfaat baik untuk masyarakat kami...(Wawancara, Al-Ghozali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 20 Mei 2020).

Respon positif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang cukup baik terkait dengan program Silampah. Menurut pihak Pemerintah Kota Semarang ini adalah program unggulan yang harus dijaga bersama-sama, dijalankan dengan baik dan bijak serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah Kota Semarang juga sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang senantiasa berinovasi menciptakan sebuah alternatif solusi yang baik dalam hal menanggulangi problematika sampah di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang berharap penuh dan siap bekerjasama mensukseskan pelaksanaan program Silampah yang utamanya turut serta membantu mensosialisasikan melalui media sosialnya yang bekerjasama dengan program Lapor Hendi.

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 ini belum ada model terbaru yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan program Silampah. Modelnya tetap sama yaitu berbasiskan kepada partisipasi masyarakat melalui aplikasi Silampah secara *online*. Pendapat tersebut disampaikan oleh Drs.

Sapto Adi Sugihartono, MM Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang berikut:

“...*Gak* ada mas, prinsip kami sama tetap mengedepankan partisipasi masyarakat dan selalu lewat *online* dan *online* tidak ada yang lain karena apa? Modelnya tetap kami sesuaikan dengan perkembangan jaman saat ini *lah*, tidak ada yang membedekan dari tahun ini ke tahun selanjutnya, yang beda nanti dalam pelaksanaannya apakah meningkat atau menurun, begitu”(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 20 Mei 2020).

Informan kedua yaitu Al-Ghozali juga menegaskan pendapatnya kembali dengan mengatakan bahwa:

“...Untuk model itu tidak ada ya. Pusat kami ya itu *by online* agar masyarakat tetap mudah menggunakannya tidak ada kesulitan atau hal yang menghambat...”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 20 Mei 2020)

Kemudian didukung oleh pendapat informan ketiga yang mengatakan bahwa:

“Modelnya model kebijakan yang dikelola DLH yaitu acara sosialisasi kegiatan kita masukkan, kemudian di CFD kita juga ada terus *pas* kunjungan luar kota dinas lain atau instansi lain ya kita perkenalkan seperti itu termasuk juga ada mahasiswa kita juga perkenalkan kita sosialisasikan *e* tentang inovasi pelayanan yang kami punya”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 20 Mei 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketujuh informan, pelaksanaan program Silampah ini sudah berjalan secara sistematis, Dinas lingkungan hidup terus

melakukan pengembangan terhadap Silampah agar memenuhi kebutuhan publik serta dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Sampai dengan saat ini, pengguna silampah berkisar 90 *user* lebih berdasarkan laporan yang telah tertangani. Karena informasi pada *playstore* tidak secara mendetail. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media diantaranya, *instagram*, *twitter*, *facebook*, maupun kegiatan sosialisasi dinas. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan permasalahan sampah dan mengurangi timbulan sampah terutama di Kota Semarang.

Sejak 11 februari 2019 silampah turun dari *playstore* terkait persoalan kebijakan privasi mengenai akses otomatis saat memasukkan kode verifikasi ke nomor *handphone* pelapor. Dikarenakan Silampah masih dalam tahapan pengembangan. Namun persoalan ini segera ditangani oleh tim IT. Baru tanggal 17 April 2019 Silampah bertengger kembali di *playstore* sehingga dalam kurun waktu tersebut antara Februari hingga Maret 2019 sedikit menghambat pelaksanaan pada publik dalam penggunaan aplikasi Silampah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program Silampah ini lebih ke arah berdampak luas ke masyarakat. Di sini masyarakat Kota Semarang

diuntungkan, kemudahan, praktis dalam penggunaan. Dampak yang dirasakan masyarakat sebelum adanya aplikasi silampah ini dalam menangani masalah sampah dilakukan secara manual dan masih banyak yang membiarkan begitu saja. Sedangkan dampak setelah masyarakat banyak yang menggunakan aplikasi Silampah ini lebih kepada membangun kesadaran dan mental yang sebelumnya acuh atau apriori terhadap permasalahan sampah.

Secara sederhana, dampak pelaksanaan program Silampah yaitu berangkat dari lingkungan tempat tinggal masing-masing dalam melaporkan mengenai pengangkutan sampah melalui Silampah sehingga dari hal itu lingkungan mereka jauh lebih bersih dan rapi, masyarakat tidak perlu bingung-bingung bagaimana mengelola dan membuang sampah yang jauh dari tempat pembuangan akhir. Dampak lainnya, yaitu semua kemudahan dapat dirasakan langsung mulai dari kemudahan penggunaan, meminimalisir terjadinya tumpukan sampah di pembuangan liar, serta masyarakat menjadi lebih terbantu. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tatanan kota semarang ini bersih dan bebas dari sampah dengan aplikasi silampah. Hal tersebut diakui oleh Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I sebagai berikut:

‘Tentu kami semua di sini luncurkan program Silampah ini pasti *punya* dampak baik untuk masyarakat, karena *emang* mas dari awal dampaknya ya buat membantu orang banyak dalam menangani sampah ya. Terus dampak yang kedua selain bisa bantu mereka lapor sampah di lapangan juga lebih mengurangi pembuangan sampah yang belum diangkut, saya katakan demikian karena misal satu orang atau banyak orang yang *gunain* Silampah ya, mereka sudah sangat berpartisipasi dan bisa kerjasama dengan kami untuk menanggulangi sampah ini, terus yang ketiga ada dampak luasnya target kami Kota Semarang bersih dari sampah...’(Wawancara, Al-Ghazali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 21 Mei 2020).

Dari hasil wawancara tersebut selaras dengan hasil wawancara Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dijelaskan bahwa dampak dari pelaksanaan silampah ini yaitu berdampak luas kepada masyarakat.

“...Mas pokoknya dampaknya itu pasti ke masyarakat kita juga yang utama yang *gunain* aplikasi Silampah dari kami itu. Kalo dampak negatifnya saya kira *engga* ada ya mas, ada *cuma* ya tidak begitu banyak, kebanyakan pasti dampaknya positif, soalnya dari awal niat kita *kan* untuk bantu masyarakat, ya bantunya *gimana* caranya masyarakat itu sadar akan kedisiplinan membuang sampah di tempatnya, misal mereka di jalan atau dimana *liat* sampah berserakan bisa langsung hubungi Silampah, dampak yang lain lebih menyadarkan masyarakat aja *sih* mas. Jadi gitu...’(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 21 Mei, 2020).

Pendapat informan pertama dan kedua dipertegas lagi oleh informan ketiga yang menjelaskan bahwa:

“*Kalo* ditanya soal dampak ya jelas ada *to* mas. Kalo dari saya *sih* lebih ke mentalnya masyarakat itu *gimana* mereka sadar dan peka ada sampah bisa lapor ke Silampah, nanti petugas kami pasti langsung ke lapangan, *simple banget*, kemudian

praktis dan mudah dalam penggunaan Silampah ini ya. *Nah*, bisa dikatakan berangkat atau kita mulai dari lingkungan mereka katakan dari rumah mereka bisa menjadikan lingkungan bersih bebas sampah, itu menurut saya sudah berdampak banget ya walaupun masih lingkup kecil *tapi* sudah baik, mungkin bisa kedepannya ke lingkup yang lebih luas. Masyarakat *enggga usah* bingung-bingung lah mas ini ada sampah harus *dikemanain* misal di situ *gak* ada tempat pembuangannya, lapor saja ke Silampah, *simple*, mudah, dan hasil memuaskan...”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 21 Mei 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi,

terdapat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki program Silampah diantaranya adalah *pertama* dari segi kelebihan yaitu program Silampah sebenarnya bagus dan efektif untuk menyadarkan banyak masyarakat agar lebih sadar akan permasalahan dalam penanganan sampah. Masyarakat memahami masalah sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing belum ada yang menangani. Kelebihan yang lain untuk para petugas di Commad Center maupun di lapangan adalah cepat, mudah penggunaan dan tanpa dipungut biaya. *Kedua*, dari segi kekurangannya difokuskan lebih pada kekurangan yang bersifat teknis. Misalnya terdapat laporan di jalan protokol samping jalan besar terdapat bekas babatan pohon. Dari masalah itu sebenarnya bukan ranah Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani secara langsung melainkan tanggungjawab instansi terkait yang merupakan wewenang pihak PLN, Telkom terkait dengan perawatan, masyarakat sendiri kebanyakan lebih memilih program Lapor Hendi

karena dinilai merupakan program yang efektif dan efisien. Padahal Silampah juga terus-menerus disosialisasikan melalui media sosial. Sebenarnya fungsinya hampir sama, mereka mencari lebih praktis untuk pelaporan. Walaupun di silampah sudah sangat praktis. Kekurangan lainnya yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mengingat banyak dari masyarakat Kota Semarang yang sudah berusia lanjut kebanyakan dari mereka kurang membuka media sosial, media massa, serta akses lainnya sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi program Silampah tersebut.

Hal di atas, dijelaskan oleh Nur Aziz selaku Koordinator UPT Wilayah Kebersihan III sebagai berikut:

“...Kurang membuka media massa yang seperti itu. Kita sudah mempromosikan lewat sosialisasi sosial media tapi ada yang membutuhkan itu ada yang belum membutuhkan. Pihak Silampah meminta mempromosikan lewat tetangga sekitar...”  
(Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 21 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kelemahan dari Silampah antara lain sinyal eror, aplikasi ini kurang *familiar* di lingkungan masyarakat. Selain terdapat kelebihan dan kelemahan, ternyata terjadi di kendala selama proses pelaksanaan di lapangan. Kendala yang sering terjadi dan dinilai sudah menjadi kebiasaan pada proses pengangkutan adalah kendala teknis pada kendaraan. Sering terjadi

ban bocor yang lebih dari satu kali, *trouble* di lapangan. Kendala yang lain yaitu titik lokasi yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh armada dan kendala teknis di server *Commad Center*. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu:

“...*kalo* kendala pasti banyak diantaranya yaitu *e* misalkan *e* karena sistem *kan* kadang berjalan *gak* terdeteksi *gitu kan* misalkan ada laporan di titik A kadang *kalo* GPS mendeteksi *kan gak* di titiknya persis *nah* itu kita sesuaikan pertama menemukan lokasinya itu, lokasi yang masih terpencil *kan agak* susah karena jangkauan kita *gak cuma* di perkotaan *aja sampe* pinggiran kota juga kita menjangkau juga itu. Kendala mungkin termasuk apa namanya area ya mungkin jangkauan armada itu kita memang bisa *kalo gak* bisa kita masih koordinasi dengan pemangku wilayah setempat itu”(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 22 Mei 2020).

Selanjutnya, ditegaskan kembali oleh Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II sebagai berikut:

“*Kalo* kendala itu jelas ada mas, termasuk juga kendala ya di lapangan ada apa ada apa saja *kek gitu*, *kalo* biasanya itu lebih kepada kendala apa ya namanya itu ya bisa dibilang kendala teknis mas misal ya ada laporan yang masuk ke *Commad Center* tapi banyak *banget* kadang GPS nya itu *gak* akurat *kaya gak* bisa jangkau lokasi atau titik-titik *mana aja* makanya dari itu kami di sini langsung koordinasi ke lapangan benar *gak sih emang* ada sampah apa *engga*, iya *gitu* lebih ke area kadang yang *gak* bisa dijangkau oleh armada angkut kami mas”(Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 22 Mei 2020).

Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang sebenarnya sudah cukup bagus, hal tersebut dapat dilihat dari aspek persiapan-persiapan yang dilakukan mulai dari sosialisasi langsung dan sosialisasi melalui media sosial, serta tindakan nyata di lapangan. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan maksimal di seluruh 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada. Dari total jumlah Kecamatan dan Kelurahan, hanya 6 Kecamatan yang sudah diadakan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Tengah, Tembalang, Candisari, Banyumanik, dan Candisari. Hal tersebut dilansir dari hasil wawancara dengan Nur Aziz selaku Koordinator UPT Kebersihan Wilayah III yang menjelaskan:

“...Sosialisasi belum menyeluruh dan merata mas, hanya di beberapa Kecamatan *aja* seperti di Candisari, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, SOP nya kami undang beberapa perwakilan Camat...”(Wawancara, Nur Aziz, UPT Kebersihan Wilayah III, 23 Mei 2020).

Pendapat informan di atas, juga diperkuat dengan wawancara 6 orang Camat yang mengatakan:

“...Dulu sebelum ada *corona* ini iya pernah mas, dari DLH pernah melakukan sosialisasi di Kecamatan kami...”(Wawancara, Abdul Haris Nur Hidayat, S.Sos, Camat Semarang Tengah, 23 Mei 2020).

Dalam sosialisasi yang dilakukan di 6 Kecamatan tersebut, hasil pokok yang disampaikan bahwa melalui tangan Camat itu, diharapkan dapat menyalurkannya kepada seluruh Kelurahan yang menjadi wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Kebersihan Wilayah juga menekankan kepada camat-camat agar masyarakatnya dapat menggunakan aplikasi Silampah secara luas sehingga bisa mengedukasi masyarakat dalam menanggulangi masalah sampah melalui Silampah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat umum di Kota Semarang. Hasilnya adalah banyak dari masyarakat umum yang tidak sama sekali mengetahui keberadaan program Silampah ini. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui sosialisasi yang dilakukan baik di lingkungan mereka, maupun sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. Masyarakat tidak melihat secara langsung promosi-promosi sebagai bentuk sosialisasi di lapangan baik pemasangan baliho-baliho di pinggir jalan. Dalam hal ini, masyarakat juga banyak belum dilibatkan baik dari aspek diskusi publik, pemberdayaan dan lain sebagainya membuat program ini masih minim partisipasi dari masyarakatnya. Banyak masyarakat sama sekali belum sadar dan melek akan program Silampah. Pendapat

tersebut diakui oleh Ahmad Zaky Fajarian selaku perwakilan dari masyarakat Kota Semarang berikut ini:

“...*Setau* saya sejauh ini belum ada sosialisasi sih mas apa saya yang *gak tau* apa *gimana* ya, saya belum *tau* tentang Silampah ini...” (Wawancara, Ahmad Zaky Fajarian, Masyarakat Umum, 23 Mei 2020).

Dalam wawancara lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa dirinya sejauh ini belum mengetahui program Silampah, informan mengetahui program Silampah pada saat peneliti menanyakan pada saat proses wawancara. Menurutnya, di lingkungan tempat tinggal informan juga belum pernah dilakukan sosialisasi secara intensif yang melibatkan warganya baik pada tingkat RT, RW, maupun kelurahan. Informan juga menjelaskan bahwa walaupun setiap harinya membuka media sosial namun ternyata belum mengetahui keberadaan program Silampah. Di Lingkungannya banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui secara pasti terhadap program ini, jumlah pelopor yang melakukan pengaduan di Silampah juga belum ada atau tidak ada sama sekali. Harapan dari informan adalah lebih mensosialisasikan program ini lebih luas, merata, dan menyeluruh di semua Kelurahan. Lebih efektif lagi apabila sosialisasi dilakukan mulai dari tingkatan RT, RW atau kampus mengingat warga kampus merupakan generasi penerus bangsa sehingga pelaksanaannya lebih mengena.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa program Silampah dalam praktiknya ternyata belum dapat menjangkau seluruh lokasi pembuangan, baik di TPS-TPS, Kampung-Kampung, dan di jalan trotoar kota. Beberapa masyarakat yang sadar dan paham melakukan pelaporan pada Silampah tersebut, penanganan sampah belum tertangani secara baik. Alasannya adalah lokasi pelapor yang tidak dapat dijangkau oleh armada Dinas Lingkungan Hidup. Hal inilah yang membuat beberapa masyarakat pengguna Silampah kecewa karena permasalahan sampah di lingkungan mereka tidak tertangani.



**Gambar 4.15 Laporan Masyarakat yang Tidak Tertangani oleh UPT Kebersihan Wilayah**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2020



**Gambar 4.16 Laporan dari masyarakat yang belum ditangani dengan baik**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2020

Berdasarkan gambar di atas, lokasi pembuangan sampah liar beralamatkan di Perumahan UNDIP, Jalan Dewi Sartika VII No 9, Sukoredjo, Semarang, 50221. Nama pelapor yang masuk pada sistem Silampah yaitu ibu Upik Nurbaiti. Beliau merupakan salah satu masyarakat pengguna Silampah atau Dosen Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) UNNES. Hasil wawancara dengan beliau, dijelaskan bahwa laporannya hingga saat ini belum tertangani secara maksimal oleh UPT Kebersihan Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dilansir dari sistem Silampah, ibu Apik Nurbaiti melaporkan “ *Selamat siang, kami kembali melaporkan terkait sampah yang sudah kami laporkan sebelumnya. Terkendala tak ada action*

*pihak terlapor selalu hanya bilang iya. Sudah kami upayakan lapor melalui aplikasi Silampah, tapi selalu gagal upload. Rumah kami yang berada di bawah pereng, pada hari Rabu sore tanggal 9 Mei saat hujan lebat tertimpa longsor sampah dan tanah dari lereng sebelah rumah. Sampah jadi bersih di atas sementara samping talud garasi kami penuh dengan longsor sehingga gotnya tertutup sampai hampir 2 Meter tingginya dan lebih tinggi dari tembok talud yang di atasnya sudah ada tembok pagar. Sudah dibuang tebang pohon nangka dan sampah baru. Sementara gundukan longsor masih belum tertangani. Padahal got jalan air dari pereng samping sampai belakang rumah bamper pet. Kemana lagi kami harus mengadu. Mohon dibantu”.*

Berdasarkan gambar tersebut, tampak jelas buangan sampah pepohonan dan bermacam jenis sampah menimbuni salah satu perumahan warga. Dari laporan yang masuk Silampah, belum ada tindakan atau penanganan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Alasannya karena lokasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh armada angkut sehingga sangat menyulitkan untuk masuk ke lokasi tersebut. Hingga saat ini, sampah masih menumpuk di lokasi. Hanya tindakan beberapa warga sukarela bersama membersihkan sampah-sampah itu.

#### **4) Evaluasi Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Evaluasi program Silampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dilakukan setiap 3 (tiga) minggu sekali oleh UPT Kebersihan Wilayah masing-masing baik di UPT I, II, III, dan IV. Sedangkan evaluasi secara global dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Evaluasi yang dilakukan setelah terlaksananya program Silampah yaitu terkait dengan kekurangan dan kelebihan, briefing petugas, dan motivasi-motivasi. Apabila terdapat kelebihan, maka selanjutnya secara bersama-sama mencari ide gagasan bagaimana cara pelaksanaan Silampah di waktu mendatang. Apabila terjadi kekurangan di lapangan, dicarikan solusi alternatif terbaik agar pelaksanaannya lebih baik lagi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“...Evaluasi kami lakukan 3 bulan sekali mas itu untuk DLH, kemudian di UPT-UPT biasanya 3 minggu sekali...(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 23 Mei 2020).



**Gambar 4.17 Evaluasi Program Silampah Antara Pasukan Merah Dengan Bapak Kepala Dinas**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2020

Salah satu bentuk evaluasi diwujudkan dengan diberikannya *breafing* oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kepada Pasukan Merah yang bertugas di lapangan dan di *Commad Center*. Isi materi dari *breafing* tersebut antara lain pemberian semangat, motivasi-motivasi untuk selalu bekerja dengan baik, bekerja atas dasar *tim work*, melayani masyarakat selalu berupaya mengatasi permasalahan Sampah di Kota Semarang. Disampaikan juga agar ke depannya pelaksanaan terus dilakukan lebih baik. Pada kegiatan evaluasi juga diberikan ruang diskusi kepada semua peserta tujuannya

untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi bahan evaluasi ke depan diantaranya adalah meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan penanganan sampah liar, membuat pelaporan masyarakat, menurunkan angka timbulan sampah juga yang menjadikan lingkungan Kota Semarang bersih dan nyaman dari sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan sampah liar.

“Jelas ada, evaluasi ya meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan penanganan sampah liar terus *buat kek* pelaporan masyarakat terus menurunkan angka timbulan sampah juga yang menjadikan lingkungan Kota Semarang itu bersih, nyaman terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan sampah liar *jadi kalo e* sewaktu ada sampah dimana bisa langsung praktis *gitu* membuka aplikasi Silampah sendiri, iya jadi ada tiga evaluasi mas”(Wawancara Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 24 Mei 2020).

Pendapat dia atas, juga dipertegas kembali oleh pendapat informan kedua yang mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya tidak hanya Silampah *aja* ya mas yang harus kita evaluasi, karena semuanya penting, semua program yang ada di bawah naungan kami itu besar dan butuh evaluasi juga, *kalo* untuk Silampah yang sangat perlu sekali dievaluasi itu di bagian kebijakan privasinya karena kan dulu *kan* Silampah masih dalam proses pengembangan mas, terus apa lagi ya? Bagaimana cara strategi kita juga dalam pelaksanaan Silampah ini ya masyarakat juga banyak yang terlibat tidak hanya sebagai penonton *aja...*”(Wawancara, Al-Ghozali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 24 Mei 2020).

Evaluasi program Silampah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali secara global oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan evaluasi pada tingkat UPT Kebersihan Wilayah dilaksanakan setiap 3 (tiga) minggu sekali atau sifatnya lebih menyesuaikan kondisi.

### **3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Setiap pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuan atau hasil dari proses tersebut pasti terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam melaksanakan suatu kegiatan agar berhasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sama halnya dengan pelaksanaan program Silampah terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhinya. Berikut ini adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan program Silampah yaitu:

#### **a. Faktor Penghambat Internal**

Faktor penghambat internal yaitu faktor yang berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Faktor internal merupakan faktor yang menjadi faktor paling utama pelaksanaan program Silampah dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan

pertama yaitu Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup disampaikan bahwa:

“Jelas ada kendala-kendalanya mas baik teknis maupun yang lain, *kalo* kendala teknisnya itu kadang ada pelapor yang *gunain* nomor palsu jadi nanti akan sangat menyulitkan kami pada saat identifikasi laporannya, terus area sampahnya itu banyak juga yang *gak* terjangkau truk pengangkutan, sama buangan dari sampah liarnya itu di luar kewenangan kami mas, jadi ya itu *sih* kendala yang selama ini kami rasakan...”(Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 24 Mei 2020).

Pernyataan di atas juga dipertegas kembali oleh Al-Ghazali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I sebagai berikut:

“...Selama proses Silampah ini berjalan ya, mungkin kendalanya lebih ke teknis, *macem-macem lah*, yang masih *anget* itu emang di teknis, misal penggunaan nomor palsu, itu sering *banget* terjadi, efeknya ya laporannya *gak* bisa kami identifikasi lebih lanjut, sama itu mas areanya yang sulit dijangkau sama truk, itu *sih* yang menghambat *banget*, *tapi* insyaallah *tetep* berjalan ok lah...”(Wawancara, Al-Ghozali, UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, 24 Mei 2020).

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas, dapat peneliti analisa bahwa faktor penghambat internal yang menghambat pelaksanaan program Silampah dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Semarang yaitu dapat dibagi menjadi tiga faktor. *Pertama*, pada saat pelapor menggunakan nomor palsu, hal ini berakibat dapat menyulitkan petugas mengidentifikasi laporan yang masuk tersebut. *Kedua*, sering terjadi area atau tempat pembuangan

sampah liar yang tidak dapat dijangkau dan dimasuki oleh armada pengangkutan. *Ketiga*, buangan sampah liar yang di luar menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### **b. Faktor Penghambat Eksternal**

Selain faktor penghambat internal yang berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga terdapat faktor penghambat yang berasal dari luar dinas lingkungan hidup itu sendiri yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program Silampah. Faktor ini merupakan faktor penghambat yang juga dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program Silampah untuk dapat mencapai tujuan mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang. Pelaksanaan program Silampah selama proses berjalan 2 tahun tersebut terhambat dalam segi partisipasi masyarakatnya yang masih rendah, banyak dari masyarakat kota semarang belum mengetahui, menyadari, dan memahami keberadaan program silampah ini. Berdasarkan ketiga informan yang berhasil diwawancarai menjelaskan bahwa faktor penghambat terletak dan bertumpu pada masyarakatnya itu sendiri.

“Iya, mas dari awal *kan tadi* sudah saya singgung sedikit ya, *kalo* program ini bisa berjalan apabila masyarakatnya juga aktif berpartisipasi, ya maksud aktif di sini maksudnya sama-sama melalorkan jika ada pembuangan sampah liar dimana dan kapanpun itu, masih susah mas menyadarkan

masyarakatnya ini, *gimana* masyarakatnya itu bisa *pake* Silampah, *kalo* banyak yang *make* itu kami sudah *seneng banget* rasanya. Program *gak* mungkin bisa jalan *kalo* di *dalemnya* juga *gak* ada masyarakat yang ikut andil di situ mas” (Wawancara, Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 25 Mei 2020).

Selain pendapat di atas, hal tersebut juga diakui oleh Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II.

Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

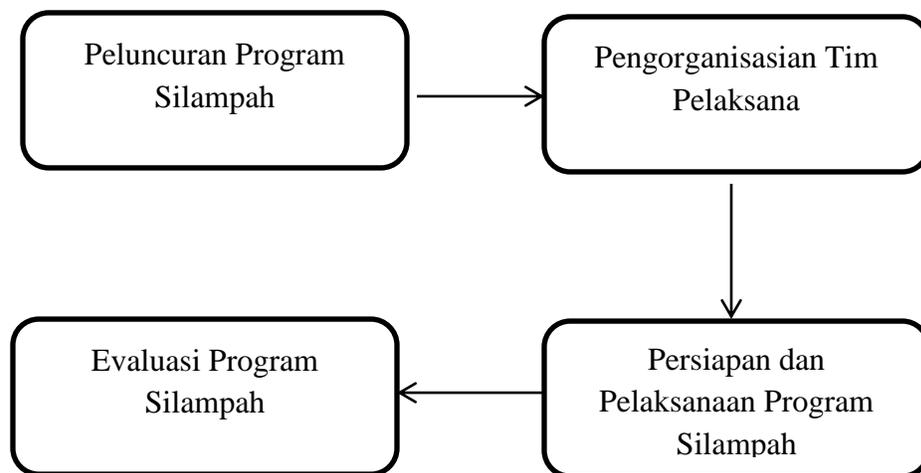
“Semuanya tergantung masyarakat kita *aja* mas, kami sudah siapkan siap jadi fasilitator misal *gak* ada masyarakat yang bantu *nglaksanain* ya juga percuma *aja* mas, masyarakat *emang* penting *banget* perannya *kalo* di sini perihal pelaksanaan Silampah ini ya, *kalo* *gak* ada satu pun orang apa masyarakat yang berpartisipasi ya sama *aja* kosong *gak* bakal jalan nantinya. *Itungannya* *aja* user Silampah dari 2018 *sampe* detik ini baru 95, di luar target, kami targetnya *kan* ya lebih dari itu, *kalo* *bener-bener* mereka sadar setiap lingkungan dimana *aja* ada sampah ya harusnya bisa *gunain* Silampah ini. Belum banyak yang *tau* soal Silampah masyarakat kita, jadi ya *agak* susah jadinya. Makanya mau *gimana* caranya kita bangun kesadaran masyarakat kita dari sini” (Wawancara, Kiki Rahma Kusuma, UPT Laboratorium Pengelola Silampah II, 25 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penghambat eksternal pelaksanaan program Silampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terutama bertumpu pada masyarakatnya itu sendiri. Semua tergantung dan kembali lagi kepada masyarakat mengimplementasikan program Silampah. Masyarakat Kota Semarang belum banyak yang mengetahui aplikasi Silampah sehingga sangat menghambat pelaksanaan program tersebut.

## B. Pembahasan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mengelola sampah tahun 2018-2019 yaitu melalui Silampah. Silampah merupakan suatu kebijakan publik dalam upaya menanggulangi masalah sampah di lingkungan Kota Semarang. Pelaksanaan Silampah dapat dibedakan menjadi *online* dan *offline*.

### 1. Alur Pelaksanaan *Offline* Silampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang



*Pertama*, aspek peluncuran atau *launching* program Silampah dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang terletak di Jalan Tapak Raya, Kecamatan Tugu, Kota Semarang 50151 Jawa Tengah pada Rabu, 17 Oktober 2018.

*Kedua*, aspek pengorganisasian tim pelaksana program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara langsung dipegang oleh

Bapak Drs. Eko Edi Suharsono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Pada wewenang Bidang Pengelolaan Sampah di bawahnya terdapat bagian-bagian khusus untuk menangani dan bertanggungjawab melaksanakan program Silampah yang terdiri atas UPT Laboratorium Pengelola Silampah I, II, dan III, UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV. UPT Laboratorium Pengelola Silampah di *Commad Center* pada saat ini diduduki oleh Bapak Al-Ghazali, Ibu Kiki Rahma Kusuma, dan Rizki Nugroho. Pengorganisasian UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV total berjumlah 250 orang yang antara UPT Kebersihan Wilayah satu dengan yang lain memiliki komposisi jumlah anggota berbeda-beda. UPT Kebersihan Wilayah I jumlah anggota tim pelaksana kurang lebih ada 68 orang dikoordinir oleh Bapak Rifky Asna terdiri atas admin atau petugas di Kantor, *driver* atau sopir angkut, dan petugas di lapangan. UPT Kebersihan Wilayah II berjumlah sebanyak 44 anggota yang dikoordinir oleh Ibu Atikah. UPT Kebersihan Wilayah III dan IV masing-masing jumlah tim pelaksana berjumlah 66 dan 72 orang yang dikoordinir langsung oleh Bapak Nur Aziz dan Bapak Reza Bahrudin Arrasyid. tugas dari UPT Laboratorium Pengelola di *Commad Center* Silampah adalah sebagai *admin* pokok untuk melakukan tugas pengecekan laporan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan tugas pokok UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV adalah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan

sampah. Apabila dari pihak *admin* atau UPT di Laboratorium mengirimkan instruksi adanya aduan permasalahan sampah, maka pihak UPT Kebersihan Wilayah terkait langsung menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan koordinasi yang matang, dan selanjutnya merespon laporan tersebut untuk segera ditangani oleh pihak UPT.

*Ketiga*, aspek persiapan dan pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari kegiatan sosialisasi dan persiapan armada pengangkutan. *Pertama*, persiapan jumlah armada yang disediakan, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan kurang lebih 101 armada yang terbagi atas UPT Kebersihan Wilayah I sebanyak 36 armada terdiri atas 32 *amroll* dan 4 *dump*, UPT Kebersihan Wilayah II dan III masing-masing sebanyak 25 armada terbagi atas 21 *amroll* dan 4 *dump* serta 22 armada terbagi menjadi 17 *amrol* dan 5 *dump* serta UPT Wilayah Kebersihan IV sebanyak 18 armada terbagi atas 14 *amrol* dan 4 *dump*. Setiap satu UPT Kebersihan Wilayah melayani masing-masing 4 (empat) Kecamatan. UPT Kebersihan Wilayah I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT Kebersihan Wilayah II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, UPT Kebersihan Wilayah III meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT Kebersihan Wilayah IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen. *Kedua*, persiapan dilakukan melalui

kegiatan sosialisasi. Pada lingkup kota, sosialisasi *dihandle* langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sosialisasi media sosial banyak dilaksanakan melalui akun resmi *instagram*, *twitter* dan *facebooknya*. Promosi juga dilakukan melalui Koran, acara pameran di Hotel, serta dari mulut ke mulut karena dinilai sangat efektif untuk mengenalkan program Silampah kepada semua masyarakat. Kelebihannya adalah bersifat praktis, cepat, dan dapat menjangkau banyak masyarakat. UPT Kebersihan Wilayah juga turut serta melaksanakan sosialisasi guna membantu mensukseskan pelaksanaan program Silampah. UPT Kebersihan Wilayah III yang dikoordinir oleh Bapak Nur Aziz melakukan sosialisasi di 4 (empat) Kecamatan, mencakup Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Banyumanik, dan Candisari. Sosialisasi dilakukan di Kantor UPT III yang beralamatkan di Jalan Telomoyo Nomor 03. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa UPT Kebersihan Wilayah lain belum melakukan sosialisasi pada lingkungan kelurahan sehingga sosialisasi dinilai kurang maksimal.

Pelaksanaan program Silampah dimulai ketika terdapat pengaduan atau pelapor dari masyarakat Kota Semarang yang masuk dalam sistem Silampah. Selanjutnya, terdapat notifikasi atau instruksi dari *admin* pusat yang akan ditindaklanjuti dan diperiksa lebih lanjut oleh petugas di lapangan (UPT Kebersihan wilayah I, II, III, dan IV) terhadap wilayah yang

dituju. Jika laporan masyarakat tersebut merupakan wilayah wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka selanjutnya petugas *Commad Center* langsung menerjunkan tim untuk penanganan lebih lanjut di lokasi terkait. Masyarakat dalam melaporkan pengaduan sampah itu, sebelumnya mengirimkan foto langsung di lokasi. Apabila pengaduan sampah tersebut sudah ditangani dengan baik, maka petugas lapangan dalam hal ini UPT I,II,III, dan IV merespon bahwa pengaduan masyarakat yang dilaporkan sudah dikerjakan atau ditangani. Koordinasi dilakukan dengan cepat. Koordinasi yang baik antara petugas di Laboratorium *Commad Center* dengan UPT I, II, III, dan IV melalui grup *WhatsApp*, baik pada grup satu UPT maupun grup *admin* Silampah dengan petugas UPT I, II, III, dan IV. Hubungan koordinasi dilakukan dengan semangat *time work* yang kuat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup melayani kurang lebih 200 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan berbagai aduan yang tersebar di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Mekanisme akhir dari pengangkutan sampah tersebut berakhir di TPA Jatibarang. Peran dan partisipasi dari masyarakat Kota Semarang masih tergolong rendah dalam pengaduan di Silampah. Dinas Lingkungan Hidup membuka pelayanan di berbagai akses seperti telepon, *WhatsApp*, *Twitter*, serta *instgaram*, akan tetapi kebanyakan aduan masyarakat di *instgaram*. Pelaksanaan Silampah juga dilakukan di lapangan. Dalam hal ini lokasi yang menjadi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dilakukan oleh tim lapangan (UPT

Wilayah Kebersihan I, II, III, dan IV) yang dinamakan “Pasukan Merah”. Pasukan Merah adalah petugas lapangan yang bertugas melakukan pengecekan dan pengangkutan terhadap Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang sudah melebihi kapasitas dan segera diangkut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Silampah dilakukan di berbagai lokasi sebagai contoh di TPS Jalan Noroyono, Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Masyarakat yang melakukan pelaporan atas nama Budi Wicahyo yang tidak lain merupakan masyarakat di lingkungan tersebut. Pengangkutan sampah di lokasi tersebut dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020 oleh pasukan merah yang sebelumnya pada 25 Januari 2020 telah dilakukan pembersihan lokasi. Jumlah pasukan merah yang terjun ke lokasi sebanyak kurang dari 20 orang. Dengan dibantu warga sekitar, pembersihan dan pengangkutan sampah dilakukan secara bersama-sama. Sampah yang telah diangkut tersebut untuk selanjutnya dibawa ke TPA Jatibarang. Pembersihan dan pengangkutan sampah juga dilakukan di Jalan Satria Wibowo 3, Perumahan Tlogosari, Semarang dan di Bekas Pasar Mpu Tantular Berok. Pengaduan dilakukan oleh Supuro pada 23 Januari 2020 pukul 09.39 WIB. Dalam pengangkutan tersebut, petugas UPT Kebersihan Wilayah mengajak kepada masyarakat khususnya pemangku wilayah sekitar untuk memantau dan menjaga wilayahnya untuk ikut peduli terhadap kebersihan, terutama perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada malam hari. Pelaksanaan juga dilakukan oleh petugas

UPT Kebersihan Wilayah, melakukan pembersihan sampah sebelum dan sesudah acara Tahun Baru 2020 di beberapa lokasi yang berbeda yaitu di Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Jalan Tri Lomba Juang Mugassari, Jalan Menteri Supeno, serta Simpang Lima. Kegiatan pengangkutan tersebut dilakukan pada 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020. Tim pelaksana terdiri atas petugas laki-laki dan perempuan yang kurang lebih 40 orang dengan jumlah amroll dan dump yang dikerahkan sebanyak 6 amroll dan 3 dump.

Pemerintah Kota Semarang memberikan apresiasi dan dukungan agar lebih luas lagi mensosialisasikan program Silampah di berbagai kalangan masyarakat di Kota Semarang. Dukungan yang diberikan berupa forum kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk bersama mensosialisasikan Silampah dengan prioritas melalui media sosial.

Tidak ada model terbaru yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan program Silampah. Modelnya tetap sama yaitu berbasiskan kepada partisipasi masyarakat melalui aplikasi Silampah secara *online*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan program Silampah ini sudah berjalan secara sistematis, Dinas lingkungan hidup terus melakukan pengembangan terhadap Silampah agar memenuhi kebutuhan publik serta dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Sampai dengan saat ini, pengguna silampah berkisar 90 *user* lebih

berdasarkan laporan yang telah tertangani. Karena informasi pada *playstore* tidak secara mendetail. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media diantaranya, *instagram, twitter, facebook*, maupun kegiatan sosialisasi dinas. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan permasalahan sampah dan mengurangi timbulan sampah terutama di Kota Semarang.

Sejak 11 februari 2019 silampah turun dari *playstore* terkait persoalan kebijakan privasi mengenai akses otomatis saat memasukkan kode verifikasi ke nomor *handphone* pelapor. Dikarenakan Silampah masih dalam tahapan pengembangan. Namun persoalan ini segera ditangani oleh tim IT. Baru tanggal 17 April 2019 Silampah bertengger kembali di *playstore* sehingga dalam kurun waktu tersebut antara Februari hingga Maret 2019 sedikit menghambat pelaksanaan pada publik dalam penggunaan aplikasi Silampah.

Dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program Silampah ini lebih ke arah berdampak luas ke masyarakat. Pengguna Silampah diuntungkan dengan kemudahan, praktis dalam penggunaan. Secara sederhana, dampak pelaksanaan program Silampah yaitu berangkat dari lingkungan tempat tinggal masing-masing dalam melaporkan mengenai pengangkutan sampah melalui Silampah sehingga dari hal itu lingkungan mereka jauh lebih bersih dan rapi.

Kelebihan dan kelemahan dari Silampah diantaranya adalah *pertama* dari segi kelebihan yaitu program Silampah sebenarnya bagus dan efektif

untuk menyadarkan banyak masyarakat agar lebih sadar akan permasalahan dalam penanganan sampah, kelebihan yang lain untuk para petugas di *Commad Center* maupun di lapangan adalah cepat, mudah penggunaan dan tanpa dipungut biaya. *Kedua*, dari segi kekurangannya difokuskan lebih pada kekurangan yang bersifat teknis. Misalnya terdapat laporan di jalan protokol samping jalan besar terdapat bekas babatan pohon, masyarakat sendiri kebanyakan lebih memilih program Lapor Hendi karena dinilai merupakan program yang efektif dan efisien, kekurangan lainnya yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mengingat banyak dari masyarakat Kota Semarang yang sudah berusia lanjut kebanyakan dari mereka kurang membuka media sosial, media massa, serta akses lainnya sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi program Silampah tersebut.

Kendala yang sering terjadi dan dinilai sudah menjadi kebiasaan pada proses pengangkutan adalah kendala teknis pada kendaraan. Sering terjadi ban bocor yang lebih dari satu kali, *trouble* di lapangan. Kendala yang lain yaitu titik lokasi yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh armada dan kendala teknis di server *Commad Center*.

Pelaksanaan sosialisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata di seluruh 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada. Dari total jumlah Kecamatan dan Kelurahan, hanya 6 Kecamatan yang sudah diadakan

kegiatan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Tengah, Tembalang, Candisari, Banyumanik, dan Candisari.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa banyak masyarakat umum di Kota Semarang yang tidak sama sekali mengetahui keberadaan program Silampah ini. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui sosialisasi yang dilakukan baik di lingkungan mereka, maupun sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. Masyarakat tidak melihat secara langsung promosi-promosi sebagai bentuk sosialisasi di lapangan baik pemasangan baliho-baliho di pinggir jalan. Dalam hal ini, masyarakat juga banyak belum dilibatkan baik dari aspek diskusi publik, pemberdayaan dan lain sebagainya membuat program ini masih minim partisipasi dari masyarakatnya. Banyak masyarakat sama sekali belum sadar dan melek akan program Silampah. Banyak informan mengetahui program Silampah pada saat peneliti menanyakan pada saat proses wawancara. Menurutnya, di lingkungan tempat tinggal informan juga belum pernah dilakukan sosialisasi secara intensif yang melibatkan warganya baik pada tingkat RT, RW, maupun kelurahan. Informan juga menjelaskan bahwa walaupun setiap harinya membuka media sosial namun ternyata belum mengetahui keberadaan program Silampah. Di Lingkungannya banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui secara pasti terhadap program ini, jumlah pelopor yang melakukan pengaduan di Silampah juga belum ada atau tidak

ada sama sekali. Harapan dari informan adalah lebih mensosialisasikan program ini lebih luas, merata, dan menyeluruh di semua Kelurahan. Lebih efektif lagi apabila sosialisasi dilakukan mulai dari tingkatan RT, RW atau kampus mengingat warga kampus merupakan generasi penerus bangsa sehingga pelaksanaannya lebih mengena.

Dalam praktiknya ternyata belum dapat menjangkau seluruh lokasi pembuangan, baik di TPS-TPS, Kampung-Kampung. Beberapa masyarakat yang sadar dan paham melakukan pelaporan pada Silampah tersebut, penanganan sampah belum tertangani secara baik. Alasannya adalah lokasi pelopor yang tidak dapat dijangkau oleh armada Dinas Lingkungan Hidup. Hal inilah yang membuat beberapa masyarakat pengguna Silampah kecewa karena permasalahan sampah di lingkungan mereka tidak tertangani. Hal tersebut seperti di lokasi Perumahan UNDIP, Jalan Dewi Sartika VII No 9, Sukoredjo, Semarang, 50221. Nama pelapor yang masuk pada sistem Silampah yaitu ibu Upik Nurbaiti. Beliau merupakan salah satu masyarakat pengguna Silampah atau Dosen Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) UNNES. Hasil wawancara dengan beliau, dijelaskan bahwa laporannya hingga saat ini belum tertangani secara maksimal oleh UPT Kebersihan Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

*Keempat*, aspek evaluasi program dilaksanakan setiap 3 (tiga) minggu sekali oleh UPT Kebersihan Wilayah masing-masing baik di UPT I, II, III, dan IV. Sedangkan evaluasi secara global dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Evaluasi yang dilakukan setelah terlaksananya program Silampah yaitu terkait dengan kekurangan dan kelebihan, briefing petugas, dan motivasi-motivasi. Apabila terdapat kelebihan, maka selanjutnya secara bersama-sama mencari ide gagasan bagaimana cara pelaksanaan Silampah di waktu mendatang. Apabila terjadi kekurangan di lapangan, dicarikan solusi alternatif terbaik agar pelaksanaannya lebih baik lagi. Isi materi dari *breafing* tersebut antara lain pemberian semangat, motivasi-motivasi untuk selalu bekerja dengan baik, bekerja atas dasar *tim work*, melayani masyarakat selalu berupaya mengatasi permasalahan Sampah di Kota Semarang. Pada kegiatan evaluasi juga diberikan ruang diskusi kepada semua peserta tujuannya untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi bahan evaluasi ke depan diantaranya adalah meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan penanganan sampah liar, membuat pelaporan masyarakat, menurunkan angka timbulan sampah juga yang menjadikan lingkungan Kota Semarang bersih dan nyaman dari sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporakan sampah liar.

## 2. **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Silampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam pelaksanaan program Silampah yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

### a. **Faktor Penghambat Internal**

Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan program Silampah dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Semarang yaitu dapat dibagi menjadi tiga faktor. *Pertama*, pada saat pelapor menggunakan nomor palsu, hal ini berakibat dapat menyulitkan petugas mengidentifikasi laporan yang masuk tersebut. *Kedua*, sering terjadi area atau tempat pembuangan sampah liar yang tidak dapat dijangkau dan dimasuki oleh armada pengangkutan. *Ketiga*, buangan sampah liar yang di luar menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

### b. **Faktor Penghambat Eksternal**

Pelaksanaan program Silampah selama proses berjalan 2 tahun terhambat dalam segi partisipasi masyarakatnya yang masih rendah, banyak dari masyarakat Kota Semarang belum mengetahui, menyadari, dan memahami keberadaan program silampah ini. Dalam faktor penghambat eksternal, terutama bertumpu pada masyarakatnya

itu sendiri. Semua tergantung dan kembali lagi kepada masyarakat mengimplementasikan program Silampah.

Pelaksanaan program Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak berjalan maksimal. Berdasarkan penelitian ini, sebanyak 16 Kecamatan hanya 6 Kecamatan yang dapat dilakukan sosialisasi dengan jumlah pengguna sebanyak 119 orang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *online*, Silampah difasilitasi komputer sebanyak 3 (tiga) buah dengan kecepatan *Random Acces Memory* 2 GB yang melayani 119 pengguna (Tahun 2018-2019) di *Commad Center* Silampah.
2. Pelaksanaan *offline*, ditinjau dari 4 (empat) aspek yaitu peluncuran atau *launching* program, pengorganisasian tim pelaksana, persiapan dan pelaksanaan, dan evaluasi program. Peluncuran atau *launching* program Silampah menunjukkan bahwa sikap optimis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan program Silampah dengan mengundang berbagai perwakilan pejabat-pejabat publik. Pengorganisasian tim pelaksana dilakukan oleh 250 orang terdiri atas UPT Laboratorium Pengelola Silampah dengan UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV di bawah Bidang Pengelolaan Sampah. Persiapan dan pelaksanaan Silampah, persiapan sosialisasi sudah dilakukan di 6 Kecamatan dari total 16 Kecamatan dengan jumlah armada 101 armada. Evaluasi program dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sedangkan pada tingkat UPT Kebersihan Wilayah dilakukan setiap 3 (tiga) minggu sekali.
3. Faktor penghambat pelaksanaan Silampah terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penggunaan nomor palsu, sering

terjadi area atau tempat pembuangan sampah liar yang tidak dapat dijangkau dan dimasuki oleh armada pengangkutan, buangan sampah liar yang di luar menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Faktor eksternal meliputi kurangnya partisipasi masyarakat Kota Semarang itu sendiri.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

- a. Sebaiknya jumlah fasilitas komputer di *Commad Center* Silampah perlu ditambah lebih banyak agar pelaksanaan pengaduan masyarakat berjalan dengan cepat dan efektif.
- b. Sebaiknya kecepatan *Random Acces Memory* atau *internet* juga perlu ditambah tingkat kecepatannya untuk melayani masyarakat dengan prima.
- c. Sebaiknya sosialisasi tidak terbatas berhenti pada tingkat Kecamatan saja, namun lebih baik dilakukan secara menyeluruh pada tingkat RT atau RW, lingkungan akademis di Kota Semarang dan media sosial.

### **2. Bagi Masyarakat Kota Semarang**

- a. Sebaiknya pengguna Silampah dengan Dinas Lingkungan Hidup membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat terfokus pada Silampah.
- b. Sebaiknya dilakukan diskusi publik dengan masyarakat secara berkala dengan tema Silampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Banowati Eka, dkk. 2015. *Pengelolaan Sampah Rumah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Semarang: Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pasca Sarjana, JESS 4 (1).
- Damanhuri, Enri. 2011. *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan Edisi 1.
- Gaileo, Razki, 2008. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU No 18 Tahun 2008*, Pekanbaru: FISIP Universitas Riau.
- Hariyanto, Ariyani. 2011. *Pengelolaan Sampah di Kota Semarang untuk Menuju Kota Bersih*. Dosen Geografi Jurusan FIS UNNES, Forum Ilmu Sosial, Vol. 38, No.1.
- Mahyudin Rizqi, Puteri. 2014. *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Lampung Mangkurat: Enviro Sience 10, 33-40.
- Mardiyanta, Antun. 2011. *Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi Dan Tantangan Implementasinya*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga: Volume 2, Nomor 3.
- Noor Munawar, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2.
- Prihatin Eko Sabar, dkk. 2016. *Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3)*. Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3.
- Purbathin, Agus, 2011. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, Kelembagaan dalam Pembangunan: Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Subekti, Sri. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat*, Semarang: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNPAD.

- Sugianto, Heri. 2011. *Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur fakultas Teknik Universitas Diponegoro*. Semarang:Modul Vol.11, No.2.
- Suwitri Sri, dkk. 2013. Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Semarang, <https://www.neliti.com/id/journals/indonesian-journal-of-public-policy-and-management-review>.
- Suwitri, Sri, 2017. *Teori Pengelolaan*, Medan: Universitas Medan Area.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta:PT Pustaka Indonesia Press.
- Tampubolon John, L. 2007. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*. Semarang:Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP.
- Wibawa, Samodra. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat:Pendekatan Teoritis. Welfare:Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Widjajanti, Kesi, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27.

### **Modul**

- M1-C1. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah*, Pelatihan Tepat Guna Kesehatan Lingkungan, Materi Inti.
- Suwitri, Sri. 2017. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Modul 1, MAPU5301

### **Buku**

- Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bndung:Alfabeta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik:Proses Analisis, dan Partisipasi*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial UNNES:Widya Karya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta:Ghava Media.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Purwanto Agus, dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Ghava Media.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

### **Skripsi, Tesis, Disertasi**

Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Universitas Diponegoro: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana.

Mubarak, Zaki. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro.

Prianto Ragil Agus. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang: Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sofyan, Lusviminda. 2014. *Studi Pengelolaan Sampah Hotel Dan Prospek Pengembangan Di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

### **Artikel**

Arifin Zainal. 2010. *Evaluasi Program*. Bandung: Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Djumiarti Titik, dkk. *Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Nina Widowati, Farizqi Pramadianto. *Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Purnomo, dkk. *Pengelolaan Sampah Organik Pada Pasar Pedurungan Kota Semarang*. Universitas Muhammadiyah Semarang:Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM.

Saputro Eko Yusa, dkk. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*. Universitas Diponegoro:Mahasiswa program Magister Ilmu Lingkungan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik.

### **Internet**

PikiranRakyat.com.

Tribun Jawa Tengah.com.

Kompas.com.

### **Arsip**

BPS Provinsi Jawa Tengah 2019.

Laporan Pengaduan Silampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

### **Lain-Lain**

Akun Resmi (*Instagram*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

# LAMPIRAN



	Semarang?			<p>program Silampah?</p> <p>4. Berapa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peluncuran tersebut?</p> <p>5. Apa saja isi materi yang disampaikan dalam kegiatan peluncuran program Silampah?</p> <p>6. Siapa saja pihak yang hadir dalam kegiatan peluncuran program Silampah tersebut?</p> <p>7. Apa harapan Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas,UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola,</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	-----------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

			<p>Kota Semarang dalam kegiatan peluncuran program Silampah?</p> <p><b>b. Pengorganisasian Tim Pelaksana program Silampah</b></p>	<p>UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>1. Siapa yang bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan program Silampah?</p> <p>2. Apakah terdapat bagian-bagian khusus tim pelaksana dalam pelaksanaan program Silampah?</p> <p>3. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia dalam UPT Pengelola?</p> <p>4. Berapa jumlah Sumber</p>	<p>UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas,</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

				<p>Daya Manusia dalam UPT Kebersihan Wilayah?</p> <p>5. Siapa yang mengkoordinir pelaksanaan Silampah di UPT Laboratorium?</p> <p>6. Siapa yang mengkoordinir dalam pelaksanaan UPT Kebersihan Wilayah?</p> <p>7. Apa tugas pokok UPT pengelola dengan UPT Kebersihan Wilayah?</p>	<p>UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
			<p><b>c. Persiapan dan pelaksanaan program,</b></p>	<p>1. Bagaimana alur persiapan dalam pelaksanaan program</p>	<p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan</p>	<p>Wawancara</p>

			<b>Silampah</b>	<p>Silampah?</p> <p>2. Bagaimana persiapan dari segi armada pengangkutan dalam mendukung pelaksanaan program Silampah?</p> <p>3. Berapa jumlah armada yang disediakan oleh masing-masing UPT?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme pembagian wilayah yang menjadi tanggungjawab masing-masing UPT di 16 Kecamatan?</p> <p>5. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh</p>	<p>Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola,</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	--	--	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

				<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah?</p> <p>6. Melalui apa saja kegiatan sosialisasi tersebut?</p> <p>7. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan di daerah mana saja?</p> <p>8. Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa?</p> <p>9. Apa alasan dipilihnya media sosial untuk melakukan sosialisasi Silampah?</p> <p>10. Apa hasil dari kegiatan</p>	<p>UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

				<p>sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan UPT?</p> <p>11. Siapa target utama dalam sosialisasi pelaksanaan program Silampah?</p> <p>12. Bagaimana pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang?</p> <p>13. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan program Silampah?</p> <p>14. Apakah terdapat koordinasi antara UPT</p>	<p>UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola,</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

				<p>Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?</p> <p>15. Berapa jumlah TPS yang dilayani dalam pelaksanaan Silampah ini?</p> <p>16. Apa saja tugas dari pasukan merah dalam pelaksanaan program Silampah?</p> <p>17. Bagaimana pelaksanaan program Silampah di 3 TPS yang dipilih oleh peneliti tersebut?</p> <p>18. Dalam pelaksanaan Silampah, apa respon atau dukungan yang</p>	<p>UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

				diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang?	Wilayah	
				19. Bagaimana model pelaksanaan program Silampah?	Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah	Wawancara
				20. Apa dampak terkait dalam pelaksanaan program Silampah?	Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah	Wawancara
				21. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program Silampah?	Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah	Wawancara
				22. Apa saja kendalanya?	Kepala Dinas, UPT Pengelola,	Wawancara
				23. Apa kelebihan dan kekurangan yang	UPT Kebersihan Wilayah	Wawancara

				terdapat dalam program Silampah?		
				1. Apakah saudara mengetahui program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang?	Masyarakat Umum	Wawancara
				2. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang program Silampah?	Masyarakat Umum	Wawancara
				3. Apakah saudara dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan program Silampah?	Masyarakat Umum	Wawancara

				<p>4. Harapan saudara terkait dengan pelaksanaan program Silampah selanjutnya itu seperti apa?</p> <p>1. Sejak kapan ibu memakai program Silampah ini?</p> <p>2. Apakah terdapat keluhan yang ibu rasakan dalam program Silampah ini?</p> <p>3. Jika ada, apa saja keluhannya?</p> <p>4. Sejauh ini, apa saja dampak yang ibu rasakan dari program Silampah?</p>	<p>Masyarakat Umum</p> <p>Pengguna Silampah</p> <p>Pengguna Silampah</p> <p>Pengguna Silampah</p> <p>Pengguna Silampah</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
			<b>d. Evaluasi Program</b>	<p>1. Apakah terdapat</p>	<p>Kepala Dinas,</p>	<p>Wawancara</p>

			<p><b>Silampah</b></p>	<p>evaluasi dari adanya program Silampah ini?</p> <p>2. Kapan biasanya evaluasi tersebut dilakukan?</p> <p>3. Apa saja isi materi yang disampaikan dalam proses evaluasi program Silampah?</p>	<p>UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
2.	<p>Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Silampah?</p>				<p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan Wilayah</p> <p>Kepala Dinas, UPT Pengelola, UPT Kebersihan</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>

					Wilayah	
--	--	--	--	--	---------	--

## **Lampiran 2. Pedoman Observasi Penelitian**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

#### **PENGELOLAAN PROGRAM “SILAMPAH” (SISTEM LAPOR SAMPAH) OLEH DINAS LINGKUNGAN**

#### **HIDUP DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH SAMPAH DI KOTA SEMARANG**

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu alat yang penting untuk pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Pauline Young observasi atau pengamatan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan dan pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu (Madyantari, 2014).

Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan, dapat digolongkan menjadi empat tipe yakni partisipan sempurna, partisipan pengamat, pengamatan sebagai partisipan, dan pengamatan sempurna. Dalam penelitian ini, keterlibatan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu partisipan sebagai pengamat, yaitu peneliti berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas penelitian di lapangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang).

Dalam penelitian ini, yang peneliti amati adalah bagaimana program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup dengan fokus penelitian pada pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penanggulangan masalah sampah di Kota Semarang dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Silampah.

Tujuan pokok dilakukannya observasi ini adalah mendapatkan data mengenai pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adapun aspek-aspek observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penanggulangan masalah sampah di Kota Semarang:
  - a. Pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah) dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
    - 1) Peluncuran atau *launching* program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
    - 2) Pengorganisasian Tim Pelaksana Pelaksanaan Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
    - 3) Persiapan dan pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

4) Evaluasi program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah).

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Data
1.	1. Pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	1. Peluncuran atau <i>launching</i> program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.  2. Pengorganisasian Tim Pelaksana Pelaksanaan	

		<p>Program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> <p>3. Persiapan dan pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> <p>4. Evaluasi program Silampah (Sistem</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.	Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program “Silampah” (Sistem Lapor Sampah)	<p>Lapor Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> <p>1. Faktor penghambat internal</p> <p>2. Faktor penghambat eksternal</p>	
----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENGELOLAAN PROGRAM “SILAMPAH” (SISTEM LAPOR SAMPAH) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH SAMPAH DI KOTA SEMARANG**

### **I. Identitas Informan 1**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Drs. Sapto Adi Sugihartono, MM  
Usia : -  
Tingkat pendidikan : S3  
Jabatan di instansi : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

### **Identitas Informan 2**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Al-Ghazali  
Usia : 33 Tahun  
Tingkat pendidikan : S1  
Jabatan di instansi : UPT Laboratorium Pengelola Silampah I

### **Identitas Informan 3**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Kiki Rahma Kusuma  
Usia : 26 Tahun  
Tingkat pendidikan : S1  
Jabatan di instansi : UPT Laboratorium Pengelola Silampah II

### **Identitas Informan 4**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020

Nama : Rifky Asna  
Usia : 23 Tahun  
Tingkat pendidikan : SMA  
Jabatan di instansi : UPT Kebersihan Wilayah I

**Identitas Informan 5**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Atikah  
Usia : 31 Tahun  
Tingkat pendidikan : S1  
Jabatan di instansi : UPT Kebersihan Wilayah II

**Identitas Informan 6**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Nur Aziz  
Usia : 33 Tahun  
Tingkat pendidikan : SMA  
Jabatan di instansi : UPT Kebersihan Wilayah III

**Identitas Informan 7**

Tanggal Penelitian : 2 Maret S.d 30 Mei 2020  
Nama : Reza Bahrudin Arrasyid (28)  
Usia : 28 Tahun

Tingkat pendidikan : SMA

Jabatan di instansi : UPT Kebersihan Wilayah IV

## **II. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah?
2. Dimana kegiatan peluncuran program Silampah diadakan?
3. Kapan pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah?
4. Berapa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peluncuran tersebut?
5. Apa saja isi materi yang disampaikan dalam kegiatan peluncuran program Silampah?
6. Siapa saja pihak yang hadir dalam kegiatan peluncuran program Silampah tersebut?
7. Apa harapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam kegiatan peluncuran program Silampah?
8. Siapa yang bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan program Silampah?
9. Apakah terdapat bagian-bagian khusus tim pelaksana dalam pelaksanaan program Silampah?
10. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia dalam UPT Pengelola?
11. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia dalam UPT Kebersihan Wilayah?
12. Siapa yang mengkoordinir pelaksanaan Silampah di UPT Laboratorium?
13. Siapa yang mengkoordinir dalam pelaksanaan UPT Kebersihan Wilayah?
14. Apa tugas pokok UPT pengelola dengan UPT Kebersihan Wilayah?
15. Bagaimana alur persiapan dalam pelaksanaan program Silampah?
16. Bagaimana persiapan dari segi armada pengangkutan dalam mendukung pelaksanaan program Silampah?

17. Berapa jumlah armada yang disediakan oleh masing-masing UPT?
18. Bagaimana mekanisme pembagian wilayah yang menjadi tanggungjawab masing-masing UPT di 16 Kecamatan?
19. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah?
20. Melalui apa saja kegiatan sosialisasi tersebut?
21. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan di daerah mana saja?
22. Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa?
23. Apa alasan dipilihnya media sosial untuk melakukan sosialisasi Silampah?
24. Apa hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan UPT?
25. Siapa target utama dalam sosialisasi pelaksanaan program Silampah?
26. Bagaimana pelaksanaan program Silampah dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang?
27. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan program Silampah?
28. Apakah terdapat koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?
29. Berapa jumlah TPS yang dilayani dalam pelaksanaan Silampah ini?
30. Apa saja tugas dari pasukan merah dalam pelaksanaan program Silampah?
31. Bagaimana pelaksanaan program Silampah di 3 TPS yang dipilih oleh peneliti tersebut?
32. Dalam pelaksanaan Silampah, apa respon atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang?
33. Bagaimana model pelaksanaan program Silampah?
34. Apa dampak terkait dalam pelaksanaan program Silampah?

35. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program Silampah?
36. Apa saja kendalanya?
37. Apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam program Silampah?

#### **Lampiran 4. Hasil Transkrip Wawancara**

##### **TRANSKIP WAWANCARA**

###### **1. Wawancara Narasumber 1**

Transkrip wawancara dengan Bapak Drs. Sapto Edi Sugihartono, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

P : Assalamu'alaikum pak, selamat siang. Perkenalkan pak, saya Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, sama evaluasinya pak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskannya kepada saya pak.

N : Walaikumsalam mas Doni. Ya selamat siang. Ok bisa mas *monggo*.

P : Baik pak, langsung saja *nggih*. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah ini pak?

N : Iya mas, jadi pada tanggal 17 oktober 2018 kami dari DLH ya melakukan peluncuran *launching* program baru kami yaitu Silampah ya atau Sistem Lapor Sampah. Jadi itu yang paling penting dari Silampah ini adalah memudahkan masyarakat dalam melapor masalah sampah. *Kalo punya* ponsel tinggal *klik* nanti akan muncul aplikasinya dan bisa langsung digunakan tanpa dipungut biaya jadi ya gratis. Dalam peluncuran program itu juga kami undang beberapa perwakilan dari camat, tokoh masyarakat dan lain-lain itu ada sekitar 35 orang mas.

P : Oh jadi waktu peluncurannya itu pada 17 Oktober 2018 ya pak.

N : Iya mas *betul* sekali. Terus itu peluncuran Silampah diadakan dimana ya pak?

P : *Kalo* tempatnya itu di Kantor kami mas, nanti bisa cari alamat lengkapnya DLH ya.

N : Siap pak. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peluncuran Silampah memang kurang lebih 35 orang atau ada lagi pak?

P : Iya kurang lebih 35 orang mas itu perwakilan-perwakilan dari Camat, masyarakat dan sebagainya.

N : *Nah kalo* dari materi yang disampaikan itu apa saja nggih pak?

P : Materinya itu ya kita sampaikan ke forum *kalo* kita 100% optimis Silampah akan membawa pada perubahan perilaku masyarakat. Silampah ini *kan* dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Semarang

yang memiliki ponsel melalui *play store* atau *semarangkota.go.id*. Cara penggunaannya juga mudah dan praktis hanya tinggal *klik* akan muncul halaman depan Silampah, muncul halaman nomor telepon, alamat, dan foto ya jadi sangat mudah mas.

N : Untuk pihak-pihak yang dalam hal ini diundang ikut mensukseskan acara peluncuran Silampah itu dari siapa saja pak?

P : Seperti yang tadi Bapak bilang mas ada perwakilan dari camat-camat, masyarakat, dan pihak internal kami sendiri ini yang kurang lebih juga ada pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Semarang. *Gitu nggih* mas.

N : Baik pak, kemudian itu harapan DLH Kota Semarang dari adanya peluncuran program Silampah ini harapannya apa ya pak?

P : Kami sangat berharap bahwa program ini itu bisa diimplementasikan oleh semua kalangan mas, jadi masyarakat sangat terbantu, karena *kan* jaman sekarang sudah banyak yang *punya* ponsel istilahnya, dari hal tersebut kami berharap program ini bisa sukses mas mengatasi masalah sampah di Kota Semarang ini. Itu impian kami juga.

N : Selanjutnya itu kalo dari tim pelaksananya ya pak sebenarnya program ini yang menangani dan bertanggungjawab langsung itu siapa saja pak bisa dijelaskan ke saya?

- P : Jadi wewenang utama ada di DLH itu sendiri tapi ada bagian khusus yang menangani Silampah ini ada UPT Laboratorium ada 3 ya kemudian ada UPT di lapangan itu banyak jumlahnya. Yang memegang kendali ya di UPT-UPT nya itu mas di bawah naungan Bidang Pengelolaan Sampah.
- N : *Kalo* untuk jumlah SDM yang ada di UPT Laboratorium itu berapa pak?
- P : Ada 3 orang mas, ada Mas Al, Mba Kiki, dan Mas Rizki itu yang di UPT Kantor mas.
- N : *Kalo* jumlah SDM yang ada di UPT Lapangan ada berapa pak?
- P : Ya beda-beda ya mas, karena *kan* kami punya 4 UPT itu juga koordinasinya beda-beda orang. Saya kurang paham coba nanti tanya ke mas Al.
- N : *Nggih* pak, untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa pak?
- P : Mas Al-Ghozali mas.
- N : Untuk UPT di lapangan itu sendiri berarti ada 4 orang yang jadi koordinator. Mungkin bisa dijelaskan pak siapa saja ya?
- P : *Kalo* di UPT I itu mas Rifky Asna nanti bisa tanyakan lebih lanjut, di UPT II ada mba Atikah, UPT III ada mas Aziz, dan IV itu ada mas Reza. *Gitu nggih.*

N : Sebenarnya tugas dari UPT-UPT baik di laboratorium istilahnya di kantornya kemudian UPT di lapangan itu bedanya dimana pak?

P : Ya jelas beda mas, petugas *admin* di *Commad Center* Silampah itu mengecek setiap pengaduan atau laporan dari masyarakat. Sedangkan tugas pokok UPT Kebersihan Wilayah I, II, III, dan IV adalah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah. Apabila dari pihak *admin* atau UPT di Laboratorium mengirimkan instruksi adanya aduan permasalahan sampah, maka pihak UPT Kebersihan Wilayah terkait langsung menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan koordinasi yang matang, dan selanjutnya merespon laporan tersebut untuk segera ditangani oleh pihak UPT. Kurang lebih seperti itu.

N : Kemudian itu alur persiapan dalam pelaksanaan program Silampah bagaimana pak?

P : Jadi sebelum acara peluncuran Silampah ini mas, kami sebelumnya melaksanakan kegiatan sosialisasi di DLH kami mengundang ya sekitar 60 orang untuk turut hadir, ya tujuannya itu tidak lain agar masyarakat tahu tentang Silampah ini dan langsung bisa digunakan apabila mereka terkendala dalam masalah pelaporan sampah.

N : Bagaimana persiapan dari segi armada pengangkutan dalam mendukung pelaksanaan program Silampah ini ya pak?

P : Jumlah armada yang kami sediakan itu ada 101 terdiri atas *amroll* sama *dump* mas. Itu buat 4 wilayah kebersihan

N : Jumlah armada yang terbagi di masing-masing UPT baik UPT I sampai dengan IV itu berapa saja pak kuantitasnya?

P : Coba nanti tanyakan ke mas Rifky ya saya kurang paham untuk jumlah pasnya berapa mas.

N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana pak?

P : Jadi, 1 UPT itu melayani masing-masing 4 (empat) Kecamatan mas. UPT Kebersihan Wilayah I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT Kebersihan Wilayah II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, untuk UPT Kebersihan Wilayah III itu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT Kebersihan Wilayah IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen. Seperti itu mas pembagiannya.

N : Baik pak, untuk kegiatan tahap awal persiapan *kan* sosialisasi ya pak, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini pak?

P : Kami sebelumnya melaksanakan kegiatan sosialisasi di DLH kami mengundang ya sekitar 60 orang untuk turut hadir, ya tujuannya itu tidak lain agar masyarakat tahu tentang Silampah ini dan langsung bisa digunakan apabila mereka terkendala dalam masalah pelaporan sampah, kemudian sosialisasi paling efektif pasti kami lakukan di media sosial mas.

N : Ok pak, berarti kegiatan sosialisasi dilakukan melalui media sosial seperti di *instagram* DLH *begitu* ya pak?

P : Iya benar sekali mas.

N : Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa pak?

P : Ya pada intinya kami memberitahukan, istilahnya menyiarkan program inovasi pelayanan ini kepada masyarakat luas mas, harapannya bisa diproduksi secara massal kan seperti itu, ya kami terus gencar melakukan sosialisasi ini agar orang itu tau apa itu Silampah DLH mas.

N : Apa *sih* pak alasan dipilihnya media sosial sebagai alat promosi yang efektif?

P : Sebenarnya kami lakukan itu ya mengikuti perkembangan juga mas, *kan* pasti sudah jelas dan banyak sekali masyarakat yang punya *hp* jadi kami rasa efektif sekali memberitahukan Silampah ini ke berbagai kalangan. Tapi sosialisasi ke Kecamatan juga kami terus lakukan ya diseimbangkan mas.

N : Hasil pokok dari sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja pak?

P : Untuk hasilnya itu sendiri perlu digaris bawahi ya mas perwakilan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan dapat meneruskan dan menyebarluaskan program Silampah ini kepada masyarakat di lingkungan masing-masing sehingga masyarakat diharapkan banyak yang mengetahui program Silampah.

N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini pak?

P : Ya tentu pasti masyarakat mas di semua kalangan *lah kalo* bisa makanya dari itu rasa optimis kami harus tetap ada mas jadi ya kita berusaha sekeras tenaga meminimalisir permasalahan di Kota Semarang ini.

N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri pak?

P : Betul sekali mas, sebenarnya pelaksanaan program ini kami seimbangkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Kalo pelaksanaannya Alur sederhananya jadi *kan gini* mas, dimulai dari aduan atau laporan masyarakat yang masuk ke Silampah ini, setelah laporan masuk itu petugas kami mengecek, dari laporan yang masuk itu kana da kriteria-kriteria

apakah ini masuk wilayah kita atau gak, missal oh masuk langsung dari petugas UPT di Lab. Meneruskan ke UPT Kebersihan Wilayah, dari UPT Wilayah itu siapkan tim untuk langsung terjun ke lapangan cek ke lokasi.

N : Apa saja fasilitas yang disediakan DLH guna mendukung pelaksanaan Silampah ini pak?

P : *Kalo* fasilitas jelas kami punya ruangan khusus untuk Silampah ini ya yang kami namakan Silampah *Commad Center* pusatnya di situ mas.

N : Apakah terdapat koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?

P : Jelas ada, paling sering kami lakukan koordinasi *via grup* khusus yang kami buat sebelumnya.

N : Terus itu jumlah TPS pak yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa pak?

P : Kita bicara soal TPS ini kalo di Kota Semarang sendiri ada total 200 TPS mas itu tersebar di seluruh 16 Kecamatan ya di Semarang ini ya mungkin ada TPS yang belum bisa dijangkau armada kami tapi kalo 200 insyaallah sudah mas.

N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah itu apa pak di lapangan?

P : Ya melakukan pengecekan di lapangan mas daripada ada aduan-aduan, ada laporan-laporan yang masuk untuk segera kami tangani *kan gitu*.

- N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana pak?
- P : Ya hal ini bisa mas Doni tanyakan ke UPT yang menangani TPS tersebut.
- N : Apakah terdapat respon dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang pak?
- P : Kami memiliki sinergitas dengan Pemkot mas untuk bekerjasama mensosialisasikan dan menyiarkan program ini kepada semua orang.
- N : Kemudian model pelaksanaan program Silampah ini seperti apa pak apakah basisnya masyarakat atau ada yang lain?
- P : *Gak* ada mas, prinsip kami sama tetap mengedepankan partisipasi masyarakat dan selalu lewat *online* dan *online* tidak ada yang lain karena apa? Modelnya tetap kami sesuaikan dengan perkembangan jaman saat ini *lah*, tidak ada yang membedakan dari tahun ini ke tahun selanjutnya, yang beda nanti dalam pelaksanaannya apakah meningkat atau menurun, begitu.
- N : Dampak dari pelaksanaan program Silampah sejauh ini bagaimana pak?

P : Mas pokoknya dampaknya itu pasti ke masyarakat kita juga yang utama yang *gunain* aplikasi Silampah dari kami itu. Kalo dampak negatifnya saya kira *engga* ada ya mas, ada *cuma* ya tidak begitu banyak, kebanyakan pasti dampaknya positif, soalnya dari awal niat kita *kan* untuk bantu masyarakat, ya bantunya *gimana* caranya masyarakat itu sadar akan kedisiplinan membuang sampah di tempatnya, misal mereka di jalan atau dimana *liat* sampah berserakan bisa langsung hubungi Silampah, dampak yang lain lebih menyadarkan masyarakat aja *sih* mas. Jadi gitu.

N : Apa saja Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah ini pak?

P : *Kalo* kendala pasti banyak diantaranya yaitu *e* misalkan *e* karena sistem *kan* kadang berjalan *gak* terdeteksi *gitu kan* misalkan ada laporan di titik A kadang *kalo* GPS mendeteksi *kan gak* di titiknya persis *nah* itu kita sesuaikan pertama menemukan lokasinya itu, lokasi yang masih terpencil *kan agak* susah karena jangkauan kita *gak cuma* di perkotaan *aja sampe* pinggiran kota juga kita menjangkau juga itu. Kendala mungkin termasuk apa namanya area ya mungkin jangkauan armada itu kita memang bisa *kalo gak* bisa kita masih koordinasi dengan pemangku wilayah setempat itu.

N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : Kelebihannya itu bagus dan efektif untuk menyadarkan banyak masyarakat mas, untuk kekurangannya difokuskan lebih pada kekurangan yang bersifat teknis.

N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah pak?

P : Evaluasi kami lakukan 3 bulan sekali mas itu untuk DLH, kemudian di UPT-UPT biasanya 3 minggu sekali.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut pak?

P : Isi materi dari *breafing* tersebut antara lain pemberian semangat, motivasi-motivasi untuk selalu bekerja dengan baik, bekerja atas dasar *tim work*, melayani masyarakat selalu berupaya mengatasi permasalahan Sampah di Kota Semarang.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini pak?

P : Jelas ada faktor penghambatnya mas baik teknis maupun yang lain, *kalo* kendala teknisnya itu kadang ada pelapor yang *gunain* nomor palsu jadi nanti akan sangat menyulitkan kami pada saat identifikasi laporannya, terus area sampahnya itu banyak juga yang *gak* terjangkau truk pengangkutan, sama buangan dari sampah liarnya itu di luar kewenangan kami mas, jadi ya itu *sih* kendala yang selama ini kami rasakan. Iya, mas dari awal *kan tadi* sudah saya singgung sedikit ya, *kalo* program ini bisa berjalan apabila masyarakatnya juga

aktif berpartisipasi, ya maksud aktif di sini maksudnya sama-sama melalorkan jika ada pembuangan sampah liar dimana dan kapanpun itu, masih susah mas menyadarkan masyarakatnya ini, *gimana* masyarakatnya itu bisa *pake* Silampah, *kalo* banyak yang *make* itu kami sudah *seneng banget* rasanya. Program *gak* mungkin bisa jalan kalo di *dalemnya* juga *gak* ada masyarakat yang ikut andil di situ mas.

## 2. Wawancara Narasumber 2

Transkrip wawancara dengan Al-Ghozali selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah I

N : Selamat pagi pak. Perkenalkan saya Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya pak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskannya ya pak.

N : Selamat siang mas, bisa silakan saya bantu mas.

P : Baik pak, Bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah dari DLH Kota Semarang?

N : Silampah ini kami luncurkan pada 17 oktober 2018 mas di sana banyak hadir perwakilan dari tokoh publik kurang lebih 35 orang.

N : Terus itu peluncuran Silampah diadakan dimana ya pak?

- P : Di Kantor DLH Kota Semarang mas.
- N : Siap pak. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peluncuran Silampah ada berapa pak?
- P : 35 orang dirinci dari perwakilan-perwakilan dari Camat, masyarakat mas.
- N : Materi yang disampaikan itu apa saja nggih pak?
- P : Dalam peluncuran Silampah tersebut dijelaskan bahwa melalui program Silampah, laporan atau pengaduan dari masyarakat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di *Commad Center* Silampah yang kemudian ditangani oleh petugas di lapangan.
- N : Pihak-pihak yang dalam hal ini diundang ikut mensukseskan acara peluncuran Silampah itu dari siapa saja pak?
- P : Perwakilan-perwakilan mas ya campuran ada Pemerintah Kota Semarang Pak Agus, terus dari pihak internal kami sendiri dan beberapa tamu camat mas.
- N : Baik pak, kemudian itu harapan DLH Kota Semarang dari adanya peluncuran program Silampah ini harapannya apa?
- P : Harapannya dari saya sendiri program Silampah ini bisa berjalan sukses dan lancer pastinya. Dan saya berharap mas Doni bisa membantu kami dalam mensosialisasikan juga program ini ya.

N : Dari segi dari tim pelaksananya ya pak sebenarnya program ini yang menangani dan bertanggungjawab langsung itu siapa saja pak bisa dijelaskan ke saya?

P : Untuk tim pelaksana dari Silampah ini itu ada beberapa bagian atau bidang mas yang saling berkaitan. Jadi kami itu kerjasama dari bagian saya di admin *Commad Center* ini, di sini itu kami bertanggungjawab di bawah naungan Bidang Pengelolaan Sampah mas yang terdiri dari tiga orang itu ada UPT Laboratorium I, II, III, dan IV, ke bawah lagi ada UPT Kebersihan I sampai IV itu yang jumlahnya juga banyak. Tapi, masing-masing UPT itu jumlah anggotanya masing-masing beda

N : *Kalo* untuk jumlah SDM yang ada di UPT Laboratorium itu berapa pak?

P : Ada 3 orang mas kalo di *Commad Centernya*, ada saya sendiri kemudian mba Kiki sama mas Rizki Nugroho.

N : *Kalo* jumlah SDM yang ada di UPT Lapangan ada berapa pak?

P : Beda-beda *sih* mas setiap UPT nya, coba nanti saya tanyakan ke orang per UPT nya.

N : *Nggih* pak, untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa pak?

P : Saya sendiri mas.

N : Untuk UPT di lapangan itu sendiri berarti ada 4 orang yang jadi koordinator. Mungkin bisa dijelaskan pak siapa saja ya?

P : UPT I itu mas Rifky Asna, di UPT II ada mba Atikah, UPT III ada mas Aziz, dan IV itu ada mas Reza.

N : Sebenarnya tugas dari UPT-UPT baik di laboratorium Silampah istilahnya di kantornya kemudian UPT di lapangan itu bedanya dimana pak?

P : *Kalo* saya di *admin* di *Commad Center* Silampah itu mengecek setiap pengaduan atau laporan dari masyarakat. Sedangkan tugas pokok UPT Kebersihan Wilayah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah.

N : Kemudian itu alur persiapan dalam pelaksanaan program Silampah bagaimana pak?

P : Jadi pertamanya itu persiapan dalam segi armada, SDM juga di dalamnya dan persiapan sosialisasi karena Silampah ini *kan* dirasa masih baru dan penting sekali masyarakat mengetahuinya mas, jadi 2 aspek itu *sih* kalo dari saya.

N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini meliputi apa saja pak?

P : Jumlah armada yang kami sediakan itu ada 101, itu untuk 4 UPT jadi masing-masing UPT jumlahnya beda-beda mas.

- N : Berapa jumlah masing-masing armada di setiap UPT pak?
- P : Masing-masing UPT beda-beda mas kaya yang tadi saya katakan di atas, yang lebih paham berapa jumlahnya bisa ditanyakan ke koordinator per UPT ya.
- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana?
- P : UPT Kebersihan Wilayah I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT Kebersihan Wilayah II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, untuk UPT Kebersihan Wilayah III itu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT Kebersihan Wilayah IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen.
- N : Baik pak, untuk kegiatan tahap awal persiapan *kan* sosialisasi ya pak, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini pak?
- P : Strategi DLH pertama kita melakukan sosialisasi melalui media sosial terus *e* biasanya juga ada sosialisasi di Balai Kota Semarang, terus misalkan ada tamu juga kita sosialisasikan *e* tentang *e* inovasi yang dipunyai DLH itu apa strateginya ya itu.
- N : Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa pak?

- P : Ya memberitahukan, istilahnya mensiarkan program inovasi pelayanan ini kepada masyarakat luas mas
- N : Apa *sih* pak alasan dipilihnya media sosial sebagai alat promosi yang efektif?
- P : Yang pertama karena perkembangan jaman juga mas, karena jaman sekarang sudah era industri semua serba teknologi dan teknologi jadi kami DLH memanfaatkan peluang itu untuk memberitahukan Silampah ini.
- N : Hasil pokok dari sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja pak?
- P : Untuk perwakilan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan dapat meneruskan dan menyebarluaskan program Silampah ini kepada masyarakatnya mas sehingga kami berharap Silampah ini berjalan optimal karena banyak yang tahu *sih*.
- N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini pak?
- P : Jelas semua masyarakat Kota Semarang ya mas.
- N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri pak?
- P : Akan saya jawab bismillahirrohmannirrohim, ya pelaksanaan kebijakan Silampah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang itu berdasarkan *e* kita tetap *admin* menerima laporan dan dilanjutkan ke Kepala Dinas. Misalkan nanti *e* membutuhkan suatu kebijakan yang kita harus *admin* bukan ranahnya,

*admin* tetap naik ke atasan dulu. *Tapi* andaikan ada laporan yang kita bisa tangani kita langsung korelasikan ke UPT terkait di wilayahnya sesuai laporan itu

N : Apa saja fasilitas yang disediakan DLH guna mendukung pelaksanaan Silampah ini pak?

P : Kami ada ruangan khusus untuk Silampah ini ya yang kami namakan Silampah *Commad Center* pusatnya di *situ* mas juga terdapat 3 buah komputer yang setiap hari kami gunakan.

N : Apakah terdapat koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?

P : Ada mas, kami juga punya *grup* khusus dengan UPT lapangan *missal* banyak yang melapor semua info aduan kami laporkan di grup ini

N : Terus itu jumlah TPS pak yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa pak?

P : Total 200 TPS mas itu tersebar di seluruh 16 Kecamatan di Semarang ini.

N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah itu apa pak di lapangan?

P : Jadi tugas pasukan merah itu mereka bersama melakukan pengecekan di TPS tujuannya itu mas. Misal kok di TPS tersebut memang ada tumpukan sampah mereka langsung segera menanganinya.

N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana pak?

P : *Kalo* yang itu bukan ranah saya di sini, coba mas tanyakan nanti ke UPT di lapangannya, *soalnya* mereka yang melakukan pengecekan di TPS nya itu, mereka yang paling paham mas. Maaf ini belum bisa saya jawab.

N : Apakah terdapat respon dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang pak?

P : *Nggih* ada mas, Jujur kami sangat bangga, senang, dan bersyukur bisa meluncurkan aplikasi ini mas. Pemerintah Kota Semarang betul-betul sangat terbuka dengan kami sangat mengapresiasi aplikasi Silampah ini. Ya pihak mereka sepertinya sangat senang ibaratnya ada solusi untuk sampah dengan basisnya teknologi Silampah ini. Pokoknya kami senang dan semoga ke depan bisa bermanfaat baik untuk masyarakat kami.

N : Kemudian model pelaksanaan program Silampah ini seperti apa pak apakah basisnya masyarakat atau ada yang lain?

P : Untuk model itu tidak ada ya. Pusat kami ya itu *by online* agar masyarakat tetap mudah menggunakannya tidak ada kesulitan atau hal yang menghambat.

N : Dampak dari pelaksanaan program Silampah sejauh ini bagaimana pak?

P : Tentu kami semua di sini luncurkan program Silampah ini pasti *punya* dampak baik untuk masyarakat, karena *emang* mas dari awal dampaknya ya buat membantu orang banyak dalam menangani sampah ya. Terus dampak yang kedua selain bisa bantu mereka lapor sampah di lapangan juga lebih mengurangi pembuangan sampah yang belum diangkut, saya katakan demikian karena misal satu orang atau banyak orang yang *gunain* Silampah ya, mereka sudah sangat berpartisipasi dan bisa kerjasama dengan kami untuk menanggulangi sampah ini, terus yang ketiga ada dampak luasnya target kami Kota Semarang bersih dari sampah.

N : Apa saja Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : *Kalo soal* kendala itu lebih ke teknisnya mas. Misal ada saja ujian waktu pengangkutan sampah di TPS tiba-tiba ban bocor dan itu sering dirasakan oleh UPT di lapangan kami.

N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : Silampah ini praktis dan mudah dalam penggunaannya, *kalo* untuk kekurangan belum terlalu populer di kalangan masyarakat karena masih kalah dengan Lapor Hendi mas gitu.

N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah pak?

P : Sebenarnya tidak hanya Silampah *aja* ya mas yang harus kita evaluasi, karena semuanya penting, semua program yang ada di bawah naungan kami itu besar dan butuh evaluasi juga, *kalo* untuk Silampah yang sangat perlu sekali dievaluasi itu di bagian kebijakan privasinya karena kan dulu *kan* Silampah masih dalam proses pengembangan mas, terus apa lagi ya? Bagaimana cara strategi kita juga dalam pelaksanaan Silampah ini ya masyarakat juga banyak yang terlibat tidak hanya sebagai penonton aja.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut pak?

P : Ya masukan saran-saran dan motivasi dari Bapak Dinas dan teman-teman di lapangan.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini pak?

P : Selama proses Silampah ini berjalan ya, mungkin kendalanya lebih ke teknis, *macem-macem lah*, yang masih *anget* itu emang di teknis, misal penggunaan nomor palsu, itu sering *banget* terjadi, efeknya ya laporannya *gak* bisa kami identifikasi lebih lanjut, sama itu mas areanya yang sulit dijangkau sama truk, itu *sih* yang menghambat *banget*, *tapi* insyaallah *tetep* berjalan ok lah.

### 3. Wawancara Narasumber 3

Transkrip wawancara dengan Kiki Rahma Kusuma selaku UPT Laboratorium Pengelola Silampah II

N : Selamat pagi *mbak*. Perkenalkan saya Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya pak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskannya ya pak.

P : Selamat pagi juga mas, *nggih* silakan mas.

N : Langsung saja ya *mbak*. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah dari DLH Kota Semarang?

P : Jadi mas *launching* program Silampah itu bertempat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Rabu, 17 Oktober 2018 yang dihadiri langsung oleh Pemerintah Kota Semarang yang pada saat itu diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Agus Riyanto, Bapak Muthohar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan jajarannya begitu ya mas.

N : Siap *mbak*. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peluncuran Silampah ada berapa *mbak* yang *mbak tahu?*

P : Kurang lebih ya ada 35 orang setau saya itu mas.

- N : Materi yang disampaikan itu apa saja ya mbak dalam launching Silampah?
- P : Intinya ke arah sikap optimis kita agar Silampah itu bisa jalan mas seperti program lainnya di DLH karena *kan* kita tau ini masih program baru di DLH jadi ya gimana caranya dari awal kita harus yakin *kalo* ke depan bisa berjalan baik.
- N : Pihak-pihak yang dalam hal ini diundang ikut mensukseskan acara peluncuran Silampah itu dari siapa saja *mbak*?
- P : Yang pasti ada dari pihak Pemerintah Kota Semarang, Kepolisian, dan dari kami sendiri.
- N : Harapan DLH Kota Semarang dari adanya peluncuran program Silampah ini harapannya apa?
- P : Ya pasti bisa optimal terutama dari masyarakatnya ini yang *agak* susah mas menyadarkan masyarakat untuk memakai aplikasi Silampah.
- N : Dari segi dari tim pelaksanaanya *mbak*, sebenarnya program ini yang menangani dan bertanggungjawab langsung itu siapa saja *mbak*?
- P : Ya baik, tim pelaksana daripada program ini sebenarnya terdiri atas 2 bagian ya mas, pertama dari UPT Pengelola di *Commad Center* seperti saya, Mas Al, dan Mas Rizki itu kami ibaratnya sebagai *admin* di kantornya. Kemudian yang kedua tim pelaksana di lapangan ada UPT I sampai dengan IV mas. Ya begitu.

N : *Kalo* untuk jumlah SDM yang ada di UPT Laboratorium itu berapa *mbak*?

P : Total ada 3 petugas mas kalo di bagian saya ini.

N : *Kalo* jumlah SDM yang ada di UPT Lapangan ada berapa *mbak*?

P : Ya beda-beda mas setiap UPT nya.

N : *Nggih mbak*, untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa *mbak*?

P : Mas Al-Ghozali.

N : Untuk UPT di lapangan itu sendiri berarti ada 4 orang yang jadi koordinator. Mungkin bisa dijelaskan ke saya *mbak*?

P : UPT I itu mas Rifky Asna, di UPT II ada mba Atikah, UPT III ada mas Aziz, dan IV itu ada mas Reza.

N : Tugas dari UPT Laboratorium Silampah dan UPT di lapangan itu bedanya dimana *mbak*?

P : *Kalo* saya di *admin* di *Commad Center* Silampah itu *kan* tugasnya mengecek aduan, mengecek laporan masuk dari masyarakat mas, sedangkan tugas pokok UPT Kebersihan Wilayah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah.

N : Alur persiapan pelaksanaan program Silampah bagaimana *mbak*?

- P : Bisa dikatakan dari pertama itu sosialisasi yang kami berikan *emang cuman* belum merata mas dan belum menyeluruh karena keterbatasan SDM juga. Sebelumnya kami di DLH juga mempersiapkan armada buat pengangkutan sampah di TPS-TPS itu.
- N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini meliputi apa saja *mbak*?
- P : Ada 101 armada.
- N : Berapa jumlah masing-masing armada di setiap UPT mbak?
- P : Masing-masing UPT beda-beda mas kaya yang tadi saya katakan di atas, yang lebih paham berapa jumlahnya bisa ditanyakan ke koordinator per UPT.
- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana?
- P : UPT I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, untuk UPT III itu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen.
- N : Baik *mbak*, untuk kegiatan tahap awal persiapan *kan* sosialisasi, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini *mbak*?

P : *Gimana sih* caranya mengenalkan dan mensosialisasikan program Silampah ini ke banyak orang mas, ya paling sering kami gunakan ya melalui sosialisasi lewat akun-akun resmi media kami seperti *ig* dan *twitter* karena itu lebih berhasil ya dan mengena di hati orang banyak, namanya media sosial sekarang *kan* ya dampaknya luar dan *gede banget*, terus kita juga ada *nih* biasanya sosialisasi di Balai Kota yang tadi mas Al sebutkan, dan terakhir misal ada orang atau masyarakat datang ke kami, kami juga siap perkenalkan mas.

N : Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa *mbak*?

P : Lebih fokus ke promosi di media sosial kami mas *missal nih* di *twitter*, *ig* dan *fb*, tujuannya apa ya agar masyarakat bisa tahu mas dan segera menerapkannya.

N : Alasan dipilihnya media sosial sebagai alat promosi yang efektif?

P : Alasannya karena media sosial pada era sekarang sangat besar mas dampaknya, apa-apa pasti di media sosial.

N : Hasil daripada sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja *mbak*?

P : Untuk perwakilan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan dapat meneruskan dan menyebarluaskan program Silampah ini kepada masyarakatnya mas sehingga kami berharap Silampah ini berjalan optimal karena banyak yang tahu sih.

- N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini *mbak*?
- P : Semua masyarakat Kota Semarang ya mas.
- N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri *mbak*?
- P : *Kalo* pelaksanaan kebijakan Silampah ini *kan* emang kita buat untuk mengatasi masalah sampah di Semarang mas, ya *kalo* sisi pelaksanaannya dari *admin* kita dulu terus naik ke atas laporan sama Kepala Dinas, setelah itu langsung kita komunikasikan ke UPT-UPT terkait mas, iya selain kami bertiga di sini yang ibaratnya *handle* ya juga pelaksanaannya yang UPT-UPT itu di lapangannya *gitu*
- N : Apa saja fasilitas yang disediakan DLH guna mendukung pelaksanaan Silampah ini *mbak*?
- P : Terdapat 3 buah mas mungkin itu dulu.
- N : Apakah terdapat koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?
- P : Seringnya koordinasi *via grup* jadi lebih mudah dan terarah itu juga setelah aduan atau laporan masyarakat sudah disaring mana yang lebih dulu kita tangani mas.
- N : Terus itu jumlah TPS *mbak* yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa *mbak*?
- P : Total 200 TPS
- N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah itu apa *mbak*?

P : Ya mas, mereka di lapangan itu melakukan pengecekan setiap ada laporan yang masuk di Silampah tersebut.

N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana pak?

P : *Kalo* yang itu bukan ranah saya di sini, coba mas tanyakan nanti ke UPT di lapangan ya mas maaf ini lho.

N : Apakah terdapat respond an dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang?

P : Kami sangat senang karena Pemerintah Kota pun sangat sangat mengapresiasi daripada apa yang kami rancang dan kami lakukan ini. Ini adalah salah satu jalan ya bisa membuat kota ini jauh lebih bebas dari sampah. Kemudian pihak mereka juga sangat antusias melakukan kerjasama dengan kami. Ya jelas kami sangat terbuka sekali mas ya iya *begitu. Seneng* pokoknya

N : Kemudian model pelaksanaan program Silampah ini seperti apa *mbak* apakah basisnya masyarakat atau ada yang lain.

P : Untuk model itu tidak ada ya. Pusat kami ya itu *by online* agar masyarakat tetap mudah menggunakannya tidak ada kesulitan atau hal yang menghambat.

N : Dampak dari pelaksanaan program Silampah sejauh ini bagaimana pak?

P : *Kalo* ditanya soal dampak ya jelas ada *to* mas. *Kalo* dari saya *sih* lebih ke mentalnya masyarakat itu *gimana* mereka sadar dan peka ada sampah bisa lapor ke Silampah, nanti petugas kami pasti langsung ke lapangan, *simple banget*, kemudian praktis dan mudah dalam penggunaan Silampah ini ya. *Nah*, bisa dikatakan berangkat atau kita mulai dari lingkungan mereka katakan dari rumah mereka bisa menjadikan lingkungan bersih bebas sampah, itu menurut saya sudah berdampak banget ya walaupun masih lingkup kecil *tapi* sudah baik, mungkin bisa kedepannya ke lingkup yang lebih luas. Masyarakat *engga usah* bingung-bingung lah mas ini ada sampah harus *dikemanain* misal di situ *gak* ada tempat pembuangannya, lapor saja ke Silampah, *simple*, mudah, dan hasil memuaskan.

N : Apa saja Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : *Kalo* kendala itu jelas ada mas, termasuk juga kendala ya di lapangan ada apa ada apa saja *kek gitu*, kalo biasanya itu lebih kepada kendala apa ya namanya itu ya bisa dibilang kendala teknis mas misal ya ada laporan yang masuk ke *Commad Center* *tapi* banyak *banget* kadang GPS nya itu *gak* akurat *kaya* *gak* bisa jangkau lokasi atau titik-titik *mana aja* makanya dari itu kami di sini langsung koordinasi ke lapangan benar

*gak sih emang* ada sampah apa *engga*, iya *gitu* lebih ke area kadang yang *gak* bisa dijangkau oleh armada angkut kami mas

N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : Silampah ini praktis dan mudah dalam penggunaannya, *kalo* untuk kekurangan belum terlalu populer di kalangan masyarakat karena masih kalah dengan Lapor Hendi mas gitu.

N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah *mbak*?

P : Jelas ada, evaluasi ya meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan penanganan sampah liar terus *buat kek* pelaporan masyarakat terus menurunkan angka timbunan sampah juga yang menjadikan lingkungan Kota Semarang itu bersih, nyaman terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan sampah liar *jadi kalo e* sewaktu ada sampah dimana bisa langsung praktis *gitu* membuka aplikasi Silampah sendiri, iya jadi ada tiga evaluasi mas

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut?

P : Ya masukan saran-saran dan motivasi dari Bapak Dinas dan teman-teman di lapangan.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini pak?

P : Semuanya tergantung masyarakat kita *aja* mas, kami sudah siapkan siap jadi fasilitator misal *gak* ada masyarakat yang bantu *nglaksanain* ya juga percuma *aja* mas, masyarakat *emang* penting banget perannya *kalo* di sini perihal pelaksanaan Silampah ini ya, *kalo* *gak* ada satu pun orang apa masyarakat yang berpartisipasi ya sama *aja* kosong *gak* bakal jalan nantinya. *Itungannya* *aja* user Silampah dari 2018 *sampe* detik ini baru 95, di luar target, kami targetnya *kan* ya lebih dari itu, *kalo* *bener-bener* mereka sadar setiap lingkungan dimana *aja* ada sampah ya harusnya bisa *gunain* Silampah ini. Belum banyak yang *tau* soal Silampah masyarakat kita, jadi ya *agak* susah jadinya. Makanya mau *gimana* caranya kita bangun kesadaran masyarakat kita dari sini.

#### 4. Wawancara Narasumber 4

Transkrip wawancara dengan Rifky Asna selaku Koordinator UPT Wilayah Kebersihan I

N : Halo, selamat pagi mas Rifky. Sebelumnya perkenalkan mas Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya pak. Mungkin nanti bisa menjelaskannya ya mas

P : Iya mas, pagi.

N : Mungkin sebelum ke wawancara, bisa perkenalan terlebih dahulu mas silakan.

P : Ya, saya Rifky Asna, usia 23 Tahun, dan jabatan saya sebagai Koordinator Lapangan di UPT I mas.

N : Baik mas terima kasih. Langsung saja ya mas. Sepengetahuan mas sendiri bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah ini mas?

P : Jadi waktu itu peluncurannya bulan Oktober mas kalo tanggalnya saya lupa. Tapi yang jelas itu Oktober 2018 memang di DLH ada peluncuran awal Silampah ini mas. Ya *begitu*.

N : Materi yang disampaikan itu apa saja ya mas dalam *launching* Silampah?

P : *Wah kalo* materi saya kurang tahu mas *soalnya* dulu pas itu saya tidak ikut peluncuran Silampah ini karena ada kegiatan lain mas.

N : Oh iya baik mas, selanjutnya itu sepengetahuan mas Rifky harapan dari peluncuran Silampah ini apa sih mas?

P : Yang pasti kami tentu sangat senang dan mengapresiasi sekali Silampah ini mas, karena kami *kan* tugasnya *emang* di lapangan ya semoga *aja* dengan program baru Silampah DLH ini mampu mengatasi

permasalahan sampah di Semarang ini. Itu menurut saya yang paling penting. Ya seperti itu lah harapannya dari kami.

N : Baik mas, dari segi tim pelaksananya ya mas, Silampah ini yang bertanggungjawab siapa ya mas?

P : Sebenarnya yang utama ya dari pihak DLH itu sendiri mas dan dibantu dengan *temen-temen* di UPT yang kami tempati ini. Jadi antar UPT di Laboratorium dengan UPT Lapangan ada kerjasama *gitu lah* mas.

N : *Kalo* untuk jumlah SDM yang ada di UPT Laboratorium itu berapa mas?

P : *Kalo* di laboratorium sendiri kurang lebih ada 3 orang mas itu juga sebagai adminnya Silampah itu sendiri.

N : *Kalo* jumlah SDM yang ada di UPT Lapangan ada berapa mas?

P : Jumlah SDM di UPT 1 itu ada 68 orang mas, dari *situ* masing-masing anggota menempati bagian yang berbeda-beda. Ada yang di bagian lapangan, kemudian di kantornya sebagai *admin* yang mengontrol aduan dari masyarakat, ada juga sebagai *driver*.

N : Ya mas, untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa ya?

P : Ada Mas Al-Ghozali, Mba Kiki juga ada di sana mas.

N : Koordinator di UPT I berarti mas Rifky sendiri ya mas atau siapa *gitu* mas?

P : Ya, saya sendiri mas di UPT I.

N : Tugas pokok dari UPT di lapangan itu apa aja *sih* mas?

P : Tugas pokok kami itu khususnya di UPT-UPT Kebersihan Wilayah yang pasti kami lakukan itu melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah. Jadi ya mas *missal* ada aduan atau laporan atau apa di grupnya kami, kami tidak langsung turun ke lapangan, kami klarifikasi terlebih dahulu, mana saja TPS-TPS yang benar-benar harus kami tangani baru itu terjun ke lapangan jadi ada saring-menyaring dulu *gitu* mas *gak* langsung.

N : Alur persiapan pelaksanaan program Silampah itu bagaimana mas?

P : *Setau* saya ya kami fokus ke sosialisasinya ke Kecamatan-Kecamatan terus ke Kelurahan *cuman* karena keterbatasan SDM ya saya katakanlah jadi belum menyeluruh. Ya memang ada jadwalnya hari ini kemana hari ini kemana tapi ya penggerak SDM kami di UPT yang belum menyeluruh *aja gitu*.

N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini ada berapa mas?

P : 101

N : Berapa jumlah armada di UPT I ini mas?

P : Ya untuk jumlah armada di wilayah UPT I itu ada 36 buah mas terbagi menjadi 32 ke *amrol* dan 4 nya itu ke *dump*.

- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana mas?
- P : UPT I melayani Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur. UPT II meliputi Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur. Selanjutnya, untuk UPT III itu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gunungpati. Sedangkan UPT IV melayani Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen.
- N : Baik mas, untuk kegiatan tahap awal persiapan itu sosialisasi, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini?
- P : Jujur *kalo* di UPT I UPT saya ini belum diadakan istilahnya sosialisasi ke Kelurahan apa Kampung-Kampung mas, kurang tahu *kalo* di UPT-UPT lain sepertinya ada yang sudah melaksanakan mas.
- N : Kemudian bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa yang dilakukan mas?
- P : Ya sifatnya *sih* mengenalkan Silampah ini ke banyak orang mas intinya *gitu biar* banyak yang pada gunakan aplikasi ini *soalnya kan* bagus juga promosi-promosi *gitu* di media-media sosial.
- N : Mengapa dipilih media sosial sebagai alat promosi yang efektif untuk Silampah mas?
- P : Perkembangan jaman saja *sih* mas. Karena *kan* juga lebih hemat biaya, *simple* dan praktis mas terus ya langsung mengarah ke targetnya *kan gitu sih*.

- N : Hasil daripada sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja mas?
- P : Baik. *Setau saya kok* meneruskan dan menyebarkan program Silampah ini kepada masyarakatnya mas.  
Coba nanti tanyakan ke Mas Al ya mas saya kurang paham *kalo* ini.
- N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini mas?
- P : Ya semua masyarakat Kota Semarang mas itu sudah jelas *banget*.
- N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri mas?
- P : *Kalo* pelaksanaan kebijakan Silampah ini *kan* emang kita buat untuk mengatasi masalah sampah di Semarang mas, ya *kalo* sisi pelaksanaannya dari *admin* kita dulu terus naik ke atas laporan sama Kepala Dinas, setelah itu langsung kita komunikasikan ke UPT-UPT terkait mas, iya selain kami bertiga di sini yang ibaratnya *handle* ya juga pelaksanaannya yang UPT-UPT itu di lapangannya *gitu*
- N : Ada koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan mas?
- P : Seringnya koordinasi *via grup* mas jadi lebih terarah mana *aja sih* TPS-TPS yang akan dituju itu. Ya jadi seperti itu.
- N : Jumlah TPS pak yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa mas?
- P : Ada 200-*an lah* mas *kalo setau* saya ya.

- N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah di lapangan seperti apa mas?
- P : Melakukan pengecekan setiap ada laporan yang masuk di Silampah tugasnya seperti itu.
- N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana mas?
- P : Ya sebenarnya *sih* sama mas pelaksanaannya itu intinya setelah ada laporan aduan dari masyarakat kami mengecek ke lokasi itu, di sana juga ada masyarakat pelapornya langsung segera kami tangani dan angkut sampah-sampahnya itu.
- N : Apa saja Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah?
- P : Untuk kendala kami di lapangan itu ban bocor mas itu pasti ada *aja* setiap hari waktu pengangkutan misal di jalan bannya bocor, ya bisa kami atasi *sih cuman* itu yang paling sering kami rasakan.
- N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?
- P : Menurut saya sendiri mas ya bagus *sih* praktis *gak* dipungut biaya apapun *cuma* belum populer saja di masyarakat harus ditambah lagi sosialisasinya ini.
- N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah mas?

P : *Kalo* di tingkat UPT itu setiap 3 minggu sekali pasti ada mas, yang ngisi juga sering dari Bapak Kepala Dinasnya langsung.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut pak?

P : Bisa masukan, saran-saran dan motivasi dari Bapak Dinas dan teman-teman di lapangan. Jadi gitu sih kurang lebihnya.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini pak?

P : Untuk faktor lebih ke masyarakatnya mas, masih minim sekali dari masyarakat yang menggunakan program ini ya ada beberapa yang sudah gunakan cuma pengennya kami *kan kalo* bisa di semua kalangan gunakan aplikasi ini mas.

## 5. Wawancara Narasumber 5

Transkrip wawancara dengan Atikah selaku Koordinator UPT Wilayah Kebersihan II

N : Selamat pagi Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan mas Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah

ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya seperti itu bu.

P : Iya selamat pagi. Iya *nda* papa *kok* mas.

N : Mungkin sebelum ke wawancara, bisa perkenalan terlebih dahulu mas silakan.

P : Ya, saya Atikah, usia 31 Tahun, dan jabatan saya sebagai Koordinator Lapangan di UPT II

N : *Nggih* bu. Langsung saja ya mas. Sepengetahuan ibu sendiri bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah ini mas?

P : Ya mas, jadi itu Silampah ini *kan* program baru dari DLH ya mas, *nah* dulu bulan Oktober 2018 silam kami adakan kegiatan peluncuran daripada program Silampah di DLH Kota Semarang itu sendiri yang di acara itu pihak Pemerintah Kota Semarang juga turut hadir meresmikan Silampah ini didampingi oleh Bapak Kepala Dinas mas, jadi setau saya intinya itu.

N : Materi yang disampaikan itu apa saja ya bu dalam *launching* Silampah?

P : Ya banyak *sih* mas, salah satunya semangat baru, kerjasama bagaimana *sih* Silampah yang kami kelola ini bisa istilahnya berkontribusi mengatasi soal sampah di Semarang ini mas.

N : Oh iya baik bu, selanjutnya itu sepengetahuan ibu harapan dari peluncuran Silampah ini apa *sih* bu?

- P : Program ini harus berjalan *gitu aja* mas Doni. Harus optimis berjalan dan berjalan dengan baik.
- N : Baik bu, dari segi tim pelaksananya ya bu, Silampah ini yang bertanggungjawab itu siapa secara langsung?
- P : Dari DLH itu sendiri yang dibantu oleh bagian-bagian UPT di Lapangan juga mas.
- N : Kalo jumlah SDM yang ada di UPT II ada berapa ya bu?
- P : Di UPT 2 sendiri jumlah tim pelaksananya ada 44 orang mas, ya sama seperti UPT-UPT yang lain ada petugas di lapangannya, adminnya, dan sopir buat angkutnya
- N : Baik, kemudian untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa *sih* bu?
- P : Mas Al-Ghozali
- N : Tugas pokok dari UPT di lapangan itu apa aja *sih* ya bu bisa dijelaskan ke saya?
- P : Tugas pokok kami itu khususnya di UPT-UPT Kebersihan Wilayah yang pasti kami lakukan itu melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang dilaporkan masyarakat terhadap permasalahan sampah. Jadi ya mas misal ada aduan atau laporan atau apa di grupnya kami, kami tidak langsung turun ke lapangan, kami klarifikasi terlebih dahulu, mana saja TPS-TPS yang benar-benar harus kami tangani baru itu terjun ke lapangan jadi ada saring-menyaring dulu gitu mas gak langsung.
- N : Setau ibu ya sendiri ya persiapan pelaksanaan program Silampah itu bagaimana?

- P : Ya, jadi kami lebih fokus ke tahap sosialisasi dan persiapan-persiapan SDM nya, armada dan armadanya mas, fokus ke dua hal itu saja oh ya sama promosi ke masyarakat jangan sampai lupa.
- N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini ada berapa bu?
- P : 100-an yang saya *tau* mas.
- N : Berapa jumlah armada di UPT II ini bu?
- P : Untuk jumlah armada kami di UPT II ada 25 mas totalnya, 21 buah ke *amroll*, kemudian 4 ke *dump*.
- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana bu?
- P : Baik mas, jadi sebelumnya itu kami terdiri atas 4 UPT. *Nah* dari UPT yang ada tersebut, masing-masing UPT sudah melayani 4 Kecamatan. Misalnya saja ya mas di UPT saya UPT II itu mencakup Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur mas.
- N : Iya bu, untuk kegiatan tahap awal persiapan itu *kan* sosialisasi, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini?
- P : Jujur *kalo* di UPT saya itu memang belum diadakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh mas karena intenal dari kami juga keterbatasan SDM juga mas. Sudah ada jadwal-jadwalnya hari ini ke Kecamatan mana, selanjutnya kemana dan terus-menerus itu cuma memang belum kesampean aja mas.

N : *Ok* bu, bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa yang dilakukan DLH?

P : *Setau* saya promosi *aja* mas ke orang-orang di Kota Semarang mas.

N : Mengapa dipilih media sosial sebagai alat promosi yang efektif untuk Silampah bu?

P : Karena ya lebih apa ya lebih berhasil *aja gitu* mas, media itu kan luas siapa aja pasti bisa lihat informasi apapun *gitu to* jadi ya menjangkau masyarakat juga *sih* selain juga kami mengikuti perkembangan jaman sekarang. Pasti *by online* dan *online sih*.

N : Hasil daripada sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja bu?

P : Sejauh ini harusnya idealnya *kan* dari peserta yang hadir sosialisasi ya harusnya mereka meneruskan ke masyarakat lain tapi sekarang kabarnya juga belum tahu masyarakat belum banyak yang tahu tentang keberadaan Silampah ini.

N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini bu?

P : Masyarakat Kota Semarang.

N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri bu?

- P : Sederhananya itu *gini mas*, ada laporan masuk dari masyarakat, itu *admin* pusat di DLH cek laporan tersebut, kemudian disaring-saring laporannya itu, terus diteruskan ke admin UPT lapangan yang menjadi wewenang atau tugas di UPT itu baru kami cek ke lokasi dalam hal ini TPS-TPS.
- N : Ada koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?
- P : Jelas ada, kami *bikin grup* khusus aduan ya untuk koordinasi itu mas.
- N : Jumlah TPS yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa bu?
- P : Berapa ya mas banyak *sih* kurang *tau* jumlah pasnya berapa mas coba besok tak tanyain dulu ya pas waktu di Kantor ya mas, saya kurang paham *soale*.
- N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah di lapangan seperti apa?
- P : Ya seperti yang saya bilang tadi mas tugasnya itu cek dan cek setiap ada laporan yang masuk di Silampah tugasnya seperti itu.
- N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana mas?

P : Ya sebenarnya sama mas pelaksanaannya itu intinya setelah ada laporan aduan dari masyarakat kami mengecek ke lokasi itu, di sana juga ada masyarakat pelapornya langsung segera kami tangani dan angkut sampah-sampahnya itu.

N : Apa saja Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah ini bu?

P : Yang sering saya alami itu kendala di armadanya ya kang ban bocor, ban kempes dan lain-lain mas.

N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah bu?

P : Sudah bagus, cuma masih lemah di promosinya itu harus ditingkatkan lagi ke depan mas biar orang lain juga *tau oh* ya ada Silampah ini *gitu*.

N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah di UPT bu?

P : Di tingkat UPT itu setiap 3 minggu sekali pasti ada evaluasi-evaluasi.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut pak?

P : Ya saran-saran sama semangat biar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini bu?

P : Untuk faktor lebih ke masyarakatnya mas, masih minim sekali dari masyarakat yang menggunakan program ini ya ada beberapa yang sudah gunakan cuma pengennya kami kan kalo bisa di semua kalangan

gunakan aplikasi ini mas. Kang juga banyak yang gunain nomor palsu jadi kami susah melacak mas. Itu juga yang sering terjadi.

## 6. Wawancara Narasumber 6

Transkrip wawancara dengan Nur Aziz selaku Koordinator UPT Wilayah Kebersihan III

N : Selamat siang pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan mas Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya seperti itu pak.

P : *Nggih mas monggo.* Saya bantu. Semoga skripsinya lancar ya.

N : *Aamiin* pak, mungkin sebelum ke wawancara, bisa perkenalan terlebih dahulu mas silakan.

P : Saya Nur Aziz, usia 33 Tahun, dan jabatan saya sebagai Koordinator Lapangan di UPT III

N : Baik pak. Langsung saja ya pak. Sepengetahuan Bapak sendiri bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah ini mas?

P : Jadi pada bulan Oktober itu ada peluncuran Silampah di DLH mas.

N : Tahun 2018 ya pak?

P : Ya 2018 mas.

N : Materi yang disampaikan itu apa saja ya pak dalam *launching* Silampah?

P : Saya kurang paham mas materi-materinya karena saya sendiri pada waktu itu gak bisa hadir karena ada halangan mas.

N : Baik pak, dari segi tim pelaksananya itu Silampah ini yang bertanggungjawab itu siapa secara langsung?

P : Dari DLH itu sendiri mas.

N : *Kalo* jumlah SDM yang ada di UPT III ada berapa ya mbak?

P : Ya mas, untuk timnya kami di lapangan itu lumayan banyak. Kami itu ada 4 UPT ya yang melayani TPS-TPS di Kota Semarang, karena keterbatasan SDM juga saat ini di UPT I yang ada mas Rifky itu di sana ada 60-an orang petugas, kemudian di UPT 2 ada 40-an juga *kalo gak* salah, kalo di UPT kami UPT 3 itu SDM nya ada 66 orang. Sama dengan UPT lain gak ada yang beda ada yang di admin, ada yang di lapangan buat mengecek, terus drivernya juga ada. Terus kalo di UPT IV kira-kira setau saya saat ini ada 72-an anggotalah bisa dibbilang *gitu* mas.

N : Kemudian untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa pak?

P : Mas Al mas.

N : Tugas pokok dari UPT di lapangan itu apa saja pak?

P : Jadi Silampah itu *kan* singkatan dari Sistem Lapor Sampah yaitu diharapkan dari sistem itu *e* berharap peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika *e* buangan sampah pertama sampah liar maupun sampah di TPS yang semuanya melebihi kapasitas. Itu *kan* aplikasi terbuka aplikasi yang disebar ke masyarakat umum yang satu untuk kita untuk admin Silampah itu sendiri. Ada laporan masuk di Silampah itu nanti kita ada notifikasi di aplikasi kita *nah* itu masing-masing kita cek yang dilaporkan itu wilayah mana kalo misal di wilayah kita, kita tindaklanjuti *tapi kalo* bukan di wilayah kita cukup tahu. Kalo itu di wilayah kita, segera kita terjunkan tim atau orang untuk penanganan harus di lokasi karena ada foto dan lokasi yang foto tidak boleh ambil dari memori jadi foto langsung, setelah pengerjaan kita foto lokasinya terus yang kemudian di pelapor nanti ada notifikasi kalo sudah dikerjakan.

N : Setau Bapak sendiri ya persiapan pelaksanaan program Silampah itu bagaimana pak?

P : Pertama itu kami selenggarakan kegiatan sosialisasi-sosialisasi mas.

N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini ada berapa pak?

P : Kurang lebih 101 mas

- N : Berapa jumlah armada di UPT III ini pak?
- P : Di UPT III sendiri untuk jumlah total armada ada 22 mas. *Nah* 22 itu dibagi dalam 17 *amroll* dan 5 nya itu *dump* mas.
- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana pak?
- P : Masing-masing UPT itu beda-beda mas. Satu UPT melayani 4 Kecamatan. Misal di UPT III itu melayani Kecamatan Tembalang, Candisari, Banyumanik, dan Gunungpati.
- N : Untuk kegiatan tahap awal persiapan *kan* sosialisasi, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini?
- P : *Kalo* di UPT kami UPT III itu pernah mengadakan sosialisasi mas, dulu sosialisasi kami adakan di Kantor UPT III di Telomoyo.
- N : Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa yang dilakukan DLH pak?
- P : Iya mas, dari Silampah ini kami sangat berharap peran aktif masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap masalah sampah.
- N : Mengapa dipilih media sosial sebagai alat promosi yang efektif untuk Silampah mas?

- P : Karena pertimbangan perkembangan jaman juga mas jadi semuanya itu kan serba praktis dan mudah dalam penggunaannya mas.
- N : Hasil daripada sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja mas?
- P : Setau saya sejauh ini harusnya idealnya kan dari peserta yang hadir sosialisasi ya harusnya mereka meneruskan ke masyarakat lain tapi sekarang kabarnya juga belum tahu masyarakat belum banyak yang tahu tentang keberadaan Silampah ini.
- N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini pak?
- P : masyarakat itu yang utamanya dari semua kalangan mas
- N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri pak?
- P : Jadi alurnya ada laporan masuk ke sistem, terus dicek sama adminnya, terus diteruskan ke UPT, dari UPT langsung terjun ke lokasi untuk mengecek dan diangkutnya sampah-sampah tersebut ke Jatibarang.
- N : Ada koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?
- P : Iya mas, kami ada dua *grup* yang setiap harinya melayani aduan dari masyarakat. Bukan hanya *grup WA* aja ya, tapi juga semua lini mas ada yang dari Silampah, *facebook*, dan media sosial.
- N : Jumlah TPS yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa pak?

- P : Ada sekitar 200 TPS mas yang tersebar di Kelurahan-Kelurahan.
- N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah di lapangan seperti apa *sih* pak?
- P : Tugasnya itu cek dan cek setiap ada laporan yang masuk di Silampah tugasnya seperti itu.
- N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana mas?
- P : Ya sebenarnya *sih* sama mas pelaksanaannya itu intinya setelah ada laporan aduan dari masyarakat kami mengecek ke lokasi itu, di sana juga ada masyarakat pelapornya langsung segera kami tangani dan angkut sampah-sampahnya itu.
- N : Apa saja kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah ini ya pak?
- P : Lebih ke teknis ya mas, misal setiap harinya pas di lapangan ada saja armada kami yang bam bocor *lah*, kempes *lah*, dan mogok *lah* jadi itu kendala yang sering terjadi.
- N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?

P : Kurang membuka media massa yang seperti itu. Kita sudah mempromosikan lewat sosialisasi sosial media tapi ada yang membutuhkan itu ada yang belum mmebutuhkan. Pihak silampah meminta mempromosikan lewat tetangga sekitar

N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah di UPT pak?

P : Di tingkat UPT itu setiap 3 minggu sekali pasti ada evaluasi-evaluasi.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut pak?

P : Ya saran-saran sama semangat biar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini pak?

P : Sosialisasi belum menyeluruh dan merata mas, hanya di beberapa Kecamatan aja seperti di Candisari, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, SOP nya kami undang beberapa perwakilan camat.

## **7. Wawancara Narasumber 7**

Transkrip wawancara dengan Reza Bahrudin Arrasyid selaku Koordinator UPT Wilayah Kebersihan IV

N : Selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan mas Doni Rahmanto mahasiswa Ilmu Politik UNNES semester 8. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang program Silampah pak, tetapi fokus saya di pelaksanaannya. Penelitian saya tentang pelaksanaan Silampah ini dapat

dibagi menjadi tahap peluncuran, pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasinya seperti itu pak.

P : *Nggih* mas Doni, silakan mas.

N : Iya pak, mungkin sebelum ke wawancara, bisa perkenalan terlebih dahulu pak silakan.

P : Baik, perkenalkan nama saya Reza Bahrudin Arrasyid, usia 28 Tahun, dan jabatan saya sebagai Koordinator Lapangan di UPT IV

N : Baik pak. Langsung saja ya pak. Sepengetahuan Bapak sendiri bagaimana pelaksanaan kegiatan peluncuran program Silampah ini pak?

P : Peluncuran Silampah itu pada Oktober itu ada peluncuran Silampah di DLH mas.

N : Tahun 2018 ya pak?

P : Ya betul 2018 ada peluncuran Silampah.

N : Materi yang disampaikan itu apa saja ya pak dalam *launching* Silampah?

P : Materinya itu dari Bapak Dinas yang waktu itu Bapak Muthohar menyampaikan bahwa ini merupakan trobosan baru yang bagus untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kota Semarang setau saya seperti itu kurang lebihnya mas.

- N : *Ok* pak, dari segi tim pelaksananya itu Silampah ini yang bertanggungjawab itu siapa secara langsung?
- P : Yang bertanggungjawab ya pasti dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini tapi ada wewenang khususnya di bagian Bidang Pengelolaan Sampah yang di bawah lagi ada sub-sub bagian khusus ada UPT di admin sama UPT di lapangannya itu. Jadi ada 2 sih mas sebenarnya. Ada UPT Admin sama UPT Lapangan.
- N : Untuk jumlah SDM yang ada di UPT IV ada berapa ya pak?
- P : Ada sekitar 72 orang mas *kalo* di UPT saya.
- N : Kemudian untuk tim pelaksana di UPT Laboratorium itu yang mengkoordinir namanya siapa pak?
- P : Mas Al.
- N : Tugas pokok dari UPT di lapangan itu apa *aja* saja ya pak?
- P : Tugas pokoknya yang pasti kita itu tugasnya ngecek mas daripada aduan yang masuk tadi kita cek di lokasi ada apa tidak *gitu kan* misal ya benar ada kami langsung atasi.
- N : Persiapan pelaksanaan program Silampah itu bagaimana pak?
- P : Banyak *sih setau* saya ya persiapan sosialisasi yang targetnya harus menyeluruh, fasilitas-fasilitas pendukung seperti komputer di *Commad Center* dan yang jelas harus ada armadanya itu.

- N : Terus itu armada yang disediakan oleh DLH untuk mendukung program ini ada berapa pak?
- P : 101 mas
- N : Berapa jumlah armada di UPT IV ini pak?
- P : Ada kurang lebih 18 armada mas itu juga terbagi menjadi 14 *amroll* dan 4 nya di *dump*.
- N : Untuk mekanisme pembagian wilayah per UPT itu bagaimana pak?
- P : Masing-masing UPT itu beda-beda mas. Tapi setiap UPT nya itu kami melayani 4 Kecamatan ya jadi *gitu* untuk pembagiannya.
- N : Untuk kegiatan tahap awal persiapan jelas sosialisasi, sejauh mana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Silampah ini?
- P : Saya katakan belum maksimal mas, karena belum menjangkau semua Kecamatan apa Kelurahan di Semarang ini hanya masih beberapa saja *lah setau* saya gitu.
- N : Bentuk sosialisasi di media sosial itu seperti apa yang dilakukan DLH pak?
- P : Iya mas, dari Silampah ini kami sangat berharap peran aktif masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap masalah sampah.
- N : Mengapa dipilih media sosial sebagai alat promosi yang efektif untuk Silampah pak?

- P : Ya karena jaman juga mas jadi semuanya itu *kan* serba praktis dan mudah dalam penggunaannya mas.
- N : Hasil daripada sosialisasi yang dilakukan DLH itu hasilnya apa saja pak?
- P : *Kalo* hal ini mohon maaf saya kurang tau ya mas.
- N : Siapa target utama dalam pelaksanaan Silampah ini pak?
- P : masyarakat itu yang utamanya dari semua kalangan mas
- N : Bagaimana pelaksanaan program Silampah yang dikelola DLH itu sendiri pak?
- P : Jadi alurnya ada laporan masuk ke sistem, terus dicek sama adminnya, terus diteruskan ke UPT, dari UPT langsung terjun ke lokasi untuk mengecek dan diangkutnya sampah-sampah tersebut ke Jatibarang.
- N : Ada koordinasi antara UPT Pengelola dengan UPT Pelaksana di Lapangan?
- P : Kami ada dua *grup* yang setiap harinya melayani aduan dari masyarakat seperti di *facebook*, dan media sosial yang lain, di *instagram, twitter* mas.
- N : Jumlah TPS yang dilayani oleh Silampah tersebut sejauh ini totalnya ada berapa ya pak?
- P : 200 TPS mas yang tersebar di Kelurahan-Kelurahan.
- N : Dalam pelaksanaan Silampah, tugas dari pasukan merah di lapangan seperti apa saja *gitu*?
- P : Tugasnya itu cek dan cek setiap ada laporan yang masuk di Silampah tugasnya seperti itu.

- N : Saya dalam penelitian Silampah ini memilih 3 TPS dari 200 TPS yang ada. Sebenarnya kan sama saja dalam konteks pelaksanaannya ya pak, nah dari itu agar mudah saya pahami pelaksanaan Silampah di TPS Jalan Noroyono, TPS Jalan Satria 03 dan Bekas Pasar Beruk itu bagaimana mas?
- P : *Betul* sekali mas, mekanisme akhir setelah kita lakukan pembersihan dan pengangkutan sampah itu ya muaranya di TPA Jatibarang.
- N : Apa saja kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Silampah?
- P : Ban bocor, kempes *lah* mungkin itu yang sering saya dan *temen-temen* rasakan di lapangan waktu pengangkutan sampahnya mas.
- N : Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Silampah?
- P : *Kalo* kelebihan Silampah ini menurut saya ya sudah bagus *kan* mas, artinya masyarakat tinggal melapor misal ada masalah sampah di lingkungan mereka ibaratnya kan tinggal *klik* dan *klik*, *nda* ribet harus kesana-kesini jadi *udah* bagus *aja sih*, cuma mungkin ya ke depannya sosialisasi harus merata lagi karena masih sangat minim saya lihat.
- N : Kapan biasanya diadakan kegiatan evaluasi program Silampah di UPT?

P : Setiap 3 minggu sekali itu *kalo* di UPT kami mas, kalo di UPT DLH biasanya itu 3 Bulan sekali kita evaluasi.

N : Apa isi materi yang disampaikan dalam evaluasi tersebut mas?

P : Ya saran-saran sama semangat biar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

N : Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Silampah ini mas?

P : Faktor penghambatnya ya apa ya mungkin banyak dari masyarakat yang kurang paham akan Silampah ini, pernah terjadi mas jadi masyarakat itu kan melapor ke kami di sistem itu ya, pas kami cek ternyata lokasi laporannya bukan wewenang wilayah kami ya jadi artinya salah kaprah dikira kami tidak menangani atau *gimana kan* yang jelas itu bukan wewenang atau ranahnya kami, ya menurut saya itu penghambatnya.

## Lampiran 5. SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

  
**UNNES**

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor: 13109/UN37.1.3/KM/2019**

**Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)  
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES  
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;  
4. SK Rektor UNNES No.162/G/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 11 November 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:  
Nama : Puji Lestari, S.Pd., M.Si.  
NIP : 197707152001122008  
Pangkat/Golongan : IV/a  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing  
Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :  
Nama : DONI RAHMANTO  
NIM : 3312416086  
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik  
Topik : Politik Lingkungan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 11 November 2019

Tembusan  
1. Wakil Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal

  
Dr. ~~UNNES~~ Soehatol Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

3312416086  
...: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :...

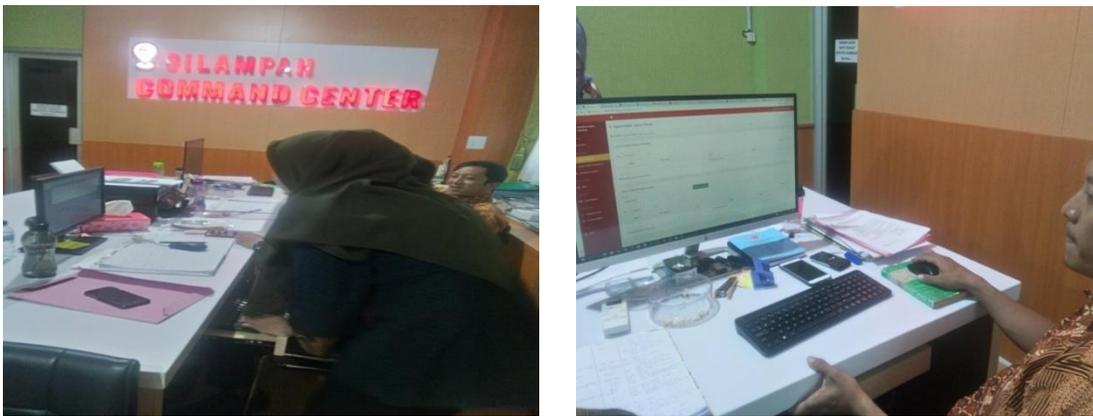
## Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: <a href="http://fis.unnes.ac.id">http://fis.unnes.ac.id</a>, surel: <a href="mailto:fis@mail.unnes.ac.id">fis@mail.unnes.ac.id</a></p>	
Nomor	: B/3454/UN37.1.3/LT/2020	18 Mei 2020
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50151</p>		
<p>Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:</p>		
Nama	: Doni Rahmanto	
NIM	: 3312416086	
Program Studi	: Ilmu Politik, S1	
Semester	: Genap	
Tahun akademik	: 2019/2020	
Judul	: Pengelolaan Program Silampah (Aplikasi Lapori Sampah) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Sampah di Kota Semarang	
<p>Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 19 Mei s.d 30 Mei 2020.</p>		
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
<p>a.n. Dekan FIS Wakil Dekan Bid. Akademik, Prof. Dr. Wasino, M.Hum. NIP. 8051789011001</p> 		
<p>Tembusan: Dekan FIS; Universitas Negeri Semarang</p>		
		
<p>Nomor Agenda Surat : 800 677 881 1</p>		
<p>Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-05-18 14:03:03)</p>		

## Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



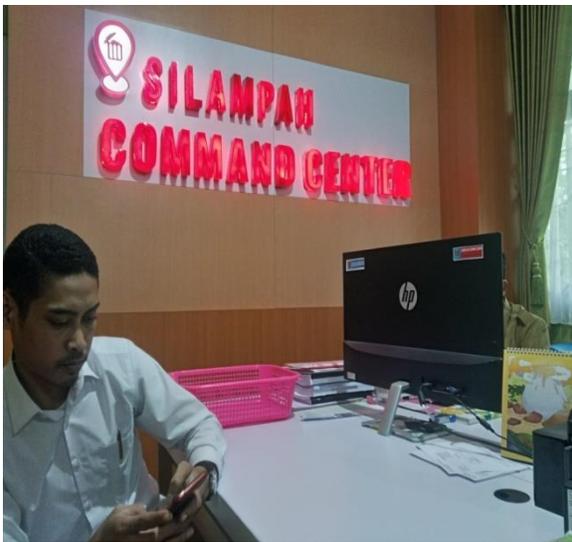
Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan informan utama di *Commad Center* Silampah



Gambar 2. Proses pengecekan laporan masuk Silampah oleh petugas

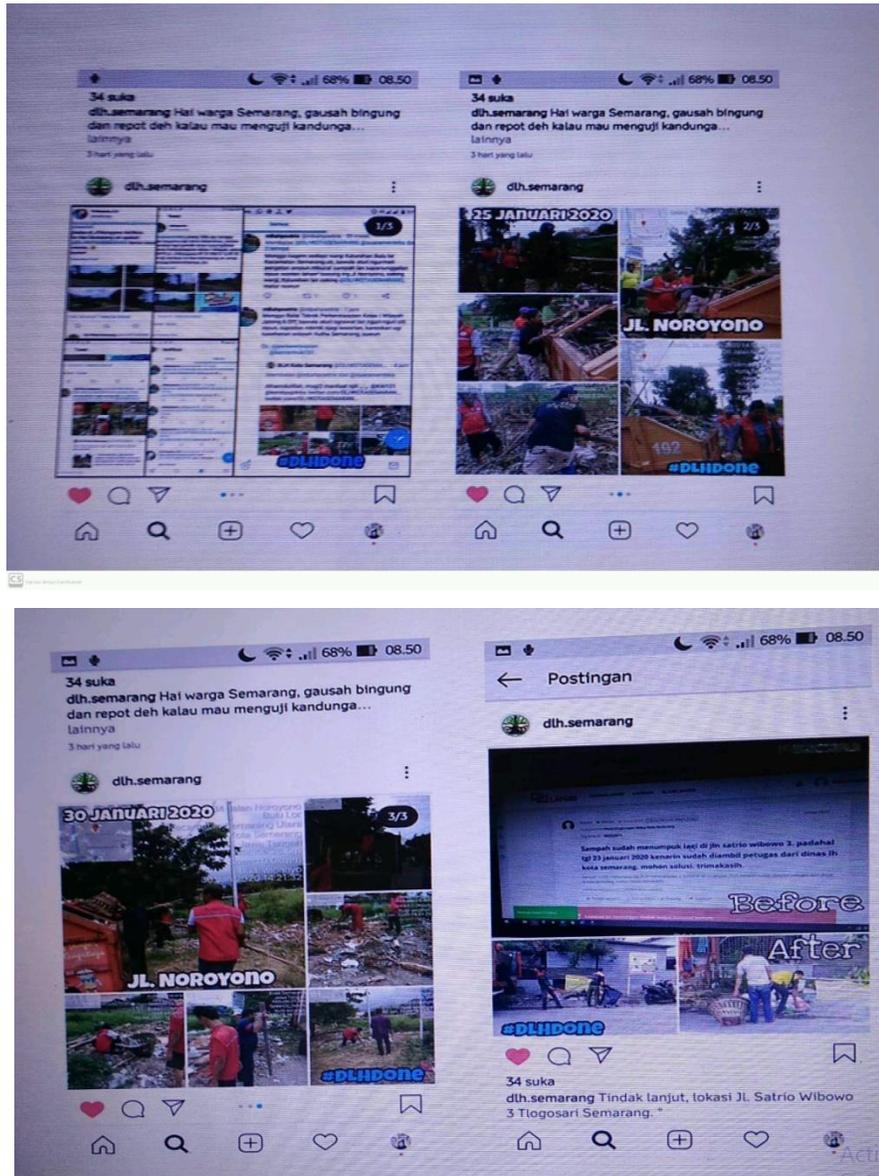


Gambar 3. Peluncuran program Silampah pada 17 Oktober Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

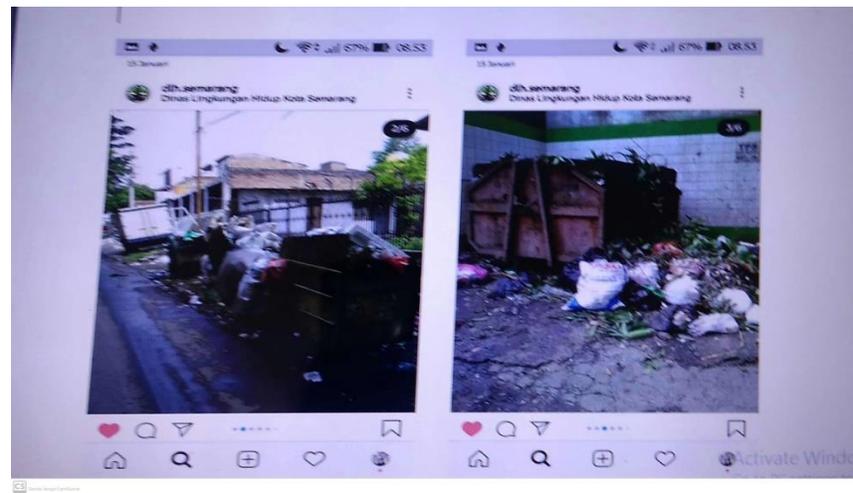
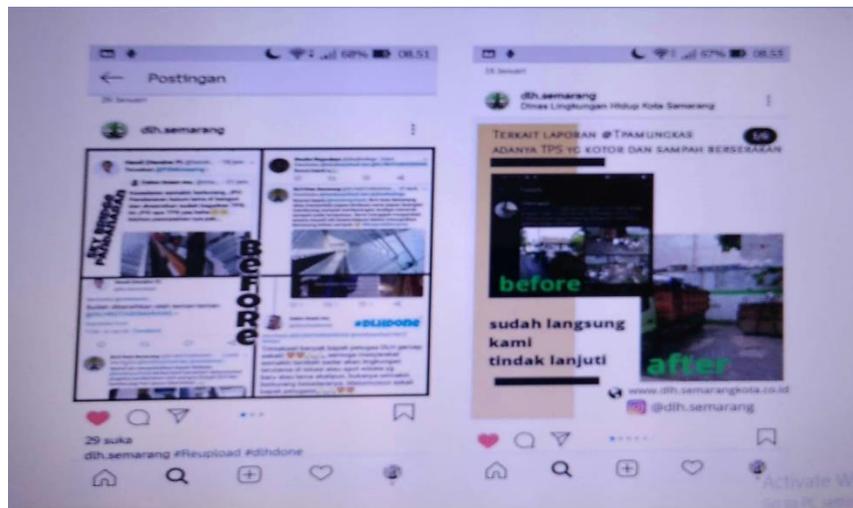


Gambar 4. Proses koordinasi antara UPT Laboratorium dengan UPT di Lapangan

## Lampiran 8. Dokumentasi Pelaksanaan Silampah di Lapangan



Gambar 1. Pelaksanaan Silampah di Jalan Noroyono dan di Jalan Satrio Wibowo 3 Tlogosari Semarang



Gambar 2. Pelaksanaan Silampah di Bekas Pasar Mpu Tantular